



WALI KOTA PAYAKUMBUH

Payakumbuh, 25 Maret 2025

Nomor : 130/49/Wk-Pyk-2025
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : **Surat Pengantar**

Kepada Yth :

- 1. Menteri PAN & RB RI**
 - Menteri Dalam Negeri RI
 - Kepala Bappenas RI
- di

J a k a r t a

Dengan hormat,

Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh (LKjIP) Tahun 2024	1 (satu) Dokumen	Terlampir
2.	Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025	1 (satu) Dokumen	Terlampir

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA



PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH



LKIP 2024

#bangga
#melayani
#bangsa

BerAKHLAK

KATA PENGANTAR



Puji syukur dan ucapan Alhamdulillah, atas kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 dapat dirampungkan. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini secara substantif adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sesuai dengan amanah atau mandat yang diterima.

Materi laporan antara lain menguraikan capaian kinerja sasaran dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukurnya. Tahun 2024 ini merupakan Tahun Kedua dari pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, dan untuk masing-masing indikator telah ditetapkan target yang akan dicapai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Payakumbuh.



Payakumbuh, 25 Maret 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

IKHTISAR EKSEKUTIF



Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (***Clean and Good Governance***) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan berorientasi kepada hasil (***Result Oriented Government***), sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini memuat Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi internal sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Merujuk kepada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, ditetapkan 5 Tujuan, 12 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun Pertama (tahun 2023) periode perencanaan 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan manusia yang berkualitas

Tujuan I terdapat 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja :

- Capaian Kinerja sasaran, dari 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja, rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 91,28% kategori sangat Tinggi (lebih dari 91%).

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Tujuan II terdapat 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja :

- Capaian Kinerja sasaran, dari 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja, 5 indikator dengan capaian melebihi 100% kategori sangat tinggi, rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 168,72% dengan kategori sangat tinggi (lebih dari 91%).

Tujuan III : Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

Tujuan III terdapat 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja :

- Capaian kinerja sasaran, dari 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja dengan capaian melebihi 100 % dengan kategori sangat tinggi (lebih dari 91%), dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 107,04% dengan kategori sangat tinggi (melebihi 91%).

Tujuan IV : Meningkatnya keberlanjutan Pembangunan yang berwawasan lingkungan

Tujuan IV terdapat 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja :

- Capaian kinerja sasaran, dari 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja dengan capaian melebihi 100 % dengan kategori sangat tinggi (lebih dari 91%), dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,66% dengan kategori sangat tinggi (melebihi 91%).

Tujuan V : Meningkatnya tata kehidupan Masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

Misi V terdapat 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :

- Capaian kinerja sasaran, dari 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan capaian melebihi 100 % dengan kategori sangat tinggi (lebih dari 91%), dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 138,76% dengan kategori sangat tinggi (melebihi 91%).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 12 (dua belas) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, **19 indikator kinerja** atau **95,00%** dengan capaian melebihi 91% bermakna **Sangat Tinggi** dan **1 indikator**

atau **5%** dengan capaian rendah. Jadi jika di total Rata-rata capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2024 sebesar **113,95%**, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar **114,20 %**, mengalami **penurunan** sebesar **-0,25%**.

Penurunan total rata-rata capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2024 terjadi karena satu indikator Kinerja Sasaran realisasinya tidak tercapai sehingga mempengaruhi hasil capaian rata-rata Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh secara keseluruhan.

Penyebab dari Penurunan total rata-rata capaian indikator kinerja tersebut adalah karena 1 indikator sasaran dengan capaian rendah yakni Prevalensi Stunting dengan capaian hanya 58,57%, dan hal ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Payakumbuh kedepannya, yang menuntut Komitmen seluruh stake holder di Kota Payakumbuh untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan lancar guna menunjang pencapaian target indikator sasaran Pemerintah Kota.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	4
	1.4 Sejarah Kota Payakumbuh	4
	1.5 Gambaran Umum Kota Payakumbuh	6
	1.6 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
	1.7 Sumber Daya Aparatur.....	13
	1.8 Tinjauan Perekonomian	14
	1.9 Sistematika Penulisan	19
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	21
	2.1 Rencana Strategis	21
	2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2024	24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	27
	3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	30
	3.2 Realisasi Anggaran	181
	3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan	182
BAB IV	PENUTUP	199

LAMPIRAN

1. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Walikota Payakumbuh Tahun 2024 (Penetapan Kinerja Tahun 2024)
3. Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024.
4. LRA Tahun Anggaran 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh.....	7
Tabel 1.2	Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	8
Tabel 1.3	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Kota Payakumbuh Tahun 2024	10
Tabel 1.4	Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	11
Tabel 1.5	Distribusi Persentase PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	16
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstanta 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	22
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Payakumbuh sebelum direviu Tahun 2023-2026	23
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024	28
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024	32
Tabel 3.4	Indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat Tahun 2020-2024	34
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas.....	35
Tabel 3.6	Sasaran dan Indikator Tujuan I Tahun 2024	36
Tabel 3.7	Data Capaian Indikator Sasaran Tujuan I Tahun 2024 ...	37
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	37
Tabel 3.9	Harapan lama sekolah di Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2024.....	38
Tabel 3.10	Rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2024.....	39
Tabel 3.11	Jumlah sarana Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2024	41

Tabel 3.12	Jumlah kelas, rombel, Murid dan rata-rata perkelas menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2024	41
Tabel 3.13	Rasio Guru dan Murid menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2024	42
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	44
Tabel 3.15	Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	45
Tabel 3.16	Jumlah Kepesertaan JKN Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	46
Tabel 3.17	Sarana Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024	48
Tabel 3.18	Sumber daya Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024	49
Tabel 3.19	Penyakit terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024.....	51
Tabel 3.20	Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024	53
Tabel 3.21	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	57
Tabel 3.22	Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender.....	58
Tabel 3.23	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024.....	59
Tabel 3.24	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....	60
Tabel 3.25	Sasaran Strategis dan IKU pada Tujuan II Tahun 2024	67
Tabel 3.26	Evaluasi Pencapaian Tujuan II Sasaran 1-3 Tahun 2024.....	68
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.....	69
Tabel 3.28	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2024	70
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran.....	79
Tabel 3.30	Perbandingan Tingkat Pengangguran Antar Waktu Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024	80
Tabel 3.31	Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2020-2024	81
Tabel 3.32	Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	82
Tabel 3.33	Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	83
Tabel 3.34	Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Sektor Srategis Tahun 2024	87
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sektor Srategis	87

Tabel 3.36	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	88
Tabel 3.37	Capaian IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2024	89
Tabel 3.38	Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Sektor Industri Tahun 2020-2024	89
Tabel 3.39	Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	90
Tabel 3.40	Capaian IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024	96
Tabel 3.41	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2020-2024	96
Tabel 3.42	Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi di Kota Payakumbuh	100
Tabel 3.43	Perkembangan Capaian Realisasi Investasi tahun 2020-2024 dibandingkan akumulasi 1 tahun RPD Tahun 2023-2026	100
Tabel 3.44	Perkembangan Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024	101
Tabel 3.45	Daftar Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan Tahun 2024	101
Tabel 3.46	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2024	102
Tabel 3.47	Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Aplikasi OSS RBA 2024	103
Tabel 3.48	Sasaran dan Indikator Tujuan 3 Tahun 2024.....	109
Tabel 3.49	Data Capaian Indikator Sasaran Tujuan 3 Tahun 2024...	109
Tabel 3.50	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan	111
Tabel 3.51	Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2020 s/d 2024.....	111
Tabel 3.52	Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	112
Tabel 3.53	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024.....	113
Tabel 3.54	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan 2024.....	113
Tabel 3.55	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan 2024.....	122
Tabel 3.56	Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	126

Tabel 3.57	Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024.....	127
Tabel 3.58	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	131
Tabel 3.59	Bobot Nilai Evaluasi SPBE Untuk setiap Domain	133
Tabel 3.60	Kategori Nilai Indeks SPBE	133
Tabel 3.61	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Payakumbuh Tahun 2020 s.d 2024	134
Tabel 3.62	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Payakumbuh Tahun 2024	134
Tabel 3.63	Nilai Indeks Kematangan Indikator Kota Payakumbuh Tahun 2024	135
Tabel 3.64	Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024	139
Tabel 3.65	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat Tahun 2024	140
Tabel 3.66	Kategori Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	142
Tabel 3.67	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	143
Tabel 3.68	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2024 oleh LPPM Universitas Andalas	146
Tabel 3.69	Perbandingan nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2024 Berdasarkan SKM Mandiri dan LPPM Universitas Andalas	147
Tabel 3.70	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2020 s.d 2024	149
Tabel 3.71	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2024	149
Tabel 3.72	Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2024	151
Tabel 3.73	Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2024	152
Tabel 3.74	Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH	156
Tabel 3.75	Hasil Perhitungan Pencemaran Bagi Peruntukan Sungai di Kota Payakumbuh	158
Tabel 3.76	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air	158
Tabel 3.77	Indeks Kualitas Air Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	159
Tabel 3.78	Indeks Kualitas Udara Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	160
Tabel 3.79	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	161

Tabel 3.80	Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	162
Tabel 3.81	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	163
Tabel 3.82	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya infrastruktur perkotaan.....	165
Tabel 3.83	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas penataan perkotaan	166
Tabel 3.84	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS SBK	176
Tabel 3.85	Kriteria Lembaga Adat yang aktif	177
Tabel 3.86	Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter	179
Tabel 3.87	Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik ...	179
Tabel 3.88	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	181

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Tahun 2024	9
Grafik 1.2	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Tahun 2024	10
Grafik 1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan ..	13
Grafik 1.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan ..	14
Grafik 3.1	Kasus Kematian Bayi Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	47
Grafik 3.2	Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2020-2024	48
Grafik 3.3	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024	50
Grafik 3.4	Perkembangan Indeks Pemeberdayaan Gender Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	59
Grafik 3.5	Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Payakumbuh Tahun 2012-2024.....	71
Grafik 3.6	Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024	80
Grafik 3.7	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Payakumbuh Tahun 2024	84
Grafik 3.8	Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan Pekerjaan Utama dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2024	84
Grafik 3.9	Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2024	85
Grafik 3.10	Proporsi Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan pada Tahun 2024	102
Grafik 3.11	Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	144
Grafik 3.10	Perbandingan Nilai IKM UPP Kota Payakumbuh Semester I dan II Tahun 2024	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jembatan Ratapan Ibu	6
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kota Payakumbuh	7
Gambar 3.1	Puskesmas Padang Karambia di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	49
Gambar 3.2	Tujuan pada RPD Kota Payakumbuh tahun 2023 – 2026 ...	68
Gambar 3.3	Kampung Rendang dan perkembangannya menjadi Sentra IKM Kota Payakumbuh	92
Gambar 3.4	Perkembangan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh	93
Gambar 3.5	Rekapitulasi penerbitan NIB melalui OSS RBA Tahun 2024	104
Gambar 3.6	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengurusan NIB Tahun 2024	105
Gambar 3.7	Penghargaan atas pelayanan investasi terbaik Nasional ...	105
Gambar 3.8	SITARANG (Sistem Informasi Penataan Ruang)	106
Gambar 3.9	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116
Gambar 3.10	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Penanggulangan Stunting Kota Payakumbuh	116
Gambar 3.11	Aplikasi e-Kinerja Kota Payakumbuh.....	117
Gambar 3.12	Dashboard ASN Note Aplikasi e-Kinerja untuk pengelola kepegawaian perangkat daerah	118
Gambar 3.13	Dashboard Aplikasi Presensi Kota Payakumbuh komplemen Aplikasi e-Kinerja Kota Payakumbuh	118
Gambar 3.14	Penyerahan Penghargaan ASN Terinovasi pada Anugrah Inovasi Award Pemerintah Kota Payakumbuh 2024.....	119
Gambar 3.15	Informasi Laporan Kinerja di Website PD.....	120
Gambar 3.16	Laporan kinerja yang dipublikasikan pada website	120
Gambar 3.17	Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup selama tahun 2024	170

BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbagai upaya dilakukan salah satu adalah fokus pada peningkatan capaian pada Reformasi Birokrasi berdampak, dimana salah satunya adalah akuntabilitas kinerja. Terkait dengan itu maka pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya secara rinci dan sistematis. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja tersebut berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Sasaran Strategis yang jelas dengan Indikator Kinerja yang SMART merupakan parameter keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan, demi menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/ Wali Kota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Laporan Kinerja Kota Payakumbuh menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh periode 2023–2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk

memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Selanjutnya sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan untuk melaporkan tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun budaya kerja yang dimulai dari pimpinan sampai kepada level staf untuk mencapai Tujuan Pemerintah Kota Payakumbuh. Sehingga tujuan mewujudkan masyarakat Kota Payakumbuh yang Maju, Sejahtera, Bermartabat akan tercapai dengan baik. Terakhir tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menyampaikan informasi tentang upaya-upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melakukan perampingan-perampingan program dan kegiatan, sehingga akan terwujud efisiensi anggaran yang akan mengarah pada perampingan struktur organisasi pada kelembagaan Pemerintah Daerah.

Perlu juga dalam Laporan kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini kami informasikan bahwa dalam tahun ini terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terkait penanggulangan Kemiskinan ekstrim, Pengendalian Inflasi, Penanganan dan pencegahan stunting, Peningkatan Investasi dan P3DN, dengan melakukan percepatan penerapan Reformasi Birokrasi berdampak dengan menggerakkan semua stake holder terkait.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta Peraturan Daerah terkait dengan Dokumen Perencanaan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

1.4 SEJARAH KOTA PAYAKUMBUH

Payakumbuh berasal dari kata Payau dan Kumbuah, dimana berdasarkan literatur lama Payau (Payo) dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa, dan Kumbuah adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di kanagarian Koto Nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970, melalui Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). Berdasarkan peraturan tersebut Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri, dan tanggal 17 Desember ditetapkan menjadi hari jadi Kota Payakumbuh. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, berubah menjadi Kota Payakumbuh. Terakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977).

Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah.

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda waktu itu. Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik. Pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.



Gambar 1.1 Jembatan Ratapan Ibu

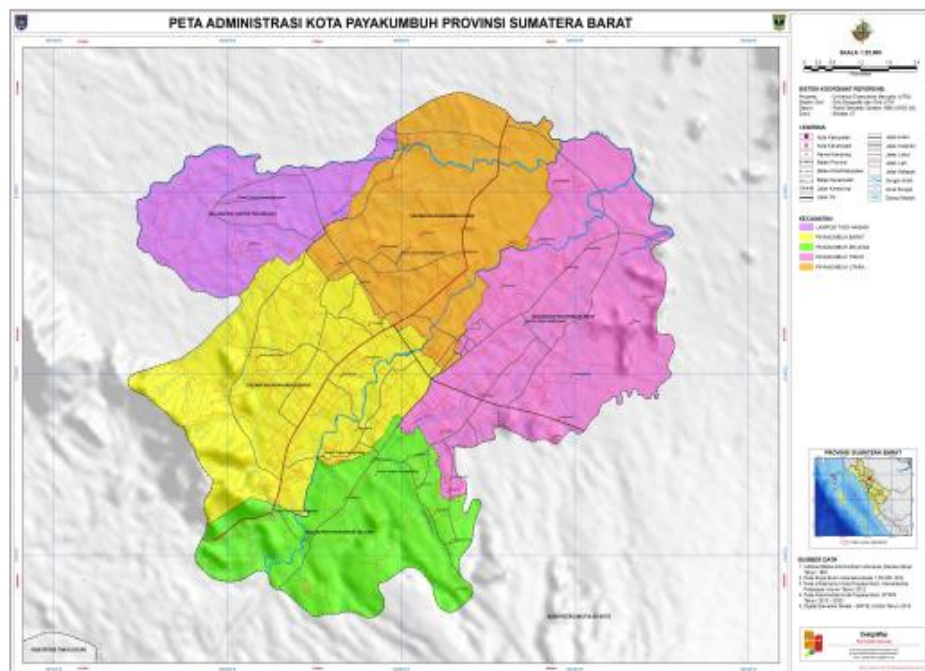
1.5 GAMBARAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Kota payakumbuh terletak antara $00^{\circ}10'$ - $00^{\circ}17'$ Lintang Selatan dan antara $100^{\circ}35'$ sampai dengan $100^{\circ}45'$ Bujur Timur dengan luas wilayah $80,43 \text{ Km}^2$. Kota Payakumbuh merupakan dataran sedang dengan ketinggian $\pm 514 \text{ m}$ di atas permukaan laut. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Payakumbuh berada pada rentang $450\text{m}-750\text{m}$.

Pada posisi geografisnya, Kota Payakumbuh berbatasan dengan beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Payakumbuh

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 80,43 km² yang setara dengan 0,19% dari luas propinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan lima Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari 3 Kecamatan menjadi 5 Kecamatan, di mana pada tanggal 23 Desember 2008 peresmian Kecamatan Payakumbuh Selatan dan pada tanggal 24 Desember 2008 peresmian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Pembagian wilayah administratif seperti pada tabel 1.1:

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,07	23,70
2	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	14,53	18,07
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	28,26
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang Aua Kuning	14,68	18,25
5	Lamposi Tigo Nagari	Sungai Durian	9,42	11,71
Total			80,43	100,00

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2025

Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas 22,73 km² atau 28,26 persen, sementara Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah yang paling kecil yaitu seluas 9,43 km² atau 11,71 persen.

Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata 21°-32° celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 63% sampai dengan 85%. Curah hujan di Kota Payakumbuh tergolong sedang yaitu rata-rata 1.797 mm sampai dengan jumlah hari hujan 118 hari setahun. Musim hujan pada umumnya terjadi pada bulan November sampai Mei dan musim kemarau pada bulan Juni sampai Oktober.

Penggunaan lahan Kota Payakumbuh tahun 2023 dapat dilihat lebih rinci pada tabel 1. 2 dibawah ini :

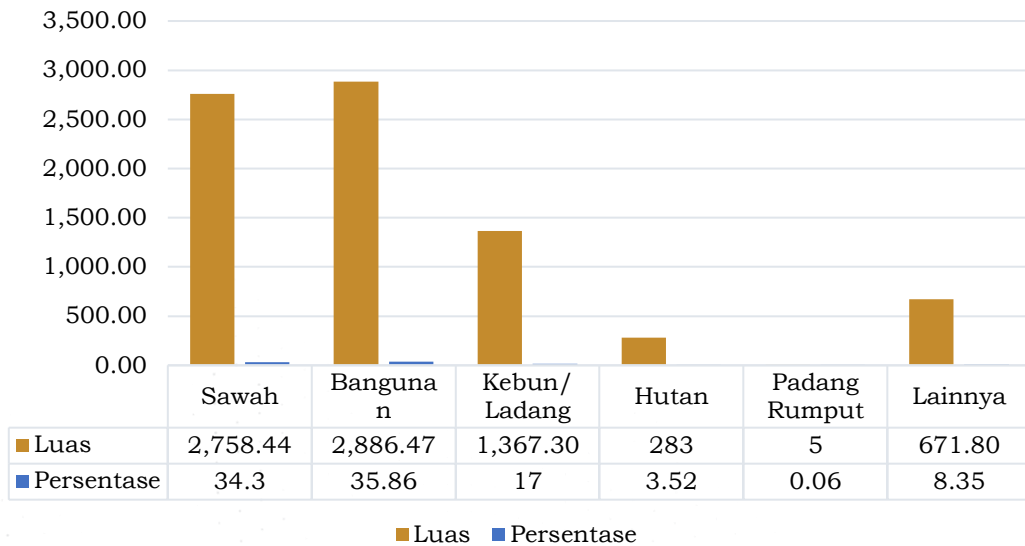
Tabel 1.2
Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Sawah	2.758,44	34,30
2	Tanah untuk bangunan dan sekitarnya	2.886,47	35,86
3	Kebun/ladang	1.367,30	17,00
4	Kolam/tebat	71,00	0,88
5	Ditanami pohon (hutan rakyat)	283,00	3,52
6	Pengembalaan/Padang rumput	5,00	0,06
7	Lainnya	671,80	8,35
Jumlah		8.043,00	100,00

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2025

Bila dilihat dari segi penggunaan tanah di Kota Payakumbuh, bagian terbesar yaitu 35,86% atau 2.886,47 Ha digunakan untuk Tanah bangunan dan sekitarnya. Selanjutnya luas Tanah untuk sawah sebesar 2.758,44 Ha atau 34,30%, sedangkan luas lahan yang paling kecil persentasenya yaitu padang rumput sebesar 0,06%. Pertumbuhan penduduk yang semakin dinamis menjadi alibi perubahan ini. Penggunaan lahan Kota Payakumbuh tahun 2023 dapat dilihat lebih rinci pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.1
Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya Di Tahun 2024



3. Aspek Demografis

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Data ini akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur ruang daerah. Selain itu, informasi mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui pajak/retribusi di masa yang akan datang.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diketahui jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 147.963 jiwa, yang terdiri dari 74.524 laki-laki dan 73.439 perempuan. Dari data tersebut terlihat penyebaran penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Payakumbuh Barat dan terkecil di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

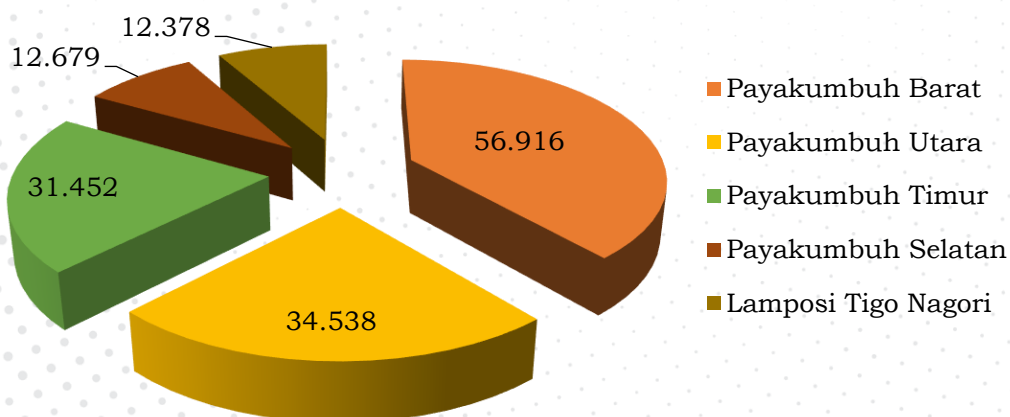
Tabel 1.3
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan
Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Jumlah Penduduk Tahun 2024	Kepadatan Penduduk Tahun 2024
1	Payakumbuh Barat	19,06	54.614	54.575	55.722	56.916	2.986
2	Payakumbuh Utara	14,53	33.237	33.416	33.872	34.538	2.377
3	Payakumbuh Timur	22,73	29.668	29.962	30.673	31.452	1.384
4	Lamposi Tigo Nagari	9,43	11.662	11.707	12.042	12.378	1.313
5	Payakumbuh Selatan	14,68	12.030	12.153	12.418	12.679	864
	Kota Payakumbuh	80,43	141.171	141.813	144.727	147.963	1.840

Sumber : Buku Data Agregat Kependudukan Semester I Dukcapil Tahun 2024

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan lain sebagainya.

Grafik 1.2
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Tahun 2024



Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk di suatu daerah. Penyebaran penduduk Kota Payakumbuh tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 2.986 jiwa/km. Sedangkan kepadatan penduduk

geografis terendah terletak di Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan kepadatan penduduk 864 jiwa/km.

Komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari penduduk laki-laki sebagaimana terlihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n	%	n	%	n	%
1	Payakumbuh Barat	28.599	38,38	28.317	38,56	56.916	38,47
2	Payakumbuh Utara	17.346	23,28	17.192	23,41	34.358	23,34
3	Payakumbuh Timur	15.952	21,41	15.500	21,11	31.452	21,26
4	Lamposi Tigo Nagori	6.243	8,38	6.135	8,35	12.378	8,37
5	Payakumbuh Selatan	6.384	8,57	6.295	8,57	12.679	8,57
	Jumlah	74.524	100	73.439	100	147.963	100

Sumber : Buku Data Agregat Kependudukan Semester I Dukcapil Kota Payakumbuh Tahun 2024

1.6 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memberi kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Maka disusunlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Payakumbuh dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum

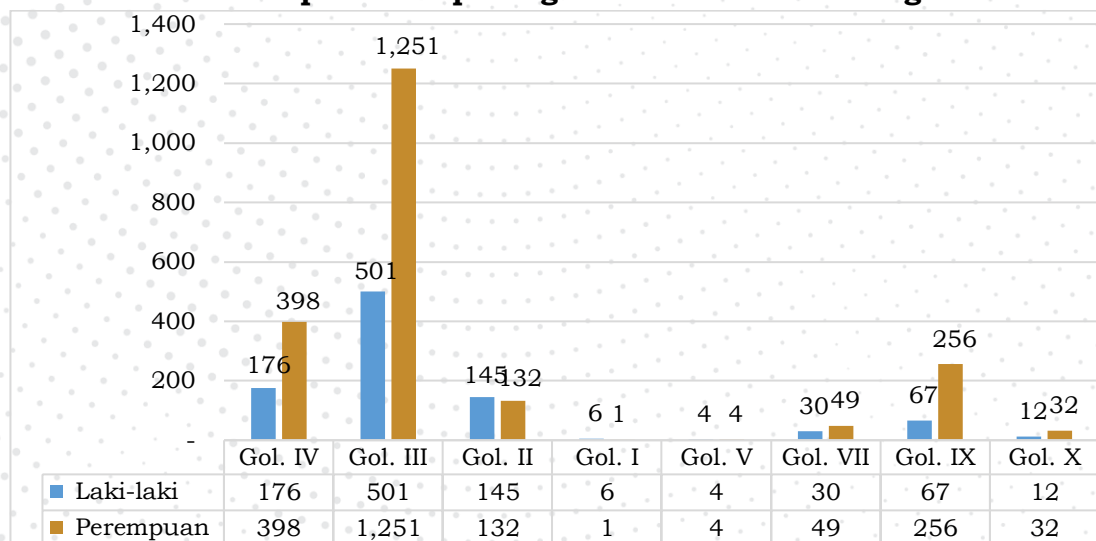
- Bagian Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh :
 - Bagian Perekonomian
 - Bagian PBJ dan Dalbang
 - Bagian Perencanaan dan Anggaran
- c. Asisten Administrasi Umum dibantu oleh :
 - Bagian Protokoler dan Dokumentasi
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Umum
- d. Staf Ahli terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :
 - a. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan
- 3. Inspektorat
- 4. Badan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. Badan Keuangan Daerah
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 6. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Dinas Perhubungan
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
 - f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - g. Dinas Koperasi dan UKM
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

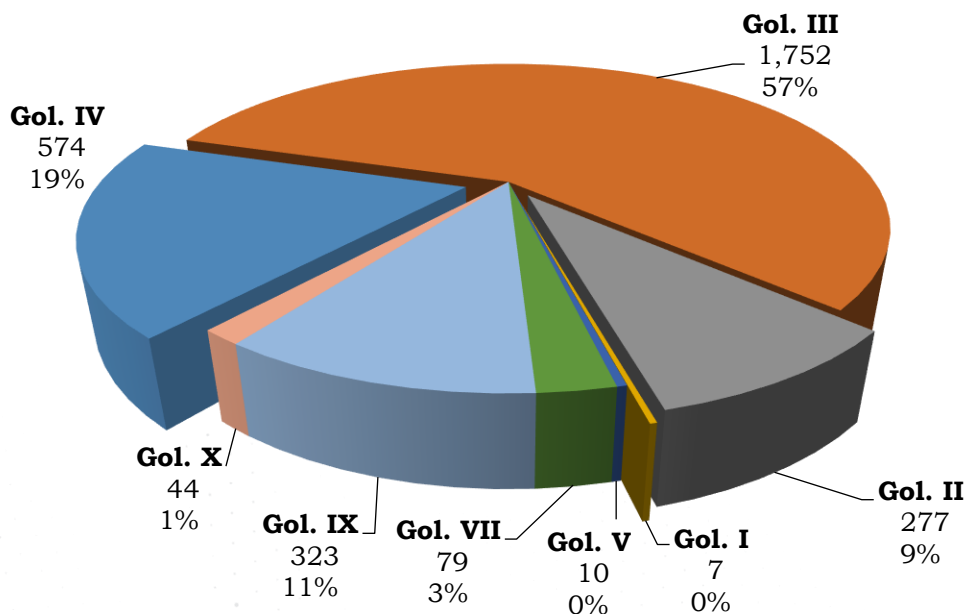
- i. Dinas Ketahanan Pangan
 - j. Dinas Pertanian
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Pendidikan
 - m. Dinas Kesehatan
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - q. Dinas Sosial
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8. 5 (lima) Kecamatan dan 47 Kelurahan terdiri dari :
- a. Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 17 kelurahan
 - b. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 9 kelurahan
 - c. Kecamatan Payakumbuh Timur 9 kelurahan
 - d. Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri 6 kelurahan
 - e. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori terdiri dari 6 kelurahan.

1.7 SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK pada Tahun **2024** berjumlah 3.066 orang, terdiri dari 2.123 orang perempuan dan 943 orang laki-laki, sebagaimana data grafis berikut ini :

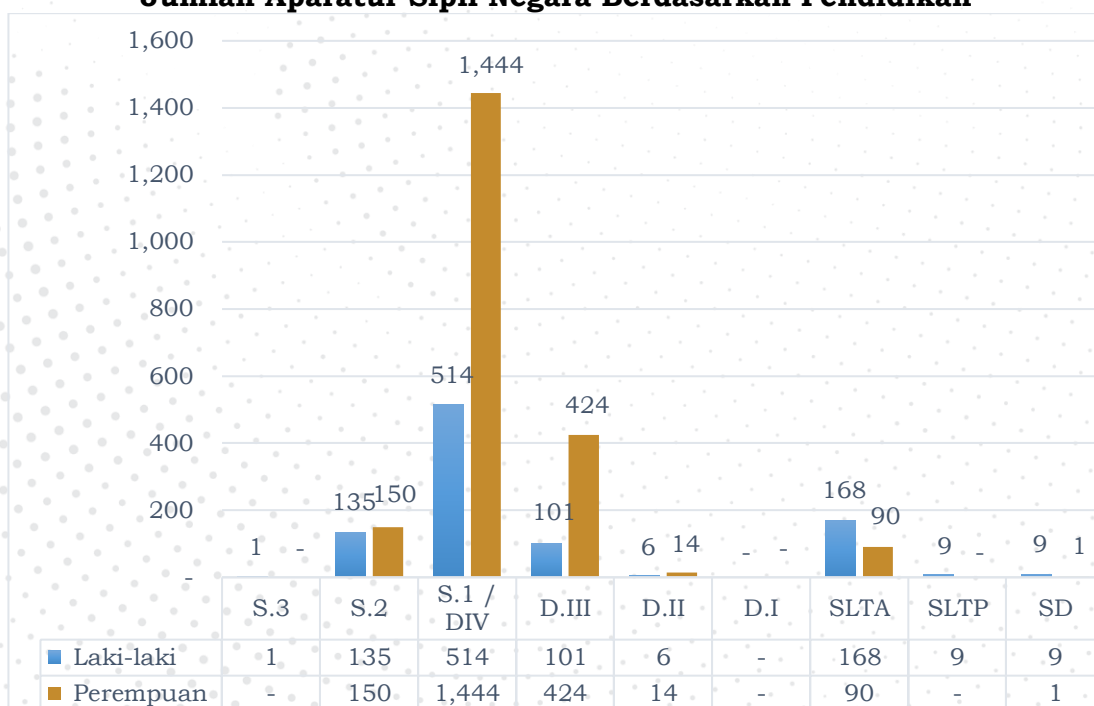
Grafik 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan





Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, Tahun 2024

Grafik 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan



Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, tahun 2024

1.8 TINJAUAN PEREKONOMIAN

Nilai PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 9.421,00 miliar rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini

mengalami peningkatan sebesar 0,439 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 8.982,35 miliar rupiah. Naik nilai PDRB ini dipengaruhi oleh sudah mulai Bergeraknya kegiatan produksi hampir diseluruh lapangan usaha dan inflasi yang rendah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 5.002,70 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 5.229,45 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan pada tahun 2023 Kota Payakumbuh mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh sudah mulai menggeliatnya aktifitas sosial dan ekonomi hampir diseluruh lapangan usaha.

a. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kota Payakumbuh didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha diantaranya : Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa keuangan dan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Payakumbuh.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu mencapai 25,02 persen (angka ini naik dari 24,54 persen tahun 2020), selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 13,64 persen (menurun dari 13,67 persen di tahun 2020), disusul lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,82 persen naik dari 11,72 persen di tahun 2020), berikut lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,50 persen (meningkat dari 8,25 persen di tahun 2020), dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan jasa keuangan dan asuransi masing-masing 7,24 persen dan 6,00 persen sementara itu peranan lapangan usaha lainnya masing-

masing kurang dari 5,56 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Distribusi Persentase PDRB Kota Payakumbuh
Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	6,44	6,08	5,89	5,71	5,56
2	Pertambangan & Penggalian	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49
3	Industri Pengolahan	4,86	5,03	4,92	4,83	4,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
6	Konstruksi	13,67	13,61	13,49	13,70	13,64
7	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda motor	24,53	24,04	25,12	25,10	25,02
8	Transportasi dan Pergudangan	11,72	11,87	11,85	12,16	11,82
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,03	3,15	3,35	3,38	3,49
10	Informasi dan Komunikasi	8,25	8,41	8,39	8,48	8,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,91	6,16	6,06	5,86	6,00
12	Real Estate	2,9	2,86	2,80	2,88	2,93
13	Jasa Perusahaan	0,24	0,23	0,22	0,23	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,58	7,77	7,20	7,00	7,24
15	Jasa Pendidikan	4,94	4,91	4,87	4,69	4,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,64	1,58	1,62	1,66
17	Jasa Lainnya	3,49	3,46	3,48	3,58	3,67
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Buku PDA Kota Payakumbuh Tahun 2025

Di antara enam lapangan usaha tersebut, Informasi dan komunikasi adalah kategori yang cenderung mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat.

Salah satu penyebab turunnya peranan pertanian, kehutanan dan perikanan adalah berkurangnya jumlah luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Transportasi dan

perdagangan mengalami penurunan karena semakin banyaknya Masyarakat memiliki fasilitas kendaraan pribadi.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah, laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahann jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi hampir diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi, nilai PDRB Kota Payakumbuh tahun 2024 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 5.229,45 milyar rupiah, nilai tersebut naik dari 5.002,70 milyar rupiah pada tahun 2023, hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53 persen, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya 4,70 persen.

Seperti pada tahun 2023, tahun 2024 pertumbuhan ekonomi positif dialami oleh hampir semua lapangan usaha bahkan beberapa lapangan usaha tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi secara umum dan ada juga lapangan usaha yang pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara umum.

Terdapat enam lapangan usaha/kategori yang mengalami pertumbuhan lebih dari 5 persen yaitu : Penyediaan akomodasi dan makan minuman sebesar 6,74 persen, Jasa keuangan dan Asuransi sebesar 7,06 persen, Real Estat sebesar 5,61 persen, Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,31 persen, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,38 persen dan Jasa lainnya sebesar 6,69 persen.

Sedangkan sebelas lapangan usaha/kategori lainnya yang pertumbuhannya kurang/dibawah dari 5 persen adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -0,03 persen, Pertambangan dan penggalian sebesar 1,86 persen, Industri Pengolahan sebesar 2,99

persen, Pengadaan listrik dan gas sebesar 4,39 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang sebesar 1,75 persen, Konstruksi sebesar 3,69 persen, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,49 persen, Transportasi dan pergudangan sebesar 4,11 persen, Informasi dan komunikasi sebesar 4,79 persen, Jasa perusahaan sebesar 4,82 persen, dan Jasa pendidikan sebesar 3,10 persen, sebagai dilihat pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,53	1,40	2,51	0,89	-0,03
2	Pertambangan dan Penggalian	(2,09)	4,04	4,60	2,91	1,86
3	Industri Pengolahan	(3,21)	2,66	2,13	2,72	2,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(6,22)	2,79	3,22	3,87	4,39
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(1,65)	3,32	6,21	3,05	1,75
6	Konstruksi	(5,95)	1,43	3,36	5,84	3,69
7	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	(1,00)	3,58	5,55	4,66	4,49
8	Transportasi dan Pergudangan	(9,40)	5,14	3,22	5,59	4,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(11,62)	7,29	15,10	6,96	6,74
10	Informasi dan Komunikasi	10,25	5,57	6,80	7,08	4,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,29	6,17	4,01	3,22	7,06
12	Real Estate	0,19	1,72	5,13	5,94	5,61
13	Jasa Perusahaan	(4,15)	1,02	6,70	6,50	4,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,48)	0,65	(1,06)	1,88	8,31
15	Jasa Pendidikan	6,22	3,64	5,30	1,66	3,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,87	5,59	4,40	6,85	5,38
17	Jasa Lainnya	(9,95)	4,19	8,09	7,32	6,69
Pertumbuhan PDRB		(1,65)	3,58	4,51	4,70	4,53

Sumber : Kota Payakumbuh dalam angka tahun 2025

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator Tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah / wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan factor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019 PDRB perkapita tercatat sebesar 50,34 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 64,21 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Rincian/Description	Satuan / Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousand	142,90	144,83	146,73
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,40	1,39	1,37
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	74,48	74,77	75,08
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² Labour Force Participation Rate-LFPR ²	%	70,49	71,86	70,53
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	5,16	4,84	4,87
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	ribu/thousand	8,08	7,88	7,62
Persentase Penduduk Miskin ³ Percentage of Poor People ³	%	5,66	5,44	5,19
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴ Human Development Index ⁴	—	79,53	80,14	80,76
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	milyar rupiah billion rupiahs	8.250,30	8.982,35*	9.421,00**
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	4,51	4,70*	4,53**
PDRB Per Kapita Harga Berlaku Per Capita of GRDP at Current Price	juta rupiah million rupiahs	57,73	62,02*	64,21**

Sumber : Kota Payakumbuh dalam angka tahun 2025

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematisa Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPD tahun 2023 – 2026, untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah rencana pelaksanaan tahap keempat (2021-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 Kota Payakumbuh yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global seperti yang dituangkan pada BAB IV RPD Kota Payakumbuh. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 diharapkan telah selaras dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

TUJUAN		SASARAN	
1	Terwujudnya Pembangunan manusia yang berkualitas	1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Gender
2	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
		5	Meningkatnya sektor strategis
		6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh
3	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
		8	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima
4	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.	9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan
		10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		11	Meningkatnya kualitas penataan kota
5	Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya	12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1	Angka harapan lama sekolah
		2	Rata-rata lama sekolah
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka usia harapan hidup
		4	Prevalensi Stunting
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Gender	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	6	Tingkat Kemiskinan
		7	Tingkat Pengangguran
5	Meningkatnya sektor strategis	8	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
		9	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.	11	Nilai Evaluasi AKIP Kota
		12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
8	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	13	Indeks SPBE
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15	Persentase Panjang jalan status kota dalam kondisi mantap

		16	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19	Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya
		20	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.
3. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
6. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	SKPD Penanggung jawab
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1	Angka harapan lama sekolah	14,30	Disdik/BPS
		2	Rata-rata lama sekolah	11,26	Disdik/BPS
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka usia harapan hidup	74,32	Bappeda/BPS
		4	Prevalensi Stunting	14,00	Dinkes/BPS
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Gender	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,51	DP3AP2KB/BPS
4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	6	Tingkat Kemiskinan	5,41	Bappeda/BPS
		7	Tingkat Pengangguran	5,81	Dinas Naker Perind/BPS
5	Meningkatnya sektor strategis	8	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,94	Disnaker Perind/BPS
		9	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,28	Diskop UKM/BPS
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	225	DPMPTSP
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.	11	Nilai Evaluasi AKIP Kota	A	Setdako
		12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	76	BKD
8	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	13	Indeks SPBE	2,70	Dinas Kominfo
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,50	Setdako

9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15	Persentase Panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	85,76	PUPR
		16	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	74,20	PUPR
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,26	Dinas Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,36	PUPR
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19	Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	100	Disparpora
		20	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	52,00	Disdik

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp801.754.372.153,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
≥ 91 %	Sangat Tinggi
76% – 90%	Tinggi
66% – 75%	Sedang
51% – 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,30	14,57	101,89	Sangat Tinggi
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,26	10,89	96,71	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,32	75,08	101,02	Sangat Tinggi
		Prevalensi stunting	Persentase	14,00	19,80	58,57	Rendah
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks / Nilai	72,51	71,09	98,04	Sangat Tinggi

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,41	5,19	104,07	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran	Persentase	5,81	4,87	116,18	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
5	Meningkatnya sektor strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	Persentase	2,94	2,99	101,70	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persentase	4,28	4,49	104,91	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	Milyar Rupiah	225,00	658,63	292,72	Sangat Tinggi

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Nilai/ Prediket	A	BB	95,00	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks / Nilai	76	71,76	94,42	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	Indeks / Nilai	2,70	3,75	138,89	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks / Nilai	88,50	88,37	99,85	Sangat Tinggi

Tujuan IV : Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	Persentase	85,76	85,82	100,07	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	Persentase	74,20	71,98	97,01	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks / Nilai	58,26	58,51	100,43	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase	80,36	80,36	100,00	Sangat Tinggi

Tujuan V : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	2024			Kategori
				Target	Realisasi	%	
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	Persentase	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	Persentase	52,00	92,31	177,51	Sangat Tinggi

3.1 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023-2026 maupun RKPD Tahun 2024. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama RPD 2023-2026, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Berdasarkan dokumen tersebut ditetapkan 12 (dua belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	2 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2 indikator
Sasaran 3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	1 indikator

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sasaran 1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	2 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya sektor strategis	2 indikator
Sasaran 3	Meningkatnya investasi	1 indikator

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 indikator
Sasaran 2	meningkatnya Pelayanan pulik yang prima	2 indikator

Tujuan IV : Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	2 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	1 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas penataan kota	1 indikator

Tujuan V : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

Sasaran 1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	2 indikator
-----------	---	-------------

Secara umum Pemerintah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-50	51,00-65,00	66,00-75,00	76,00-90,00	>91
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	2	99,30					
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	79,80					
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	1	98,04					

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-50	51,00-65,00	66,00-75,00	76,00-90,00	>91
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	2	110,12					
5	Meningkatnya sektor strategis	2	100,70					
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	1	292,72					

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-50	51,00-65,00	66,00-75,00	76,00-90,00	>91
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2	94,71					
	Meningkatnya Pelayanan pulik yang prima	2	119,37					

Tujuan IV : Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-50	51,00-65,00	66,00-75,00	76,00-90,00	>91
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	2	100,03					
8	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	1	100,45					
	Meningkatnya kualitas penataan kota	1	100,00					

Tujuan V : Meningkatnya tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-50	51,00-65,00	66,00-75,00	76,00-90,00	>91
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	2	138,76					

Tujuan 1 : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kota Payakumbuh antara lain adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di samping itu, peningkatan peran perempuan dengan program pemberdayaan dan perlindungan anak, sebagai unsur dari masyarakat yang berperan besar dalam menentukan masa depan bangsa.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan peningkatan kualitas pembangunan manusia pada suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan juga untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara masuk kedalam kelompok negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah.

Untuk menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 3.4
Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Mentawai	61,09	61,35	62,19	65,79	66,67
Kab. Pesisir selatan	69,90	70,03	70,84	72,24	72,87
Kab. Solok	69,08	69,24	70,02	71,92	72,29
Kab. Sijunjung	67,74	67,86	68,69	72,30	72,88
Kab. Tanah Datar	72,33	72,46	73,29	75,57	76,49
Kab. Padang Pariaman	70,61	70,76	71,63	74,54	74,90
Kab. Agam	72,46	72,57	73,29	74,44	75,08
Kab. Lima Puluh Kota	69,47	69,68	70,28	72,05	72,51
Kab. Pasaman	66,64	66,77	67,41	69,85	70,61
Kab. Solok selatan	69,04	69,23	69,71	72,24	73,17

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Dharmasraya	71,51	71,76	72,30	73,87	74,82
Kab. Pasaman Barat	68,49	68,76	69,57	72,03	72,78
Kota Padang	82,82	82,90	83,29	83,98	84,38
Kota Solok	78,29	78,41	79,23	79,66	80,06
Kota Sawahlunto	72,64	72,88	73,73	75,91	76,68
Kota Padang Panjang	77,93	77,97	78,78	79,76	80,60
Kota Bukittinggi	80,58	80,70	81,42	81,88	82,61
Kota Payakumbuh	78,90	79,08	79,53	80,14	80,76
Kota Pariaman	77,07	77,65	77,65	79,76	80,49
SUMBAR	72,65	73,26	73,26	75,64	76,43
INDONESIA	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan Tabel 3.4, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Payakumbuh lebih tinggi dari rata-rata provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh 80,76 sedangkan rata-rata provinsi 76,43 dan Indonesia 75,02. Pada Tahun 2024 untuk tingkat provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menempati posisi ketiga setelah Kota Padang (84,38) dan Kota Bukittinggi (82,61).

Untuk capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Indeks pembangunan Manusia (IPM)	80,14	80,41	80,76	100,43	Sangat Tinggi	81,22	98,67

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa realisasi IPM Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar 80,76 dari nilai yang ditargetkan sebesar 80,41 atau tercapai sebesar 100,43% dengan kategori sangat tinggi. Capaian pada tahun 2024 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2024 adalah sebesar 98,67%.

Pada tujuan 1 (satu) dalam dokumen perencanaan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, yaitu terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk masing-masing sasaran memiliki indikator kinerja, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Sasaran dan Indikator Tujuan 1 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
	Tujuan I : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,41	
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,30	
		Rata-rata Lama Sekolah	11,26	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan hidup	74,32	
		Prevalensi Stunting	14,00	
3.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,51	

Sumber : RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing- masing sasaran dan indikator sasaran pada Tujuan 1 ini diuraikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Data Capaian Indikator Sasaran Tujuan 1 Tahun 2024

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,30	14,30	14,57	101,89	Sangat Tinggi	14,32	101,75
2	Rata-rata Lama Sekolah	10,88	11,26	10,89	96,71	Sangat Tinggi	11,51	94,61

3	Angka Usia Harapan Hidup	74,77	74,32	75,08	101,02	Sangat Tinggi	74,61	100,63
4	Prevalensi Stunting	19,8	14,00	19,8	58,57	Rendah	12,00	35,00
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,21	72,51	71,09	98,04	Sangat Tinggi	73,51	96,87

Sumber : BPS, Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB Kota Payakumbuh Tahun 2024

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing. Untuk mencapai sasaran tersebut, menjadi salah satu sasaran dalam rangka terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas. Tolak ukur atau indikator sasaran yang digunakan adalah dari aspek pendidikan, adalah angka harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.8

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,30	14,30	14,57	101,89	Sangat Tinggi	14,32	101,75
2	Rata-rata Lama sekolah	10,88	11,26	10,89	96,71	Sangat Tinggi	11,51	94,61

Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa indikator angka harapan lama sekolah, realisasi tahun 2024 Kota Payakumbuh sebesar 14,57 dari nilai yang ditargetkan 14,30 dengan kategori sangat tinggi yaitu 101,89%. Capaian pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 14,30 atau naik 0,27 poin dari tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2024 adalah sebesar 101,75%.

Sedangkan untuk indikator rata-rata lama sekolah, realisasi tahun 2024 Kota Payakumbuh sebesar 10,89 dari nilai yang ditargetkan 11,26 dengan kategori sangat tinggi yaitu 96.71% Capaian pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10,88 atau naik 0,01 poin dari tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2023 adalah sebesar 94,61%.

a. Indikator Sasaran Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Tabel 3.9
Harapan Lama Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2020 sd 2024

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	12.82	12.89	12.89	12.90	12.91
Kab. Pesisir Selatan	13.32	13.33	13.35	13.36	13.37
Kab. Solok	13.04	13.05	13.30	13.55	13.56
Kab. Sijunjung	12.37	12.38	12.64	12.72	12.76
Kab. Tanah Datar	14.33	14.34	14.59	14.78	15.05
Kab. Padang Pariaman	13.67	13.68	13.93	14.19	14.20
Kab. Agam	13.87	13.88	13.88	13.89	14.16
Kab. Lima Puluh Kota	13.29	13.30	13.40	13.41	13.42
Kab. Pasaman	12.80	12.81	13.05	13.25	13.42
Kab. Solok Selatan	12.71	12.72	12.73	12.80	13.07
Kab. Dharmasraya	12.43	12.44	12.51	12.68	12.89
Kab. Pasaman Barat	13.61	13.68	13.69	13.70	13.72
Kota Padang	16.52	16.53	16.54	16.56	16.57
Kota Solok	14.32	14.33	14.34	14.36	14.37
Kota Sawahlunto	13.17	13.18	13.42	13.69	13.86
Kota Padang Panjang	15.06	15.07	15.07	15.29	15.47
Kota Bukittinggi	14.97	14.98	14.99	15.01	15.28
Kota Payakumbuh	14.26	14.27	14.29	14.30	14.57
Kota Pariaman	14.54	14.55	14.61	14.79	14.80
Provinsi Sumatera Barat	14.02	14.09	14.10	14.11	14,30
Indonesia	12.98	13.08	13.1	13.15	13.21

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Tahun 2025

Jika dilihat dari tabel 3.9, untuk harapan lama sekolah Kota Payakumbuh di Tahun 2024 sebesar 14,57. Jika dibandingkan dari 7 Kota di

Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menduduki urutan ke 4 (empat), dengan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan provinsi ataupun nasional. Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah, di tahun 2024 dengan lama 14.57 tahun, atau setara dengan diploma (DII). Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

b. Indikator Sasaran Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Jika dilihat dari tabel 3.10, untuk Kota Payakumbuh di tahun 2024 rata-rata lama sekolah 10,89 tahun, di atas rata-rata provinsi ataupun nasional. Jika dibandingkan dari kota lain di Sumatera Barat Kota Payakumbuh menduduki posisi ke 6 dari 7 Kota di Sumatera Barat.

Tabel 3.10
Rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat Tahun 2020 sd 2024

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	7.09	7.20	7.48	7.76	8.03
Kab. Pesisir Selatan	8.26	8.27	8.43	8.58	8.81
Kab. Solok	7.86	7.87	7.89	7.90	7.91
Kab. Sijunjung	8.11	8.12	8.30	8.57	8.62
Kab. Tanah Datar	8.61	8.62	8.90	9.02	9.29
Kab. Padang Pariaman	7.87	7.88	8.16	8.41	8.42
Kab. Agam	8.96	8.97	8.98	9.22	9.23
Kab. Lima Puluh Kota	7.99	8.07	8.08	8.12	8.13
Kab. Pasaman	8.09	8.10	8.11	8.13	8.14
Kab. Solok Selatan	8.28	8.32	8.41	8.69	8.85
Kab. Dharmasraya	8.47	8.55	8.56	8.71	8.98
Kab. Pasaman Barat	8.19	8.27	8.55	8.81	8.99
Kota Padang	11.58	11.59	11.60	11.62	11.63

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Solok	11.03	11.04	11.35	11.36	11.37
Kota Sawahlunto	10.17	10.32	10.43	10.44	10.53
Kota Padang Panjang	11.62	11.63	11.92	11.94	12.00
Kota Bukittinggi	11.33	11.34	11.63	11.64	11.65
Kota Payakumbuh	10.73	10.81	10.82	10.88	10.89
Kota Pariaman	10.59	10.67	10.78	10.79	11.06
Provinsi Sumatera Barat	8.99	9.07	9.18	9.28	9.44
Indonesia	8.48	8.54	8.69	8.77	9.22

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Tahun 2025

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena pada akhirnya dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.

Pendidikan di Kota Payakumbuh tidak hanya berbicara tentang terciptanya sarana, prasarana, ataupun tenaga pengajar saja. Lebih dari itu, mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya harus ditanamkan ke pelajar di Kota Payakumbuh. Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Payakumbuh saat ini sudah setingkat SMA, yaitu 10,89 tahun.

Angka ini dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Misalnya meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, dan sebagainya.

Tabel 3.11
Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2024

Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan		Akreditasi			
		A	B	C	TT
Sekolah TK /PAUD Negeri	5	4	1	-	0
Sekolah SDN/MIN	67	56	11	-	0
Sekolah SMPN/MTSN	12	10	2	-	0
Sekolah TK /PAUD Swasta	134	18	75	40	1
Sekolah SD/MI Swasta	20	7	4	1	8
Sekolah SMP/MTS Swasta	13	5	3	5	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2024

Dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa jumlah sekolah di Kota Payakumbuh sebanyak 246 sekolah, dengan jumlah TK/PAUD sebanyak 139 sekolah. SD/MIN sebanyak 87 sekolah, SMP/MTSN sebanyak 25 sekolah.

Apabila kita melihat sebaran sekolah yang ada di Kota Payakumbuh menurut tingkat pendidikan sudah cukup merata di setiap kecamatan. Hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah. Hal ini dapat menjadi daya ungkit dalam rangka meningkatkan angka Rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.12
Jumlah Kelas, Rombel, Murid dan Rata-rata per Kelas menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kelas	Rombel	Murid	Rata-rata Murid per Kelas
1	Taman Kanak-kanak/RA	244	232	3.136	13
	Negeri	12	15	252	21
	Swasta	232	217	2.884	12
2	Sekolah Dasar/MI	1.247	768	16.943	14
	Negeri	903	537	11.641	13
	Swasta	344	231	5.302	15
3	SMP/MTs	638	433	10.706	17
	Negeri	294	250	7.735	26
	Swasta	344	183	2.971	9
4	SMA/SMK/MA	448	502	15.064	34
	Negeri	324	396	12.684	39
	Swasta	124	106	2.380	19

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel 3.12, untuk rata-rata murid per kelas pada tingkat Taman Kanak-kanak/RA sebanyak 13 murid per kelas, tingkat SD/MI sebanyak 14 murid per kelas, tingkat SMP/MTs sebanyak 17 Murid per kelas dan tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 34 murid per kelas. Apabila melihat hal tersebut, untuk tingkat kenyamanan murid dalam menerima pembelajaran di sekolah dapat disebut layak. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.13
Rasio Guru dan Murid menurut
Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Murid	Guru	Rasio
1	Taman Kanak-kanak/RA	3.136	323	10
	Negeri	252	20	13
	Swasta	2.884	303	10
2	Sekolah Dasar/MI	16.943	1.086	15
	Negeri	11.641	776	15
	Swasta	5.302	310	17
3	SMP/MTs	10.706	682	16
	Negeri	7.735	449	17
	Swasta	2.971	233	13
4	SMA/SMK/MA	15.064	864	18
	Negeri	12.684	711	18
	Swasta	2.380	153	16

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel diatas, untuk rasio guru dan murid tingkat Taman Kanak-kanak/RA sebesar 1:10, tingkat SD/MI 1:15, tingkat SMP/MTs sebesar 1:16 dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 1:18. Hal ini menggambarkan bahwa secara kuantitas jumlah guru yang tersebar di sekolah cukup untuk melayani murid yang ada di sekolah Kota Payakumbuh.

Strategi untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar). Strategi ini dengan arah kebijakan
 - a. Pemberian bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar/Kartu Indonesia Pintar
 - b. Penguatan digitalisasi sekolah
 - c. Penyediaan sarana pendidikan (TIK)

- d. Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum
- e. Sekolah penggerak dan guru penggerak
- 2. Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan, strategi ini dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT
 - b. Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat
- 3. Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga strategi ini dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Peningkatan pembibitan atlet dan pembinaan olahraga prestasi
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Program yang mendukung untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing :

- 1. Program pengelolaan pendidikan
- 2. Program pengembangan kurikulum
- 3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
- 4. Program pengendalian perijinan pendidikan
- 5. Program pembinaan perpustakaan
- 6. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
- 7. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- 8. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
- 9. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” menjadi salah satu sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Tolak ukur atau indikator sasaran yang digunakan adalah “Angka Usia Harapan Hidup” dan “Prevalensi Stunting”.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Angka Usia Harapan Hidup	74,77	74,32	75,08	101,02	Sangat Tinggi	74,61	100,63
2	Prevalensi Stunting	19,8	14,00	19,80	58,57	Rendah	12,00	35,00

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kota Payakumbuh 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar 75,08 dari nilai yang ditargetkan sebesar 74,32 atau tercapai sebesar 101,02% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian pada tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 74,77 atau naik 0,31 poin dari tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2024 adalah sebesar 100,63%. Sementara untuk realisasi Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar dari nilai yang ditargetkan sebesar 14 atau tercapai sebesar 58,57% dengan kategori Rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2024 adalah sebesar 35,00.

a. Indikator Sasaran Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup dalam 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2020 - 2024

No	Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
	Kesehatan					
1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,74	74,18	74,48	74,77	75,08

Sumber : BPS Kota Payakumbuh Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh sebesar 75,08 tahun lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 74,77 tahun.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Angka Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah. Umur yang panjang ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari faktor mendasar seperti jenis kelamin, ras, kondisi medis seseorang, dan riwayat kesehatan keluarga, hingga ditentukan oleh lingkungan, keadaan sosial dan psikis, juga ekonomi.

Faktor-faktor seperti lingkungan, sosial-ekonomi, dan demografi lah yang membuat suatu populasi penduduk di suatu negara dapat hidup lebih lama dibandingkan populasi di negara lain, hal itu tercermin dari suatu penghitungan statistika bernama Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy*) yang biasa diukur dalam satu negara dan dibandingkan dengan negara lain.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan

lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya usia harapan hidup juga membuat jumlah orang lanjut usia (lansia) semakin banyak. Hal ini bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Bertambahnya jumlah lansia bisa berdampak positif jika lansia dalam keadaan sehat. Namun jika dalam keadaan sakit, maka potensi kerugian negara dari pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan meningkat. Jumlah kepesertaan JKN Kota Payakumbuh tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.16
Jumlah Kepesertaan JKN Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2024

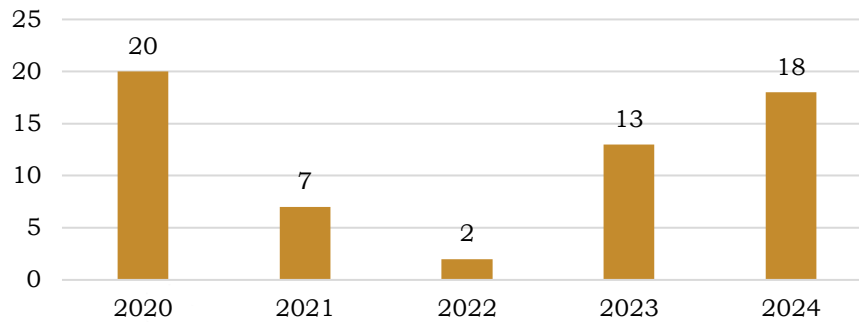
No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepesertaan JKN	Persentase
1	2020	139.576	124.128	88,93
2	2021	141.171	129.584	91,80
3	2022	143.283	137.077	95,66
4	2023	143.610	142.429	99,05
5	2024	146.963	145.255	98,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Kepesertaan JKN ini terdiri dari Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari dua kepesertaan yaitu kepesertaan yang dibiayai dengan APBN dan kepesertaan yang dibiayai oleh APBD dan non Penerima bantuan iuran yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan Pekerja Mandiri. Terjadi penurunan persentase kepesertaan JKN pada tahun 2024 hingga mencapai 98,77%. Kepesertaan ini meningkat karena di Kota Payakumbuh selalu dilakukan validasi dan pengusulan kepesertaan setiap bulannya melalui Dinas Sosial, yang kemudian di teruskan melalui Dinas Kesehatan untuk masuk dalam program Jaminan Kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target Universal Health Coverage (UHC) di Kota Payakumbuh.

Salah satu indikator utama kesehatan daerah yang juga menjadi bahan analisis dalam menilai perkembangan kesehatan di suatu daerah adalah Indikator Angka Kematian Bayi. Indikator ini merupakan indikator yang amat penting dalam menilai status kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Terkait dengan indikator ini di Kota Payakumbuh, dapat digambarkan sebagaimana Grafik 3.1.

Grafik. 3.1
Kasus Kematian Bayi Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

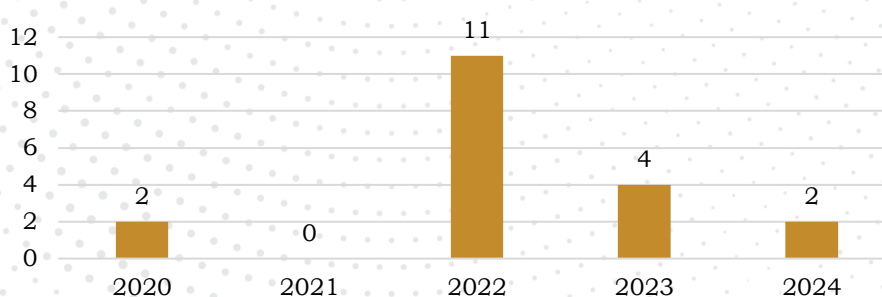


Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024.

Perkembangan indikator Angka Kematian Bayi di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi. Ada beberapa faktor penentu yang menyebabkan terjadinya kematian bayi yang sebagian besar terjadi karena faktor penjaagaan kondisi tubuh ibu hamil pada masa kehamilan. Hal ini terpengaruh juga akibat proses rujukan yang masih perlu dibenahi mulai dari tingkat keluarga yang terlambat memeriksakan secara dini ke pusat layanan kesehatan, kondisi cacat bawaan pada bayi, seperti kelainan pernafasan dan jantung, dan perawatan ibu semasa kehamilan serta kondisi gizi ibu hamil sehingga menyebabkan berat badan lahir rendah yang rentan terhadap resiko kematian bayi pasca persalinan.

Selanjutnya dengan indikator lain yang juga sangat penting, yakni Angka Kematian Ibu Melahirkan. Untuk indikator ini dapat dijabarkan untuk tingkat Kabupaten/Kota berupa Kasus Kematian Ibu melahirkan (angka absolut), Gambaran perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir tergambar pada grafik 3.2.

Grafik. 3.2
Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2020 – 2024



Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024.

Kasus kematian Ibu melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Setiap kasus kematian ibu selalu dilaksanakan Autopsi Verbal. Tahun 2020 - 2024 kasus kematian ibu melahirkan umumnya disebabkan karena eklamsia (tekanan darah tinggi) selama proses persalinan dan komplikasi infeksi (TBC). Pada tahun 2022 ada 11 kasus dan Tahun 2023 ada 4 kasus dan pada Tahun 2024 terdapat 2 kasus. Dalam rangka penurunan kasus kematian Ibu melahirkan ini perlu ditingkatkan lagi kemampuan dalam pelayanan *Antenatal Care* (ANC) yang berkualitas sebab kasus-kasus kematian Ibu dapat dideteksi dari resiko tinggi kehamilannya sejak dini melalui ANC.

Usia Harapan Hidup juga berhubungan dengan fasilitas kesehatan dan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Tahun 2024, sarana kesehatan yang ada di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Sarana Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Jenis	Jumlah
1	Rumah Sakit	1
2	Puskesmas	8
3	Balai Pengobatan	-
4	Klinik Bersalin	2
5	Puskesmas Pembantu	23
6	Poskeskel	15
7	Puskesmas Keliling	8
8	Posbindu	78
9	Posyandu	171
10	Dokter Praktek	69
11	Bidan Praktek	21

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024



Gambar 3.1.
**Puskesmas Padang Karambia di Kecamatan Payakumbuh Selatan,
Kota Payakumbuh**

Sementara untuk Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Sumber Daya Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024

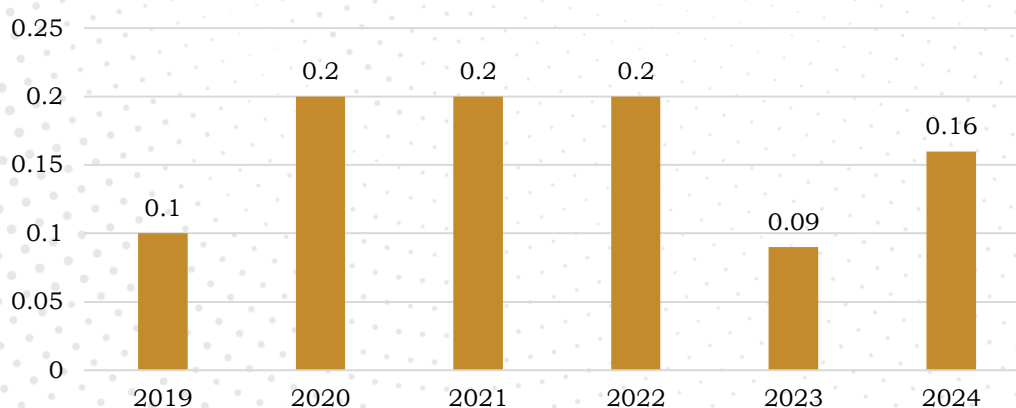
No	Jenis	Jumlah
1	Struktural	26
2	Non Struktural	63
3	Dokter Spesialis	30
4	Dokter Umum	36
5	Dokter Gigi	15
6	Apoteker	14
7	Sarjana Kesehatan Masyarakat	11
8	Sarjana Keperawatan	76
9	Sarjana Non Kesehatan	-
10	Bidan	123
11	Perawat	98
12	Terapis Gigi dan Mulut	20
13	Asisten Apoteker	25
14	Rekam Medis	24
15	Nutrisionis	12
16	Analisis Laboratorium	25
17	Sanitasi lingkungan	11
18	Refraksionis	3

19	Promosi Kesehatan	8
20	Administrator kesehatan	7
21	Radiologi	7
22	Fisioterapi	4
23	Epidemiolog Kesehatan	1
24	Asisten Penata Anestesi	5
25	Penata Anestesi	3
26	Tenaga Keamanan	-
27	Tenaga Kebersihan	-
	Jumlah	647

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Status gizi balita juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persentase prevalensi balita kekurangan gizi merupakan cakupan balita Bawah Garis Merah (BGM) yang diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita yang memiliki berat badan dibawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS) dibagi dengan jumlah rata-rata balita yang ditimbang di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Grafik. 3.3
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh
Tahun 2019 – 2024



Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Definisi Operasional Balita Kekurangan Gizi adalah gabungan antara presentase Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang yang diperoleh dari hasil kegiatan Pemantauan Status Gizi Balita (PSG). PSG ini dilakukan dengan

cara penimbangan massal pada balita di setiap posyandu dengan cakupan balita ditimbang (D/S) minimal 80%.

Pada tahun 2020 s.d 2023 presentase Balita Gizi Buruk stagnan pada angka 0,2%, namun secara umum prevalensi balita kekurangan gizi di Kota Payakumbuh periode 2019-2023 tidak mengkhawatirkan dan semakin membaik, karena dari pencapaiannya masih jauh di bawah standar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (<15,0%). Walaupun angka kekurangan gizi pada balita masih dibawah SPM harus tetap diwaspadai karena kasus-kasus balita kekurangan ini dapat memicu terjadinya Kurang Energi Protein (KEP) pada Balita yang menyebabkan Marasmus atau Kwashiorkor.

Usia harapan hidup terus membaik bagi sebagian besar orang Indonesia, namun sejumlah penyakit masih menjadi penyebab tingginya angka kematian dini di Indonesia. Berikut perkembangan 10 penyakit terbanyak di Kota Payakumbuh selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.19
Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2020 – 2024

Jenis Diagnosis Penyakit	Jumlah Kunjungan				
	2020	2021	2022	2023	2024
ISPA	9.393(2)	6.357 (2)	11.805 (2)	9.035 (2)	16.212 (2)
Hipertensi primer	9.761(1)	12.934(1)	11.360(1)	12.312(1)	16.884 (1)
Penyakit pulpa dan jar. Perifikal	1.754(6)	1.410(5)	1.791(7)	2.473(5)	3.921 (6)
Nasofaringitis akut (Common Cold)	-	1.391(6)	-	-	5.208 (4)
Diabetes	4.512(3)	4.755(3)	3.826(3)	3.900(3)	4.137 (5)
Gasteritis	2.917(4)	-	2006 (6)	1708 (7)	1.615 (7)
Dispepsia	619(9)	-	1605(8)	1998(6)	6.069 (3)
Dermatitis	2.168(5)	1.290(8)	1409(9)	1321(10)	459 (10)
Vulnus	1606(7)	2.070(4)	3.137(4)	3.146(4)	-
Febris	573(10)	1.270(7)	1.290(10)	1665(8)	775 (8)
Gout Artritis	1148(8)	-	-	-	-
Gastoenteritis	-	-	2.701(5)	1.584(9)	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Dari Tabel 3.19 dapat terlihat dalam lima tahun terakhir jenis penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Payakumbuh untuk rangking pertama dan kedua adalah penyakit Hipertensi dan ISPA. Hipertensi dan

ISPA atau Inveksi Saluran Pernapasan Atas biasanya terkait dengan pola hidup yang ada ditengah masyarakat itu sendiri, karena kedua jenis penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan. Hipertensi terkait dengan pola hidup baik makan maupun aktifitas fisik dalam kehidupan, sementara ISPA terkait pada kualitas udara yang ada disekitar pasien bisa saja disebabkan karena asap rokok atau pembakaran sampah yang menyebabkan penurunan mutu udara.

b. Indikator Prevalensi Stunting

Penanganan stunting perlu menjadi salah satu prioritas. Langkah langkah yg telah dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting dari jumlah angka stunting di bln desember 2023 sebanyak 196 terjadi penurunan sampai bulan November 2024 menjadi 195 (0.51%). Kegiatan yg dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting ini adalah:

1. Memberikan edukasi mulai dari rematri dan pemberian TTD .
2. Edukasi catin yg berkunjung ke puskesmas dengan melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Melakukan pemeriksaan bumil paling kurang 6 kali selama hamil dan dua kali pemeriksaan oleh dokter mll USG.
4. Melakukan pemeriksaan dan pendampingan oleh dokter SPA dan SPOG ke fasyankes.
5. Melakukan Pemberian Makanan Tambahan pangan lokal melalui posyandu sasaran bayi, balita dan ibu hamil.
6. Memberikan Makanan Tambahan lokal pada bayi balita gizi kurang.
7. Pemberian makanan tambahan seluruh posyandu dan ibu hamil.
8. Memberikan susu khusus kepada bayi/balita gizi buruk
9. Melakukan rujukan kasus balita stunting ke rumah sakit.
10. Melakukan tata laksana gizi buruk.
11. Melakukan Surveyland terhadap balita gizi buruk dan stunting.
12. Mengaktifkan kembali kelas ibu hamil dan kelas ibu balita.
13. Meningkatkan kapasitas petugas dan kader dalam PMBA melalui sosialisasi.

Sementara itu untuk Langkah pencegahan dan penanggulangan stunting yang dilakukan pada Balita adalah:

1. Pemberian Makanan Tambahan Berbasis bahan Pangan Lokal kepada semua kelompok sasaran pendek dan sangat pendek, serta ibu hamil beresiko stunting.
2. Bantuan yang diberikan berupa telur ,kacang hijau dan gula pasir.
3. Melakukan pemantauan dan edukasi kepada kelompok sasaran melalui kunjungan rumah
4. Melakukan rujukan kasus balita stunting yang mempunyai riwayat penyakit penyerta.
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada semua balita stunting yang ada yang dilakukan oleh dokter puskesmas dengan melakukan kunjungan rumah dan pemeriksaan lanjutan ke Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan
6. Edukasi gizi seimbang kepada ibu sasaran.
7. Pembentukan pos gizi kelurahan.

Tabel 3.20
Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2021 - 2024

No	Dimensi	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Stunting	20	17,8	19,8	19,8

Sumber : Laporan SKI 2023 Dalam Angka

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat peningkatan prevelensi stunting dari tahun 2023 dari tahun 2022 sebanyak 2% dari 17.8 menjadi 19,8. Sedangkan pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 karena data belum rilis yang mengidentifikasi bahwa jumlah balita yang mengalami stunting mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2024 tetap. Perlu menjadi perhatian untuk penanggulangan kasus stunting agar tidak terjadi peningkatan lagi.

Strategi untuk mewujudkan sasaran meningkatnya derajat kesehatan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan Masyarakat, dengan arah kebijakannya adalah:

- a. Peningkatan pelayanan dan rujukan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - b. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat Masyarakat
 - c. Peningkatan cakupan jaminan Kesehatan dan kemandirian Masyarakat dalam penjaminan Kesehatan
 - d. Peningkatan standar layanan kesehatan Masyarakat
2. Menurunkan prevalensi stunting, dengan arah kebijakannya adalah:
- a. Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan keluarga
 - b. Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran
 - c. Pemberdayaan KWT (kelompok Wanita Tani) untuk mengembangkkn potensi lahan pekarangan
 - d. Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi

Program yang mendukung untuk pencapaian sasaran meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat adalah :

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
2. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
3. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
4. Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program yang mendukung untuk pencapaian sasaran menurunkan prevalensi stunting adalah

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
2. Program pembinaan keluarga berencana
3. Program pengendalian penduduk
4. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
5. Program perlindungan dan jaminan sosial
8. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
9. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
10. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin kedudukan warga negara dimata hukum dan pemerintahan yang non diskriminasi, untuk seluruh rakyat Indonesia baik laki-laki maupun Perempuan.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* sejak 29 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Dalam dokumen kesepakatan global tentang *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) , yang terdiri dari 17 Tujuan (*Goal*) dan 169 sasaran (target). Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan, untuk : Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan.

Tujuan 5 SDGs tentang Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 5 target yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan
3. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan
4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi.

Visi dari ke 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender yang tengah berjalan di Indonesia.

Isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- c. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan maka diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Untuk mengevaluasi sejauh mana prioritas pembangunan sudah responsif gender

dan mendukung pengarusutamaan gender dapat dilihat dari analisa terhadap data terpilah gender. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran nyata tentang besar kecilnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah satunya adalah dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang masing-masing diukur melalui indikator-indikator seperti partisipasi dan kepemimpinan politik, partisipasi dan kepemimpinan ekonomi, dan penguasaan sumber daya ekonomi, yang masing-masing diukur melalui indikator-indikator seperti keterlibatan perempuan dalam parlemen, posisi profesional dan manajerial, serta sumbangan pendapatan perempuan yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel 3.21
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dimensi	Indikator
1. Partisipasi dan Kepemimpinan Politik:	
a. Keterlibatan perempuan dalam parlemen	Persentase perempuan yang menjabat sebagai anggota parlemen atau lembaga legislatif lainnya
b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	Persentase perempuan yang menduduki posisi penting dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, dan organisasi non-pemerintah
2. Partisipasi dan Kepemimpinan Ekonomi	
a. Posisi profesional dan manajerial	Persentase perempuan yang menduduki posisi profesional dan manajerial di berbagai sektor ekonomi
b. Sumbangan pendapatan perempuan	Proporsi pendapatan yang diperoleh perempuan dibandingkan dengan pendapatan laki-laki.
3. Penguasaan Sumber Daya Ekonomi	
a. Akses terhadap sumber daya ekonomi	Indikator ini mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah, kredit, dan aset lainnya.
b. Kemampuan ekonomi perempuan	Indikator ini mengukur kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dan bersaing secara ekonomi.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2025

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender tahun 2024 tersaji pada Tabel berikut ini

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,09	72,51	71,09	98,04	Sangat Tinggi	73,51	96,71

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2024 dan RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026

Berdasarkan Tabel 3.20 dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar 71,09 dari nilai yang ditargetkan sebesar 72,51 atau tercapai sebesar 98,04 % dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2024 adalah sebesar 96,71%.

Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan Perempuan di kota Payakumbuh dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Peningkatan angka ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender menuju ke arah yang lebih baik. Namun, kebijakan terkait gender yang telah diterapkan diharapkan tidak hanya mampu berdampak di kota Payakumbuh, tetapi juga mampu menekan perbedaan capaian antar wilayah provinsi Sumatera Barat dan Indonesia.

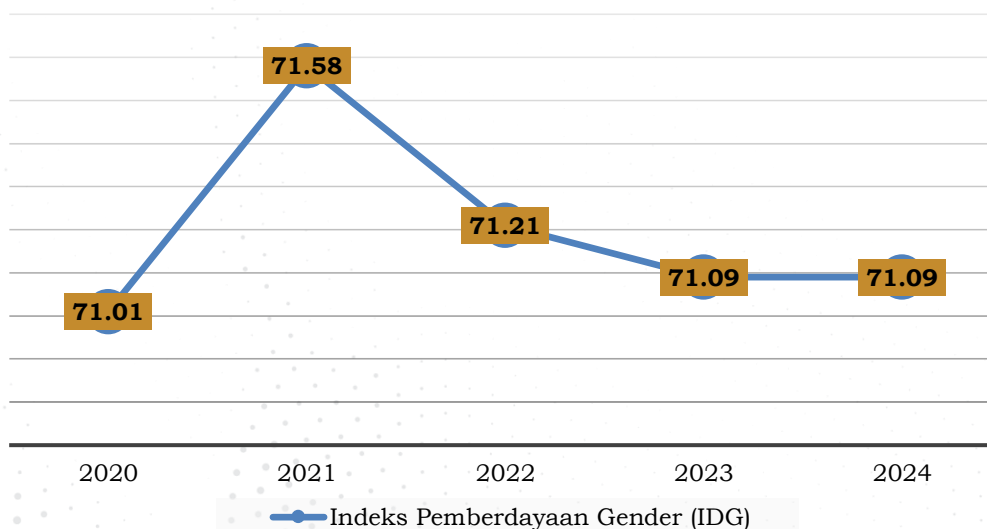
Kualitas sumberdaya manusia, karakteristik sosial, budaya, keadaan geografi dan masih banyak hal yang berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan gender setiap wilayah. Berikut bisa dilihat perkembangan indeks pemberdayaan gender di Kota Payakumbuh tahun 2020-2024. Data realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023 karena data realisasi tahun 2024 belum dirilis.

Tabel 3.23
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Payakumbuh
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,01	71,58	71,21	71,09	71,09

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, 2024

Grafik 3.4
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender
di Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Payakumbuh 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, skor IDG Kota Payakumbuh mencapai 71,01 naik menjadi 71,58 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 turun menjadi 71,21 dan 71,09. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang artinya peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di kota Payakumbuh menurun. Penurunan IDG terjadi karena penurunan pada indikator pembentuknya, yaitu penurunan pada peran perempuan dalam dunia profesional.

Capaian IDG Kota Payakumbuh pada tahun 2024 sebesar 71,09 di atas capaian provinsi Sumatera Barat sebesar 65,34. Dibandingkan Kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat, capaian IDG Kota Payakumbuh menempati posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.24
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi
Sumatera Barat tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Kepulauan Mentawai	48.13	47.36	47.81	48,50	48,50
2	Kab. Pesisir Selatan	56.93	53.39	56.50	53,79	53,79
3	Kab. Solok	62.23	61.57	57.85	59,38	59,38
4	Kab. Sijunjung	59.93	60.46	59.43	61,72	61,72
5	Kab. Tanah Datar	58.46	59.70	58.83	59,46	59,46
6	Kab. Padang Pariaman	48.79	46.64	47.01	47,79	47,79
7	Kab. Agam	63.06	63.07	64.45	64,43	64,43
8	Kab. Lima Puluh Kota	51.09	50.59	48.40	49,4	49,4
9	Kab. Pasaman	61.57	62.74	62.96	61,01	61,01
10	Kab. Solok Selatan	49.19	47.86	48.04	48,7	48,70
11	Kab. Dharmasraya	50.87	50.66	51.33	51,83	51,83
12	Kab. Pasaman Barat	60.16	60.38	61.05	61,04	61,04
13	Kota Padang	67.53	65.33	67.99	68,27	68,27
14	Kota Solok	57.46	63.09	63.61	64,23	64,23
15	Kota Sawahlunto	65.87	65.48	65.62	62,55	62,55
16	Kota Padang Panjang	65.24	66.62	67.82	67,58	67,58
17	Kota Bukittinggi	60.33	60.19	63.37	60,96	60,96
18	Kota Payakumbuh	71.01	71.58	71.21	71,09	71,09
19	Kota Pariaman	54.41	53.42	52.62	53,91	53,91
	Provinsi Sumatera Barat	58.28	65.12	65.48	65,34	65,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, 2024

Strategi untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan pemenuhan hak dan anak dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- b. Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak;
- c. Peningkatan dan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak;

- d. Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Peningkatan kerjasama dengan ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skreening terhadap calon pengantin;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.

Didalam Dokumen RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh No. 189.1/148/Bappeda-Ko/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Kegiatan Perangkat Daerah yang telah Responsif Gender, maka Program yang Mendukung Pencapaian Target Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender adalah :

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Anak;
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
3. Program Perlindungan Perempuan;
4. Program Pemenuhan Hak Anak;
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
8. Program Pendidikan dan latihan perkoperasian;
9. Program Perekonomian dan Pembangunan;
10. Program Pendaftaran penduduk;
11. Program Pencatatan sipil;
12. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
14. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
16. Program Dukungan pelaksanaan tugas DPRD;

17. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sekretariat DPRD;
18. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
19. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
20. Program Pengelolaan Pendidikan;
21. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
23. Program Aplikasi Informatika;
24. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
25. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
26. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
27. Program Kawasan Pemukiman;
28. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
29. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
30. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Inspektorat;
31. Program Pembinaan Perpustakaan;
32. Program Pengelolaan Arsip;
33. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
34. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
35. Program Penanggulangan Bencana;
36. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
37. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
38. Pelayanan Penanaman Modal;
39. Pengembangan Kebudayaan;
40. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
41. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
42. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Dinas PUPR;
43. Program Penyelenggaraan jalan;

44. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.;
45. Program Rehabilitasi Sosial;
46. Program Pemberdayaan Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender adalah :

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan masih tingginya persentase perempuan yang bekerja di sektor informal;
2. Masih belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja;
3. Masih tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan (termasuk perkawinan usia anak dan praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan/anak perempuan);
4. Masih rendahnya partisipasi politik Perempuan di parlemen/ legislatif.
5. Ketersediaan data terpilah yang responsif gender kurang memadai. Persoalan ini makin berantai manakala penyedia data pembangunan selama ini kurang memperhatikan pentingnya data terpilah sebagai dasar penyelenggaraan perencanaan penganggaran.
6. Kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraan data gender dan anak, kapasitas SDM yang belum optimal serta sarana prasarana sebagai penunjang utama ketersediaan data yang masih terbatas;
7. Masih minimnya jumlah kebijakan tentang hak dan perlindungan Perempuan sehingga mengharuskan OPD pengampu urusan untuk membuat perencanaan kebijakan yang terkait;
8. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar *stakeholder* mengenai arti penting dan peran perempuan dalam pembangunan (pengarusutamaan gender);
9. Masih terbatasnya informasi di masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan;

10. Masih kurangnya pemahaman OPD/lembaga/instansi terkait tentang Perlindungan Perempuan;
11. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender PPRG di Kota Payakumbuh;
12. Belum Optimalnya peran kelembagaan PUG, sehingga pemahaman konsep Pengarusutamaan Gender masih dinilai terbatas.

Strategi/rencana aksi yang dilakukan kedepan terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender di Kota Payakumbuh antara lain:

1. Di bidang Pendidikan, Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan;
2. Di sektor kesehatan, Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Payakumbuh fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana;
3. Di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Payakumbuh fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender;
4. Terkait pencegahan kekerasan, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi anak dan Perempuan;

5. Melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk memahami konsep dan pengimplementasikan PPRG;
6. Mendorong koordinasi dan penyelarasan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Kota Payakumbuh dengan mengupayakan dan memaksimalkan program-program utama yang mendukung pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender;
7. Dibutuhkan komitmen, sinergi, dan kerjasama yang baik antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan perguruan tinggi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
8. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang kritis tentang *Capacity Building*, sehingga perempuan percaya diri dan berani untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang Pembangunan;
9. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, sehingga nantinya dapat mengelola dan memimpin organisasi;
10. Memperkuat kapasitas Organisasi perempuan di tingkat lokal melalui pelatihan, diskusi dan *Capacity Building* agar mampu menyuarakan kepentingan kaumnya sendiri.
11. Meningkatkan kapasitas SDM perempuan yang maju dan mandiri serta mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaan perempuan dalam pelaksanaan Pembangunan baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun pembangunan.

Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Di beberapa negara berkembang tak terkecuali di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Namun persoalannya ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya perekonomian ke depannya juga diharapkan mampu memiliki daya saing dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Terwujudnya hal tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi merata dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Kota Payakumbuh.

Tujuan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
- b. Meningkatnya sektor strategis
- c. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh

Secara ringkas, sasaran strategis dan indikator dapat dijelaskan pada Tabel 3.25

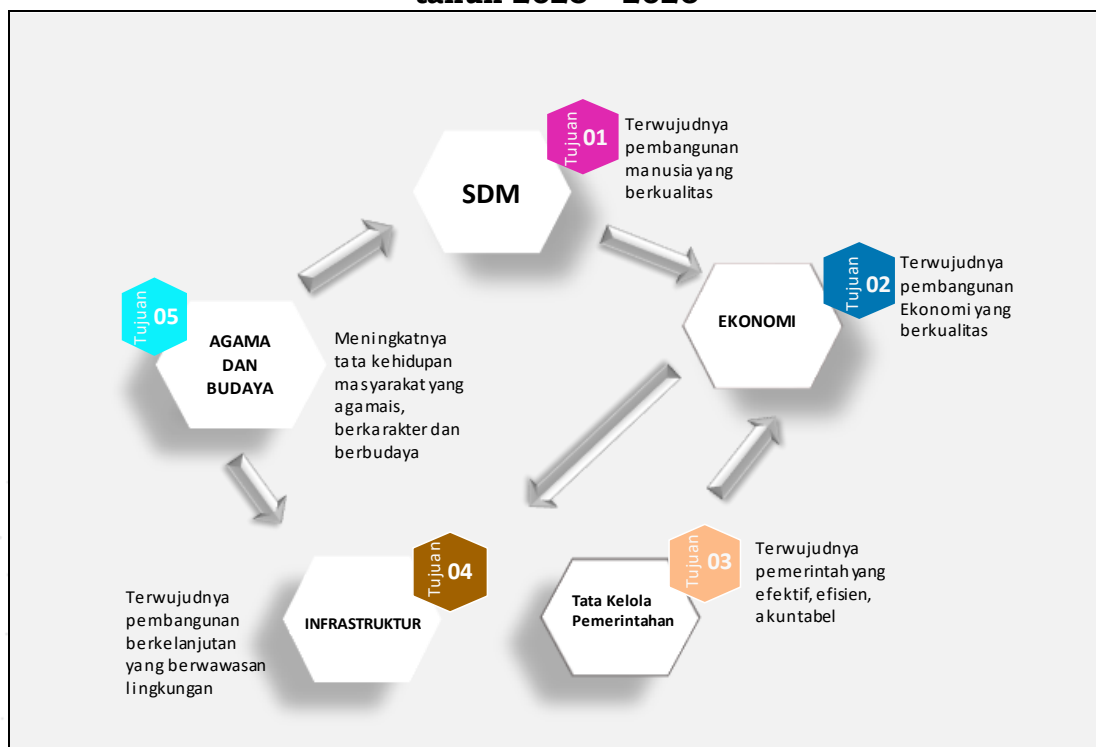
Tabel 3.25
Sasaran Strategis dan IKU II Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
	Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.71	
		Gini Rasio	0.276	
1.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	5.41	
		Tingkat Pengangguran	5.81	
2.	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2.94	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	2.28	
3.	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	225.0	

Sumber : RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan ke 2 RPD yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Penjabaran tujuan ini diarahkan memberdayakan segenap potensi perekonomian secara komprehensif, sehingga berakumulasi terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dimana peningkatan ekonomi yang merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesenjangan antar penduduk. Ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan ekonomi juga ditandai dengan naiknya pertumbuhan sektor ekonomi strategis, semakin terbuka luas dan transparannya investasi yang menggerakkan banyak sektor ekonomi di tengah masyarakat sekaligus berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Gambar 3.2
Tujuan pada RPD Kota Payakumbuh
tahun 2023 – 2026



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dan berdasarkan analisis data capaian kinerja makro daerah, pencapaian target kinerja sasaran pada tujuan 2 dapat dijelaskan pada Tabel 3.26

Tabel 3.26
Evaluasi Pencapaian Tujuan II Sasaran 1-3 Tahun 2024

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Tingkat Kemiskinan	5.44	5.41	5.19	104,07	Sangat Tinggi	5,16	99,42
2	Tingkat Pengangguran	4.84	5.81	4.87	116,18	Sangat Tinggi	5,21	106,53
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2.72	2.94	2.99	101,70	Sangat Tinggi	3,15	94,92
4	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4.66	2.28	4.49	104,91	Sangat Tinggi	4,83	92,96
5	Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	493.81	225.0	658.63	292,72	Sangat Tinggi	915,00	71,98

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2025, dan DPMPSTP Kota Payakumbuh Tahun 2024

I. Sasaran Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan pengangguran adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Dengan demikian, tenaga kerja yang tidak bekerja dapat disebut sebagai pengangguran.

Di Kota Payakumbuh, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan dokumen RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh sudah semakin meningkat, namun perlu dikaji kualitas pertumbuhannya apakah pertumbuhan tersebut diiringi dengan menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Indikator kinerja untuk sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Payakumbuh adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2024 sebesar 110.12% dengan kategori **sangat tinggi**.

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thd RPD %
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Tingkat Kemiskinan	5,44	5,41	5,19	104,07	Sangat Tinggi	5,16	99,42
2	Tingkat Pengangguran	4,84	5,81	4,87	116,18	Sangat Tinggi	5,21	106,53

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2025

1. Indikator Tingkat Kemiskinan

Dari tabel diatas terlihat jika capaian tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 5,19% dengan capaian sebesar 104,07% atau dengan kategori sangat tinggi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 0,25% dari tahun sebelumnya.

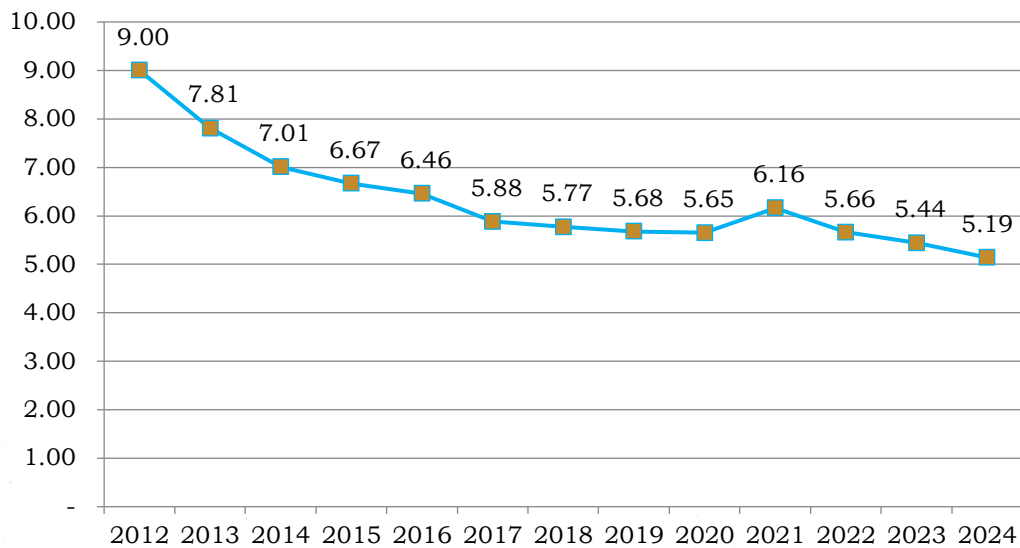
Tabel 3.28
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan
Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)
1	Kepulauan Mentawai	14,19	13,89	1,6	0,35	Rp 461.088
2	Pesisir Selatan	36,05	7,49	0,74	0,11	Rp 589.787
3	Solok	28,18	7,31	1,09	0,3	Rp 569.605
4	Sijunjung	14,99	5,78	0,71	0,13	Rp 565.067
5	Tanah Datar	15	4,28	0,44	0,07	Rp 554.665
6	Padang Pariaman	26,76	6,27	0,78	0,19	Rp 580.392
7	Agam	34,82	6,83	0,5	0,07	Rp 558.963
8	Lima Puluh Kota	27,72	6,92	0,77	0,16	Rp 582.794
9	Pasaman	20,01	6,74	0,79	0,13	Rp 515.608
10	Solok Selatan	12,33	6,56	0,94	0,22	Rp 551.340
11	Dharmasraya	15,25	5,32	0,64	0,15	Rp 622.190
12	Pasaman Barat	34,6	7,00	0,76	0,17	Rp 657.354
13	Kota Padang	41,4	4,06	0,25	0,03	Rp 736.786
14	Kota Solok	2,4	3,07	0,34	0,07	Rp 569.869
15	Kota Sawah Lunto	1,52	2,33	0,3	0,08	Rp 524.196
16	Kota Padang Panjang	3,06	5,31	0,46	0,07	Rp 634.303
17	Kota Bukittinggi	5,82	4,08	0,43	0,08	Rp 658.640
18	Kota Payakumbuh	7,62	5,19	0,74	0,15	Rp 648.230
19	Kota Pariaman	4,01	4,26	0,46	0,08	Rp 609.286

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kota Payakumbuh nomor 7 (tujuh) terendah dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya angka kemiskinan di Kota Payakumbuh juga disebabkan karena tingginya Garis Kemiskinan (GK) Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat. Garis Kemiskinan adalah merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Grafik 3.5
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Payakumbuh
Tahun 2012-2024



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat terjadi penurunan persentase angka kemiskinan Kota Payakumbuh setiap tahunnya. Penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari intervensi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka penurunan angka kemiskinan antara lain:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain:

- a) Bantuan permakanan untuk lanjut usia terlantar, anak terlantar dan disabilitas terlantar dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Bantuan Permakanan ini berupa pemberian bantuan berupa bahan makanan untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan disabilitas yang belum mendapatkan bantuan baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (PKH/Sembako). Untuk tahun 2024, sudah dianggarkan bantuan permakanan untuk 90 orang.

Pada perubahan anggaran tahun 2024 ini ditambahkan lagi sehingga jumlah penerima menjadi 300 orang. Bantuan ini dalam bentuk permakanan, dimana perbulannya diberikan sejumlah ± Rp. 250.000.



- b) Bantuan sosial untuk peralatan anak sekolah dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Bantuan sosial untuk peralatan anak sekolah diberikan kepada 28 orang penerima. Bantuan ini diberikan dalam bentuk non tunai dan dibayarkan langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000 per anak.



- c) Bantuan sosial kepada masyarakat miskin dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Bantuan Sosial untuk masyarakat miskin ini diberikan melalui Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin untuk 347 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebanyak Rp.300.000 per bulan selama 12 bulan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu penyediaan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di Kota Payakumbuh. Pada APBD perubahan jumlah penerima bantuan ini ditambah sehingga menjadi berjumlah 488 KPM.



d) Bantuan untuk korban bencana

Bantuan yang disediakan untuk korban bencana di Kota Payakumbuh adalah bantuan permakanan, yang disediakan dalam anggaran Dinas Sosial adalah sebanyak 25 paket. Realisasi sampai akhir tahun 2024 adalah 19 paket dengan jumlah ± Rp. 500.000,- per paket.



e) Bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

f) Bantuan pendidikan melalui Penyediaan biaya personil peserta didik SD dan SMP ditujukan pada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan pada sekolah dasar Sekolah Menengah Pertama. Untuk Sekolah Dasar Untuk tahun 2024, siswa kurang mampu yang diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 500,000,- dan siswa kurang mampu yang mendapatkan penyediaan biaya personil peserta didik berupa beasiswa sebesar Rp. 600.000 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

g) Bantuan rehab rumah tidak layak huni, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



h) Bantuan akses air minum layak dan aman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui peningkatan produktifitas dan pemberdayaan masyarakat antara lain:

a) Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat ini diberikan kepada masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam bentuk bantuan usaha dengan target 41 orang tetapi saat perubahan anggaran ditambah sehingga terealisasi menjadi sebanyak 128 orang dengan masing-masing menerima Rp. 4.000.000. Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Sosial



- b) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan usaha. Seperti: pelatihan memasak aneka kue/roti, pelatihan menjahit, pelatihan MUA, pelatihan service HP, pelatihan barbershop, pelatihan menjahit bad cover, pelatihan kewirausahaan pelatihan ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
- c) Sosialisasi untuk masyarakat Kota Payakumbuh yang dilaksanakan di 5 Kecamatan yang ada di kota Payakumbuh antara lain Sosialisasi terkait Sampah Rumah Tangga/Pengelolaan Sampah RT, Pelatihan Kader Posyandu Terintegrasi, Sosialisasi Kenakalan Remaja dan lain-lainPelatihan Desa Mandiri Pangan, Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- d) Pelatihan kepada kelompok pembudidaya ikan dan keluarga yang miskin dan memiliki anak stunting dalam bentuk demplot

budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember) untuk Jenis Ikan Lele. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

- e) Guna peningkatan pengetahuan pelaku usaha Payakumbuh akan pemasaran online Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan bimbingan teknis pemasaran online untuk pelaku UMKM.
- f) Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk pelaku usaha.

3. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur sanitasi dan air minum layak.
- b) Peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Selain itu pada tahun 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melaksanakan konvergensi pelaksanaan program kegiatan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:
 - a) Pengembangan skema insentif atau kemudahan perijinan untuk mendorong investasi disektor kesempatan kerja untuk masyarakat miskin dan rentan.
 - b) Memastikan stabilitas harga komoditi bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali.
 - c) Peningkatan daya beli masyarakat.
2. Menyediakan data penerima target yang mutakhir, akurat dan berdasarkan status kesejahteraan masyarakat miskin melalui:
 - a) Pendataan seluruh masyarakat berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan sebagai data Registrasi Sosial Ekonomi.
 - b) Verifikasi dan validasi status kesejahteraan melalui pendaftaran mandiri.

3. Konvergensi program lintas kementerian/ lembaga, OPD, dan pemangku kepentingan lain, melalui:
 - a) Koordinasi lintas sektor tim pelaksana percepatan penurunan kemiskinan melalui TKPK Kabupaten/Kota.
 - b) Konvergensi bidang/ sektor yang menunjang 3 (tiga) strategi penghapusan kemiskinan.
 - c) Penggunaan basis data mutakhir yang sama sampai pada individu penerima manfaat program.
4. Integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari swasta dan masyarakat dengan program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Mendorong konvergensi berbasis pada kebutuhan penduduk melalui:
 - a) Pemenuhan bantuan sosial seluruh penduduk miskin, antara lain melalui program PKH, Program Sembako, subsidi listrik dan subsidi LPG.
 - b) Pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan, pelatihan, dan akses pinjaman modal diberikan berdasarkan minat dan kemampuan, yang diberikan kepada kepala rumah tangga, anak yang telah lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi, atau penduduk lanjut usia yang masih mampu.

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Pada Tahun 2024 disusun Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Hal ini menunjukkan integrasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh.
2. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Payakumbuh tahun 2024.
3. Terdapat 19 (sembilan belas) Perangkat Daerah yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, baik yang menyentuh langsung, maupun mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
4. Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) digunakan untuk menyasar individu atau keluarga yang membutuhkan program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Permasalahan Kemiskinan di Kota Payakumbuh

Tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh masih tergolong cukup tinggi, walaupun lebih rendah dari rata-rata Sumatera Barat dan Nasional, namun untuk skala Kota di tahun 2024 Kota Payakumbuh nomor dua tertinggi setelah Kota Padang Panjang.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan ada 3 strategi yaitu :

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
 - a) Memastikan kelompok miskin ekstem memperoleh program perlindungan sosial.
 - b) Memastikan komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah.
 - c) Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas dan lansia
 - d) Melibatkan multipihak; komunitas, universitas, swasta, dan media.
 - e) Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terkait pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan (NIK, Akta kelahiran, dsb)
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 - a) Membuka akses pada pekerjaan dan infrastruktur dasar yang layak
 - b) Peningkatan akses layanan dasar.
 - c) Meningkatkan konektifitas antar wilayah.
 - d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - e) Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM.
 - f) Menyediakan dan mempermudah akses pembiayaan UMKM
3. Perbaikan Kantong Kantong Kemiskinan
 - a) Peningkatan akses layanan dasar.
 - b) Meningkatkan konektifitas antar wilayah. .
 - c) Mendorong konvergensi anggaran.
 - d) Memastikan konsolidasi program.
 - e) Meningkatkan kerjasama multi pihak.

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Program rehabilitasi sosial
2. Program perlindungan jaminan sosial
3. Program pemberdayaan sosial
4. Program pengelolaan Pendidikan
5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan UMKM
6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
7. Program pengelolaan sumber daya air
8. Program pengembangan permukiman
9. Program pengelolaan dan pengembangan sistim air limbah
10. Program Pengembangan jasa konstruksi
11. Program kawasan permukiman
12. Program Penempatan Tenaga Kerja
13. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
14. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
15. Program penanganan kerawanan pangan
16. Program Pencatatan sipil
17. Program pendaftaran penduduk
18. Program Pengendalian Penduduk
19. Program pembinaan KB
20. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
21. Program pemberdayaan UMKM
22. Program pengembangan UMKM
23. Program iklim pengembangan penanaman modal
24. Program pelayanan penanaman Modal
25. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
26. Program pengembangan pariwisata dan ekraf
27. Program pengelolaan perikanan budidaya
28. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
29. Program penyediaan dan pengembangan pra sarana pertanian
30. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
31. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

32. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
33. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
34. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
35. Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
36. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

2. Indikator Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh tahun 2024 yang merupakan tahun ke-dua pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu 4,87% dengan capaian kinerja sebesar 116,18% terkategori **sangat tinggi**.

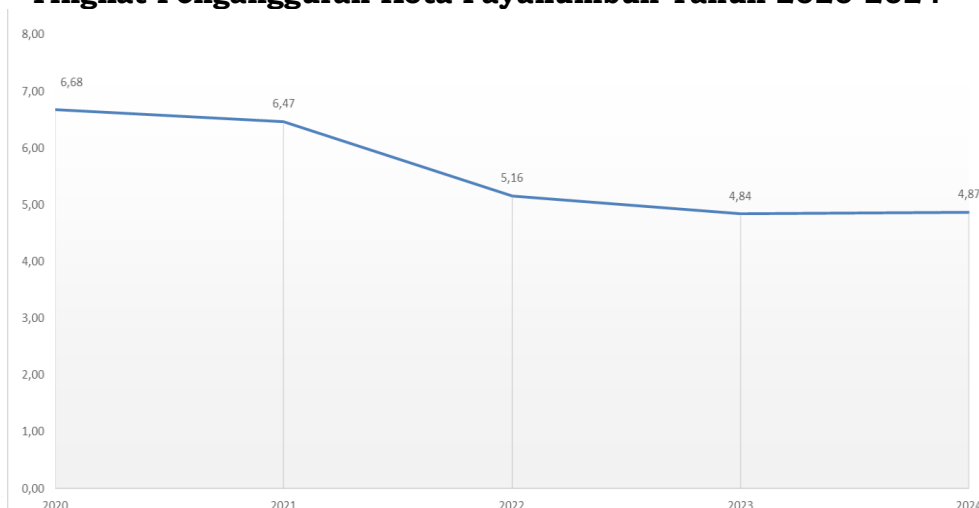
Tabel 3.29
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thd RPD %
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Tingkat Pengangguran	4,84	5,81	4,87	116,18	Sangat Tinggi	5,21	106,53

sumber : Payakumbuh Dalam angka, 2025

Tabel 3.29 memperlihatkan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,03% dari tahun 2023, yang berarti adanya penduduk yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau masih menunggu mendapatkan pekerjaan yang baru, peningkatan ini akan menjadi perhatian dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian dalam hal pencapaian kinerja RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, capaian tingkat pengangguran Kota Payakumbuh sebesar 106,53% atau sangat tinggi.

Grafik. 3.6
Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024



sumber data : BPS, 2025

Perkembangan tingkat pengangguran Kota Payakumbuh dari tahun 2020-2024 yang terlihat pada grafik 3.6, pada tahun 2020 sampai tahun 2023 tingkat pengangguran terus menunjukkan perbaikan dimana penurunan tingkat pengangguran dari 6,68% pada tahun 2020 menjadi 6,47% pada tahun 2021, 5,16% pada tahun 2022 dan 4,84% pada tahun 2023 dengan penurunan sampai dengan tahun 2023 tercatat 1,84% selama 3 tahun. Penurunan tingkat pengangguran terjadi seiring dengan menggeliatnya kembali kegiatan sosial ekonomi masyarakat pasca dilonggarkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat serta dihapuskannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada 30 Desember 2022 akibat merebaknya pandemi COVID-19 yang awal dideteksi di Indonesia pada awal Maret 2020. Tetapi pada tahun 2024 terjadi kenaikan tingkat pengangguran menjadi 4,87% yang disebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan baru yang lebih baik.

Tabel 3.30
Perbandingan Tingkat Pengangguran Antar Waktu
Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kota Payakumbuh (%)	Provinsi Sumatera Barat (%)	Indonesia (%)
1	2020	6,68	6,88	7,1
2	2021	6,47	6,52	6,5
3	2022	5,16	6,28	5,9

4	2023	4,84	5,94	5,32
5	2024	4,87	5,75	4,9

Sumber: Payakumbuh Dalam angka, 2025

Tabel 3.30 memperlihatkan bahwa perkembangan antar waktu tingkat pengangguran Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dari tahun 2020-2023 berkelanjutan mengalami penurunan, namun pada tahun 2024 penurunan tingkat pengangguran hanya terjadi pada Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, sedangkan tingkat pengangguran Kota Payakumbuh mengalami kenaikan 0,03% sehingga menjadi 4,87%. Jika dilihat dari proyeksi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tingkat pengangguran Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 5,81%, yang berarti tingkat pengangguran Kota Payakumbuh masih lebih rendah. Selain itu tingkat pengangguran Kota Payakumbuh masih lebih rendah dari tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Untuk tingkat Kota di Provinsi Sumatera Barat, tingkat pengangguran terbuka Kota Payakumbuh pada tahun 2024 berada pada posisi ke 3 terkecil setelah Kota Bukittinggi (4,72%) seperti yang terlihat pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kab. Kepulauan Mentawai	3.98	2,79	1,39	1,33	1,44
Kab. Pesisir Selatan	7.00	5,97	4,61	4,75	5,06
Kab. Solok	4.65	4,67	5,89	4,99	4,91
Kab. Sijunjung	5.30	3,57	4,87	4,71	4,73
Kab. Tanah Datar	4.79	4,63	5,91	5,35	5,30
Kab. Padang Pariaman	8.13	8,41	6,60	6,69	6,59
Kab. Agam	4.61	5,06	4,93	4,96	4,73
Kab. Lima Puluh Kota	3.03	2,25	3,72	3,95	3,68
Kab. Pasaman	5.04	4,92	5,38	5,09	5,25
Kab. Solok Selatan	5.62	4,84	3,71	2,57	2,30
Kab. Dharmasraya	5.31	5,00	6,23	6,22	6,02
Kab. Pasaman Barat	4.69	5,02	6,33	6,01	6,34
Kota					

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Padang	13.64	13,37	11,69	10,86	9,88
Kota Solok	8.35	5,15	3,90	3,72	3,62
Kota Sawahlunto	8.20	6,38	5,00	4,98	5,55
Kota Padang Panjang	7.22	4,90	4,84	5,49	4,94
Kota Bukittinggi	7.51	6,09	4,90	4,99	4,72
Kota Payakumbuh	6.68	6,47	5,16	4,84	4,87
Kota Pariaman	5.73	6,09	5,19	5,68	5,32
Provinsi Sumatera Barat	6.88	6,52	6,28	5,94	5,75

Sumber : Payakumbuh Dalam angka, 2025

Jika dibandingkan dengan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh berada pada posisi nomor 3 terendah tingkat penganggurannya setelah Kota Bukittinggi.

Sedangkan jika dilihat kondisi tingkat pengangguran Kota Payakumbuh terjadinya fluktuasi pada tahun 2023 ke 2024 yang sebelumnya dari tahun 2020 sampai 2023 selalu mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya ketersediaan lapangan usaha, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau lebih baik. Data tahun 2024 menunjukkan jumlah angkatan kerja sebanyak 77.876 jiwa dengan 74.085 jiwa bekerja dan 3.791 jiwa tidak bekerja. Perkembangan data ketenagakerjaan Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32
Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	69.808	74.303	73.939	77.907	77,876
Bekerja	65.144	69.498	70.127	74.137	74.085
Pengangguran	4.664	4.805	3.812	3.770	3.791
Bukan Angkatan Kerja	31.830	29.279	31.539	30.515	32,544
Sekolah	9.734	10,607	9.093	9.796	9,015
Mengurus Rumah Tangga	16.937	14.159	18.160	16.037	17,935
Lainnya	5.159	4.513	4.340	4.682	5,594
Penduduk Usia Kerja	101.638	103.582	105.532	108.422	110.415
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,68	71,73	70,49	71,86	70,53

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran (%)	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87

Sumber: Payakumbuh Dalam angka, 2025

Tabel 3.32 memperlihatkan fluktuasi data ketenagakerjaan Kota Payakumbuh tahun 2020-2024. Dari ketiga komponen ketenagakerjaan hanya komponen penduduk usia kerja yang mengalami kenaikan setiap tahun. Periode tahun 2020 ke tahun 2021 adanya peningkatan yang cukup tinggi pada komponen angkatan kerja fluktuasi yang juga diikuti penurunan yang cukup tinggi pada komponen bukan angkatan kerja yang juga berkontribusi dalam penurunan angka pengangguran yang cukup tinggi setelah pasca dilonggarkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sedangkan periode tahun 2022 ke tahun 2023 juga terjadi kenaikan komponen angkatan kerja dan penurunan komponen bukan angkatan kerja setelah dihapuskannya PPKM yang juga berkontribusi dalam penurunan tingkat pengangguran tahun 2023 menjadi 4,84%. Namun terjadi penyesuaian pada tahun 2024 dimana pada adanya kenaikan yang cukup tinggi pada jumlah bukan angkatan kerja yang diikuti dengan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,03% menjadi 4,87% pada tahun 2024.

Tabel 3.33
Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

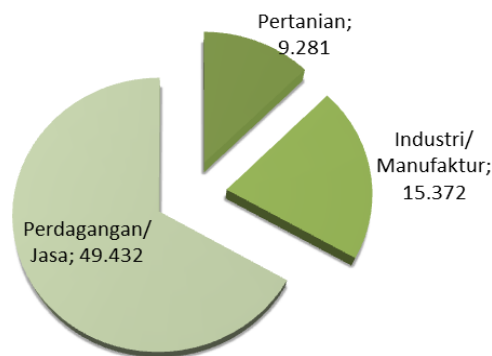
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angkatan Kerja (orang)	69.808	74.303	73.939	77.907	77,876
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	65.144	69.498	70.127	74.137	74.085
3.	Jumlah Pengangguran	4.664	4.805	3.812	3.770	3.791
4.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93,32	93,53	94,84	95,16	95,13
	Rasio Bekerja : AK	1 : 1,072	1 : 1,069	1 : 1,054	1 : 1,051	1 : 1,051

Sumber : BPS, 2025

Jika dilihat lebih jauh pada tabel 3.33, setiap tahunnya pasca COVID-19 kesempatan kerja di Kota Payakumbuh selalu mengalami peningkatan dan hanya terkoreksi 0,03% pada tahun 2024 menjadi 95,13% namun rasio antara yang bekerja dengan angkatan kerja 1 : 1,051 yang dapat diartikan

dari 1 orang yang bekerja ada 1 atau 2 orang yang merupakan angkatan kerja yang sudah bekerja ataupun tidak bekerja, dimana penduduk yang tidak bekerja ini terakumulasi menjadi 3.791 orang yang naik sebanyak 21 orang dari tahun 2023.

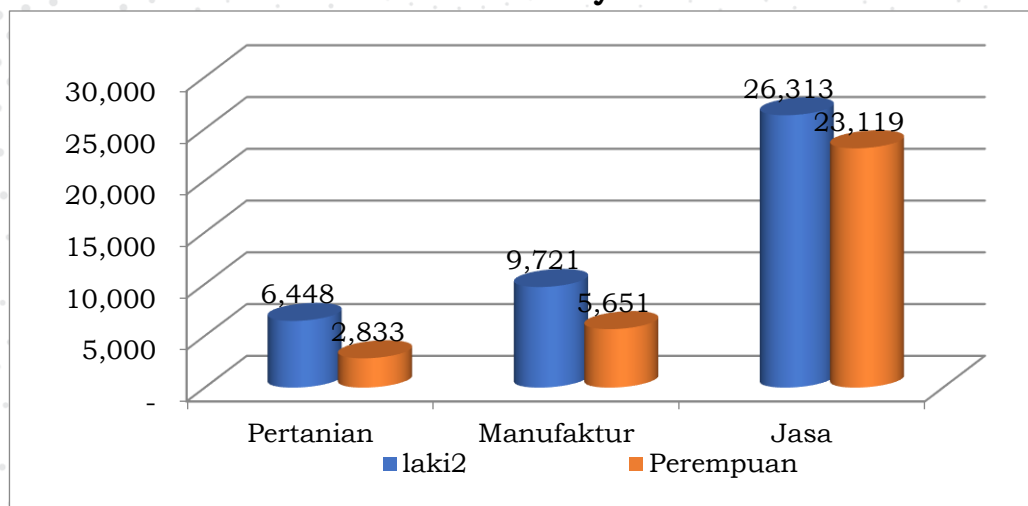
Grafik. 3.7
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh, 2024



sumber data : Payakumbuh Dalam Angka, 2025

Penduduk yang bekerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 lebih banyak bekerja pada kelompok pekerjaan utama perdagangan dan jasa yaitu 49.432 atau 66,72%.

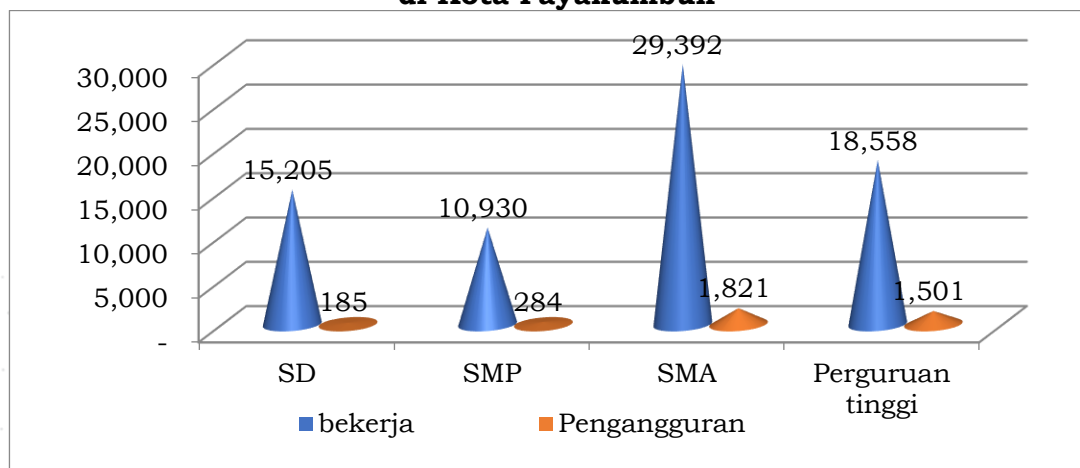
Grafik. 3.8
Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di kota Payakumbuh



Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2025

Dari jumlah penduduk yang bekerja di Kota Payakumbuh, sebanyak 42.482 laki-laki dan sisanya 31.603 orang perempuan, yang bekerja paling banyak di sektor jasa.

Grafik. 3.9
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh



Sumber data : Payakumbuh Dalam Angka 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang bekerja di Kota Payakumbuh banyak tamatan SMA sebesar 29.392 orang yang disusul dengan dengan tamatan perguruan tinggi sebesar 18.558 orang. Sedangkan tingkat pengangguran juga banyak penduduk tamatan SMA sebesar 1.821 orang disusul tamatan perguruan tinggi sebesar 1.501 orang

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Terdapat beberapa perangkat daerah yang melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan UMKM untuk peningkatan daya saing tenaga kerja dan UMKM;
2. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dapat menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja yang bersifat produktif;
3. Terdapat kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Lembaga Pelatihan Bersertifikasi di luar daerah yang membantu tenaga kerja memperoleh keahlian dan sertifikasi untuk bersaing di dunia kerja.

Permasalahan

1. Kapasitas tenaga kerja yang belum tinggi untuk dapat bersaing dalam dunia kerja;
2. Masih minimnya informasi dan fasilitasi kebutuhan tenaga kerja dengan penyedia lapangan kerja sehingga kurangnya pemenuhan jumlah dan kualifikasi angkatan kerja.
3. Tenaga kerja banyak bekerja pada sektor buruh/ pekerja dan masih rendahnya jiwa kewirausahaan, sehingga lebih bergantung pada usaha yang ada dan rentan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus masih belum mendapatkan pendapatan yang memadai.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pemetaan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja;
2. Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan dan kemampuan wirausahaan dalam pemasaran produk usaha mereka agar memiliki pangsa pasar yang lebih luas;
3. Peningkatan fasilitasi antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
4. Peningkatan kemandirian tenaga kerja untuk berusaha dalam sektor swasta.

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Penempatan Tenaga Kerja.
2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Perencanaan Tenaga Kerja
5. Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

II. Sasaran Meningkatnya Sektor Strategis

Sasaran ini menitik beratkan pada penguatan sektor industri dan perdagangan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Sasaran meningkatnya sektor strategis memiliki dua indikator yaitu:

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.

Target kinerja sasaran meningkatnya sektor strategis tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.34 dibawah ini:

Tabel 3.34
Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Sektor Strategis
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
2.	Meningkatnya Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2.94	
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4.28	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya sektor strategis tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.35 berikut:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sektor Strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023 (%)	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2023-2026	Capaian thn 2024 thdp RPD 2023-2026 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Nilai capaian %			
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,72	2,94	2,99	101,70	Sangat Tinggi	3,15	94,92
2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4.66	4,28	4,49	104,91	Sangat Tinggi	4,83	92,96

Dari tabel diatas terlihat bahwa kedua capain indikator diatas sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran adalah sebesar 103,30%. Capaian kedua indikator tersebut bisa dilihat dari tampilan data laju pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 sebagaimana tergambar pada tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.36
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,53	1,40	2,51	0,89	-0,03
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-2,09	4,04	4,60	2,91	1,86
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-3,21	2,66	2,13	2,72	2,99
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	-6,22	2,67	3,16	3,82	4,39
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	-1,65	3,32	6,21	3,05	1,75
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	-5,95	1,43	3,36	5,84	3,69
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-1,00	3,58	5,55	4,66	4,49
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-9,40	5,14	3,22	5,59	4,11
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-11,62	7,29	15,10	6,96	6,74
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	10,25	5,57	6,80	7,80	4,79
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,29	6,17	4,01	3,22	7,06
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,19	1,72	5,13	5,94	5,61
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-4,15	1,02	6,70	6,50	4,82
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-0,48	0,65	-1,06	1,88	8,31
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,22	3,64	5,30	1,66	3,10
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,87	5,59	4,40	6,85	5,38
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	-9,95	4,19	8,09	7,32	6,69
Produk Domestik Regional Bruto Gross Domestic Regional Product	-1,65	3,58	4,51	4,70	4,53

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023, Hal ini diperkirakan karena akselerasi kinerja ekonomi yang cenderung fluktuatif.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi 45,19% terhadap

PDRB Kota Payakumbuh tahun 2024. Setelah Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap bruto memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Payakumbuh yaitu 24,20%.

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri.

Pengukuran Capaian Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tergambar pada tabel 3.37 berikut;

Tabel 3.37
Capaian IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023 (%)	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2023-2026	Capaian thn 2024 thdp RPD 2023-2026 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Nilai capaian %			
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,72	2,94	2,99	101,70	Sangat Tinggi	3,15	94,92

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Indikator untuk Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2024 adalah 101,70%, dari target 2,94 dan realisasi 2,99. Predikat kinerja capaian indikator ini adalah Sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,5% dari 2,72% pada tahun 2023 menjadi 2,99% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPD sebesar 3,15%, maka capaian tahun 2024 berada pada angka 94,92%.

Tabel 3.38
Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Sektor Industri Tahun 2020-2024

Jenis usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	-3,21	2,66	2,13	2,72	2,99

Dari tabel 3.38 diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Kinerja Indikator untuk Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif dari -3,21 pada Tahun 2020 menjadi 2,99 pada Tahun 2024.

Perkembangan Industri Industri Kota Payakumbuh didominasi oleh industri non formal dengan skala usaha mikro dan kecil. Perkembangan industri selama kurun waktu 5 (lima) tahu terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.39
Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Unit Usaha	Unit	1,902	1,928	2.000	2.454	2.208
2.	Formal	unit	630	643	905	1.369	1.400
3.	Non Formal	unit	1,272	1,285	1.095	1.095	1100
4.	Tenaga Kerja	orang	6,271	6,308	6.485	7.549	5.233
5.	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	95.649.716	95.954.716	87.291.446	94.866.073	100.687.145
6.	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	257.089.350	296.463.459	269.426.788	284.598.221	293.969.303

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Jumlah IKM menurun tajam dari 2.454 unit usaha di tahun 2023 menjadi 2.208 unit usaha pada tahun 2024. Sedangkan perkembangan industri formal meningkat dari 1.369 menjadi 1.400. Untuk Tenaga kerja juga mengalami penurunan di tahun 2024 sebanyak 5.233 tahun dari 2024 dibandingkan tahun 2023 sebanya 7.549 orang. Nilai investasi meningkat dari tahun 2023 dari Rp.94.866.073 menjadi 100.687.145, sedangkan nilai produksi juga meningkat dari Rp.284.426.788 menjadi Rp.293.969.303

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator :

1. Ketersediaan Anggaran Pemerintah (APBD Kota Payakumbuh, APBD Propinsi, dan APBN);
2. Kondisi ekonomi yang sudah normal;
3. Distribusi bahan baku dan pengiriman produk yang lebih lancar;

4. Meningkatnya kunjungan wisatawan;
5. Ketersediaan bahan baku yang mencukupi;
6. Partisipasi aktif Kementerian/Lembaga/Instansi memfasilitasi IKM dalam melakukan pengurusan sertifikasi mutu produk;
7. Ketersediaan dukungan teknologi tepat guna;
8. Peluang pasar produk industri yang sudah mulai terbuka baik pasar domestik maupun internasional;
9. Meningkatnya pemanfaatan e-commerce oleh pelaku IKM;
10. Mulai tumbuhnya wirausahawan baru.

Permasalahan:

1. Kenaikan harga BBM Bersubsidi dan Inflasi;
2. Kualitas SDM Pelaku IKM yang umumnya masih rendah;
3. Belum optimalnya sinergisitas antar Perangkat Daerah;
4. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan produksi yang mengacu kepada prinsip prinsip produksi yang baik oleh IKM;
5. Masih rendahnya kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi mutu produk;
6. Anggaran yang tersedia belum optimal dalam mendukung peningkatan kapasitas IKM dan Kualitas produk yang dihasilkan;
7. Ketersediaan jumlah tenaga ahli dan tenaga fungsional Pembina IKM yang masih kurang;
8. Belum optimalnya IKM dalam memanfaatkan peluang pasar yang tersedia;
9. Masih minimnya inovasi dan kreatifitas IKM dalam pengembangan produk;
10. Belum optimalnya pengelolaan Sentra-Sentra IKM yang ada;
11. Masih minimnya kolaborasi antar IKM, IKM dengan Industri Besar, dan IKM dengan stakeholder terkait

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi :

1. Stabilitas ekonomi dan angka inflasi;
2. Implementasi program dan kegiatan yang berkesinambungan;
3. Meningkatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor;
4. Ketersediaan anggaran yang memadai;

5. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;
6. Meningkatkan pembinaan terhadap IKM secara komprehensif;
7. Meningkatkan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) oleh IKM;
8. Menghubungkan IKM dengan Industri Besar dan sektor ekonomi lainnya;
9. Meningkatkan pemasaran produk IKM melalui optimalisasi pemasaran online, optimalisasi strategi promosi, optimalisasi pembangunan jejaring dengan stakeholder terkait baik di dalam maupun luar negeri;
10. Optimalisasi pengelolaan sentra-sentra IKM.

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



Gambar 3.2
Kampung Rendang dan perkembangannya menjadi Sentra IKM Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2024

PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI PRODUKSI

BEFORE



DAPUR RENDANG TRADISIONAL

KAPASITAS	5 Kg/ 1X masak
LAMA PRODUKSI	6 jam/ 1X masak

SKALA PRODUKSI MASIH KECIL DAN TERBATAS

AFTER



DAPUR RENDANG MODEREN

JENIS DAPUR	JUMLAH TUNGKU	KAPASITAS SAAT INI	LAMA PRODUKSI
BILIK PRODUKSI	20	5Kg/1X masak	4 JAM
DAPUR UTAMA	5	40 Kg/1X masak	2 JAM

DAPUR UTAMA YANG CUKUP LUAS SAAT INI MEMILIKI TUNGKU OTOMATIS MASIH MEMUNGKINKAN PENAMBAHAN SAMPAI 20 UNIT TUNGKU, MENYONGSONG PRODUKSI SKALA BESAR UNTUK EKSPOR

Gambar 3.3
Perkembangan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2024

Dokumentasi kegiatan
Workshop Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)



Workshop Batik



Pelatihan Rajut



Workshop Produksi Mesin dan/atau Peralatan Industri Melalui Teknologi Tepat Guna Tahun 2024



Workshop Bambu



Pelatihan Memasak Rendang



2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi, baik secara lokal maupun global. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terlihat dari berbagai aspek, termasuk perkembangan teknologi dan globalisasi yang telah membuka peluang ekspansi perdagangan internasional. Perdagangan lintas batas kini semakin mudah melalui adopsi sistem e-commerce dan inovasi dalam logistik, memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar global dengan lebih efisien, meningkatkan daya saing, serta merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Investasi yang meningkat dalam sektor perdagangan juga memberikan dampak positif yang signifikan. Perbaikan infrastruktur perdagangan dan efisiensi sistem transportasi telah mempercepat aliran barang dan meningkatkan efektivitas distribusi. Hal ini tidak hanya memudahkan pelaku usaha dalam mengelola rantai pasokan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya logistik. Dengan demikian, sektor perdagangan tidak hanya menjadi jembatan antara produsen dan konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kontribusinya tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan Indikator sasaran pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menjadi IKU Kota untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. IKU ini mencakup langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan peran sektor perdagangan

dalam membangun fondasi ekonomi yang tangguh dan menciptakan peluang pertumbuhan jangka panjang.

Pengukuran Capaian Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tergambar pada tabel 3.38 berikut;

Tabel 3.40
Capaian IKU Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023 (%)	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2023-2026	Capaian thn 2024 thdp RPD 2023-2026 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Nilai capaian %			
2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,66	4,28	4,49	104,91	Sangat Tinggi	4,83	92,96

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Indikator untuk Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2024 adalah 104,91%, dari target 4,28 dan realisasi 4,49. Predikat kinerja capaian indikator ini adalah Sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,33% dari 4,66% pada tahun 2023 menjadi 4,49% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPD sebesar 4,83%, maka capaian tahun 2024 berada pada angka 92,96%.

Tabel 3.41
Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Sektor Perdagangan Tahun 2020-2024

Jenis usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	-1,00	3,58	5,55	4,66	4,49

Dari tabel 3.40 diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Kinerja Indikator untuk Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif dari -1,00 pada Tahun 2020 menjadi 4,49 pada Tahun 2024.

Pada tahun 2024, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki peranan terbesar dalam

pembentukan PDRB Kota Payakumbuh, dengan kontribusi sebesar 25,02%. Nilai PDRB Kota Payakumbuh berdasarkan harga konstan 2010 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tercatat sebesar 9.421,00 milyar rupiah. Di antara sektor-sektor yang ada, Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil memberikan kontribusi terbesar sebesar 2.357,52 milyar rupiah.

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator :

1. Sinergitas Program dan Kegiatan
Adanya kolaborasi antara berbagai dinas terkait (Dinas Koperasi dan UKM, Dinas LH, Dinas Ketapang, Dinas PUPR, dan Satpol PP) dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, serta keamanan pasar yang mendukung kestabilan sektor perdagangan
2. Upaya Pemerintah Untuk Kestabilan Harga.
Pemerintah melakukan pasar murah dan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
3. Pemantauan Harga Bahan Pokok.
Pemerintah terus memantau harga bahan pokok guna menghindari lonjakan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat
4. Promosi Produk IKM Lokal.
Promosi produk IKM lokal melalui berbagai event dan bazar nasional yang memberikan ruang untuk mengenalkan produk daerah ke pasar yang lebih luas.
5. Komitmen Kuat Perlindungan Konsumen.
Pemerintah daerah berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan oleh kecurangan perdagangan melalui berbagai sosialisasi.
6. Peningkatan Digitalisasi Dalam Pemasaran Produk lokal
Dilakukannya Bimtek Marketing Digital kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemasaran produk IKM melalui platform online yang menjangkau pasar lebih luas.

Permasalahan:

1. Terjadinya kenaikan harga bahan pokok
2. Keberpihakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri Masih Kurang
3. Keterbatasan Infrastruktur Pasar Tradisional.
4. Kurangnya akses modal bagi pelaku UMKM.
5. Minimnya SDM yang berkualitas.
6. Tantangan dalam digitalisasi dan teknologi.
7. Kurangnya pemasaran yang efektif dan jangkauan pasar yang terbatas
8. Ketergantungan pada produk import

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi :

1. Melakukan pemantauan harga bahan pokok secara berkala.
2. Menyelenggarakan operasi pasar atau pasar murah untuk menstabilkan harga.
3. Melaksanakan pameran dan bazar yang mengikutsertakan produk lokal.
4. Mengadakan Bimtek marketing digital agar produk pelaku usaha dapat dipasarkan melalui platform e-commerce.
5. Mendorong penggunaan e katalog lokal di pemerintah daerah.
6. Revitalisasi dan peningkatan fasilitas pasar tradisional untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan pengunjung.
7. Menyediakan akses pembiayaan dari lembaga keuangan atau pemerintah daerah bagi pelaku UMKM.
8. Pelatihan pengelolaan keuangan dan penyusunan proposal usaha untuk mempermudah akses modal.
9. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk.
10. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan SDM yang kompeten dalam bidang perdagangan.
11. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang digitalisasi dan pemasaran berbasis teknologi.

12. Meningkatkan infrastruktur digital dan akses internet untuk memperluas jangkauan pasar, terutama daerah yang terbatas dalam akses teknologi.
13. Meningkatkan kerjasama dengan platform e-commerce dan memperluas promosi produk melalui pemasaran digital.
14. Membuka akses pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pameran internasional guna memperluas pasar.
15. Mengembangkan produk lokal yang lebih unggul dan berdaya saing melalui riset dan inovasi.
16. Memperkuat kebijakan yang lebih mendukung produk lokal dan meningkatkan keberpihakan pada produk dalam negeri.

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

III. Sasaran Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh

Pemerintah daerah perlu merencanakan investasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi juga sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan investasi dapat menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata. Investasi merupakan salah satu faktor pembentuk penghasilan daerah dan berperan penting dalam menghela roda perekonomian daerah.

Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut.

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, dan akan mempengaruhi iklim investasi suatu daerah dan daya tarik investasi suatu daerah.

Mengingat besarnya dampak pertumbuhan investasi ini bagi perkembangan ekonomi daerah, maka Kota Payakumbuh menjadikan nilai realisasi investasi (milyard Rp) sebagai salah satu sasaran pada RPD kota Payakumbuh tahun 2023-2026. Selanjutnya capaian target indikator investasi ini dapat dilihat dalam Tabel 3.42

Tabel 3.42
Capaian IKU pada Sasaran Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi di Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2023-2026	Capaian tahun 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1.	Nilai Realisasi Investasi (Milyar rupiah)	493.81	225	658,63	292,72	Sangat Tinggi	915	71,98

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat jika kinerja realisasi investasi Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan kategori sangat tinggi. Realisasi ini memberikan sumbangan terhadap akumulusi capaian target 4 (empat) tahun pada RPD Tahun 2023-2026 menjadi sebesar 71,98%.

Tabel 3.43
Perkembangan Capaian Realisasi Investasi tahun 2020-2024 dan akumulasi 1 tahun RPD Tahun 2023-2026

Investasi	Tahun					Target RPD
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target (Milyar Rp.)	198,90	200,90	202,00	220	225	915
Realisasi (Milyar Rp.)	178,30	417,24	203,80	493,81	658,63	658,63
capaian	89.64%	207,69	100,89	224,46%	292,72%	71,98

Sumber : RPD 2023-2026 dan data diolah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Secara time series, perkembangan realisasi investasi Kota Payakumbuh dapat dilihat Tabel 3.43. Dari tabel tersebut terlihat jika rata-rata capaian

realisasi investasi melebihi target dari tahun ke tahunnya. Walaupun perkembangannya berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Artinya potensi investasi Kota Payakumbuh kedepan masih dapat di optimalkan.

Berbagai upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang memadai baik dari sisi pelayanan dan perijinan termasuk kenyamanan dan keamanan bagi investor, namun ternyata realisasi investasi ini belum optimal khususnya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.44
Perkembangan Realisasi Investasi dan
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024*
1	Nilai realisasi investasi (Milyard Rp.)	milyar	178,3	417,24	203,80	493,81	658,63
2	Pertumbuhan ekonomi	%	-1,66	3,58	4,51	4,70	4,53

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2025 dan DPMPSTP Kota Payakumbuh, 2024

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan jika nilai investasi di Kota Payakumbuh meningkat setiap tahunnya dan realisasi investasi dan laju pertumbuhan ekonomi berfluktuatif.

Namun secara umum capaian realisasi investasi Kota Payakumbuh ini rata-rata melebihi target (>100%) setiap tahunnya, dengan besaran yang fluktuatif. Hal ini tentunya merupakan prestasi dan capaian yang perlu di apresiasi.

Selanjutnya sebaran investasi di Kota Payakumbuh pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

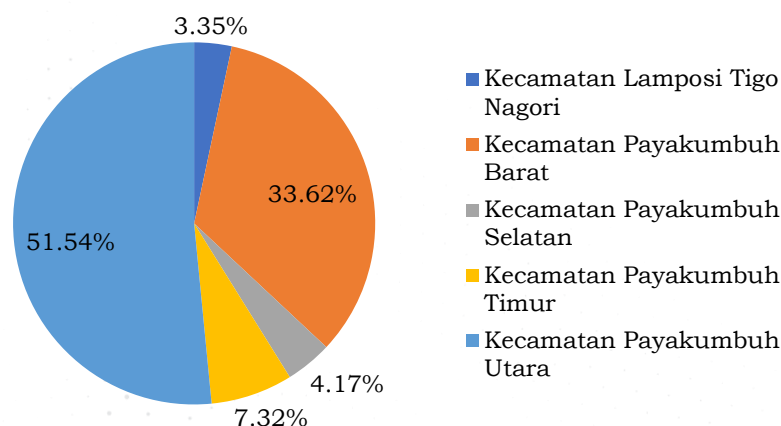
Tabel 3.45
Daftar Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah usaha	Modal (Rp)	%
1.	Kecamatan Payakumbuh Barat	460	22.035.900.009,00	3,35%
2.	Kecamatan Payakumbuh Utara	2753	221.454.993.617,00	33,62%
3.	Kecamatan Payakumbuh Timur	426	27.462.550.003,00	4,17%

4.	Kecamatan Payakumbuh Selatan	864	48.205.119.248,00	7,32%
5.	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	1306	339.473.321.299,00	51,54%
	Total	5809	658.631.884.176,00	100,00 %

Sumber Data : DPMPTSP Tahun 2024

Grafik 3.8
Proporsi Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan pada Tahun 2024



Sumber Data: DPMPTSP tahun 2024

Berdasarkan Tabel dan grafik diatas, investasi terbesar di Kota Payakumbuh berada di Kecamatan Payakumbuh utara dengan nilai investasi sebesar 51,54% diikuti pada urutan kedua adalah Kecamatan Payakumbuh Barat sebesar 33,62%.

Disamping realisasi investasi, beberapa indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur kinerja penanaman modal capaiannya 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46
Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	38	29	6	7	4
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	130,6	90,20	4,18	119.81	5.76
3	Nilai realisasi investasi	Milyar	178,3	417,24	209,39	493.81	658.63
4	Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi	Milyar	-72,3	238,94	-207,85	284,42	164.82

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi investasi yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023, yaitu dari Rp. 493.81 milyar menjadi 658.63 milyar pada tahun 2024, atau terjadi kenaikan sebesar 164.82 milyar.

Untuk mendukung iklim usaha di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan regulasi terkait Izin usaha konstruksi pada tahun 2014 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014) dan regulasi terkait penanaman modal pada tahun 2017 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017) serta Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh.

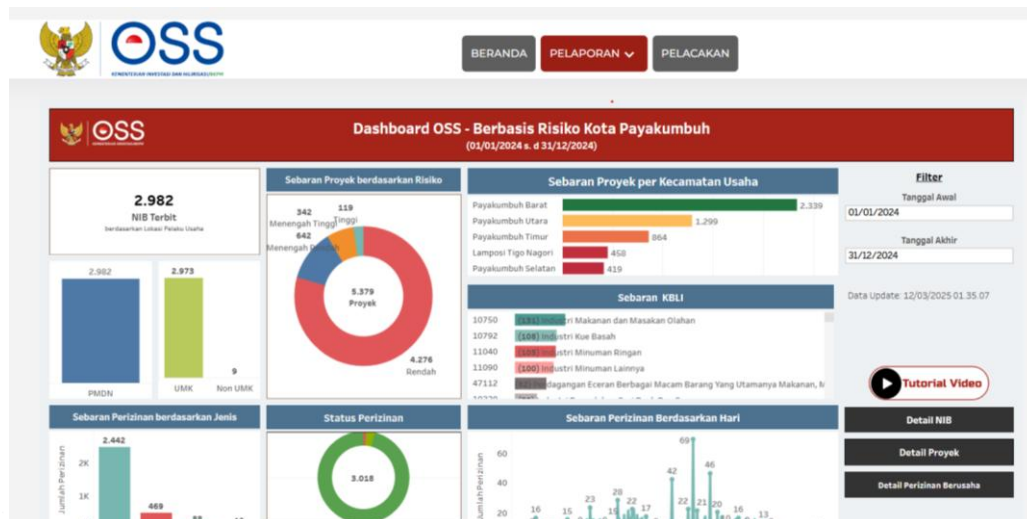
Penyelenggaraan perizinan terpadu di MPP Kota Payakumbuh khususnya terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha sudah terselenggara melalui **Online Single Submission Risk-Based Approach** (OSS RBA-Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) menggantikan versi sebelumnya, yaitu OSS 1.1. Sesuai namanya, OSS-RBA, izin usaha akan dikeluarkan melalui pendekatan risiko, sejak Agustus 2021 hingga saat ini. Penerbitan NIB OSS RBA di kota Payakumbuh sebagaimana tersaji pada Tabel 3.47

Tabel 3.47
Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Aplikasi OSS RBA 2024

No	Tahun	NIB terbit
1	2021	252
2	2022	1.435
3	2023	2.349
4	2024	2.982

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Terdapat peningkatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sangat signifikan sejak penerapan OSS RBA, yaitu sebanyak 1.183 peningkatan NIB dari tahun 2021 ke 2022, dan peningkatan sebanyak 914 NIB dari tahun 2022 ke tahun 2023 serta peningkatan sebanyak 633 di tahun 2024. Data ini tercantum pada beranda aplikasi OSS RBA seperti pada Gambar 3.4



Gambar 3.4

Rekapitulasi penerbitan NIB melalui OSS RBA Tahun 2024

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Untuk pengurusan NIB di Kota Payakumbuh ini didominasi oleh usaha Mikro dan Kecil. Terdapat beberapa perubahan kualitas layanan sejak menggunakan aplikasi OSS RBA yaitu :

1. Pengukuran kecepatan untuk pelayanan untuk penerbitan NIB memerlukan waktu lebih kurang 3 jam apabila tidak ada kendala sistem, penerbitan NIB melalui OSS RBA memerlukan waktu 30 menit untuk usaha mikro Perseorangan dan 60 menit untuk Non Perseorangan;
2. Guna kemudahan pelayanan maka penerbitan NIB dapat dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi di android yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan dapat dilakukan pengisian mandiri, dilaksanakan penerbitan langsung pada saat bimbingan teknis yang difasilitasi DPMPSTP, untuk penerbitan NIB mayoritas di terbitkan di DPMPSTP hanya beberapa yang melakukan pengisian mandiri;





Gambar 3.5

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengurusan NIB Tahun 2024

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

3. Berkaitan dengan transparansi perizinan, petugas menjelaskan semua syarat untuk penerbitan NIB mandiri cukup dengan KTP, email, NPWP dan nomor HP yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp, karena Sistem OSS RBA ini masih baru jadi belum semua perizinan berusaha dapat terakomodir dalam sistem dan aplikasi pendukung untuk entri mandiri hanya berupa **website oss.go.id**;
4. Pengukuran kualitas untuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah sangat baik, Sistem OSS sudah mengakomodir KKPR, izin lingkungan, serta PBUMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjuang Kegiatan Usaha) bagi NIB yang memerlukan sertifikat standar/Izin.;
5. Penggunaan digitalisasi pelayanan terjadi penambahan pelayanan digital untuk menunjang pelayanan digital seperti Pustaka digital yang ada di MPP, disamping aplikasi perizinan yang sudah ada sejak tahun 2021 seperti SICANTIK Cloud, SIMBG, OSS RBA , Sitarang, Aplikasi Antrian di MPP.



Gambar 3.6

Penghargaan atas pelayanan investasi terbaik Nasional

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

6. Penggunaan Aplikasi Sitarang.

Salah satu gagasan cerdas sebagai strategi meningkatkan investasi ini adalah pembangunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG) dilaksanakan berdasarkan analisa permasalahan yang terjadi di Kota Payakumbuh terhadap sistem layanan informasi Rencana Tata Ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK), dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang merupakan data awal bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kota Payakumbuh. Yang terjadi di ota Payakumbuh sebelum adanya inovasi SITARANG adalah, disaat investor sudah mendapatkan izin sering terjadi permasalahan dimana lokasi yang didapat tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan status lahanpun belum ada kejelasan legalitasnya. Rata-rata lahan berstatus ulayat sehingga lahan yang telah di tetapkan tidak bisa dibangun dan merugikan investor tersebut dan akhirnya berakibat enggannya investor khususnya dari luar untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Hal inilah yang menjadi salah satu strategi bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan kepastian informasi yang merupakan prinsip dasar dalam pelayanan pemerintah.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
Setelah Pemanfaatan Peta Digital Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha

SEBELUM		SESUDAH		Keunggulan
1	WAKTU PELAYANAN KRK 14 HARI KERJA	WAKTU PELAYANAN KRK 7 HARI KERJA		Adanya kepastian waktu pelayanan
2	WAKTU PELAYANAN IMB 10 HARI KERJA	WAKTU PELAYANAN IMB 5 HARI KERJA		
3	MASIH MENGGUNAKAN PETA MANUAL SEHINGGA TINGKAT KETELITIAN MASIH RENDAH	TERINTEGRASI DENGAN PETA DIGITAL, BERBASIS TITIK KOORDINAT & PETA BIDANG TANAH BPN		Tidak ada intervensi, akurat, terukur, meminimalisir Kesalahan
4	DOKUMEN PETA BELUM DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	SUDAH DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE		Dapat diakses semua pihak
5	BELUM ADA DATABASE PELAYANAN PENERBITAN	SUDAH MEMPUNYAI DATABASE PETA		Satu Referensi, Satu Standar

Gambar 3.7

SITARANG (Sistem Informasi Penataan Ruang)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya realisasi investasi di Kota Payakumbuh disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Membaiknya perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh, yang membuat investor semakin bergairah berinvestasi di Kota Payakumbuh.
- b) Kegiatan promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh DPM PTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha;
- c) Kemudahan dalam melakukan pengurusan izin usaha yang diberikan oleh DPM PTSP Kota Payakumbuh melalui **Mal Pelayanan Publik (MPP)** menggunakan aplikasi OSS RBA yaitu Pengukuran kecepatan untuk pelayanan untuk penerbitan NIB memerlukan waktu lebih kurang 3 jam apabila tidak ada kendala sistem, penerbitan NIB melalui OSS RBA memerlukan waktu 30 menit untuk usaha mikro Perseorangan dan 60 menit untuk Non Perseorangan;
- d) Terwujudnya penguatan kelembagaan DPMD PTSP yang dibuktikan dengan penghargaan layanan terbaik 1 nasional.
- e) Pembangunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (**SITARANG**) dilaksanakan berdasarkan analisa permasalahan yang terjadi di Kota Payakumbuh terhadap sistem layanan informasi Rencana Tata Ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK), dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang merupakan data awal bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kota Payakumbuh

Permasalahan

Namun demikian, untuk pengembangan investasi di Kota Payakumbuh masih memiliki kendala. Tiga masalah besar yang mengganggu investasi adalah soal tenaga kerja, konflik komunal, dan sengketa tanah. Status tanah ulayat selalu jadi momok oleh investor, ini mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh.

Permasalahan investasi dan penanaman modal secara komprehensif dan perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Payakumbuh antara lain meliputi:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran daerah khususnya potensi investasi;

2. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerja sama dengan investor baik dalam maupun luar negeri;
3. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas;
4. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi;

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Strategi yang dibangun sesuai RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dalam rangka meningkatkan realisasi investasi adalah dengan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi
2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Peningkatan Upaya Promosi Investasi.

Program yang Mendukung Pencapaian Target

- a) Program Promosi Penanaman Modal;
- b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- d) Program Pelayanan Penanaman Modal
- e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2024-2026. Tujuan ini telah diselaraskan dengan Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif.

Guna mencapai tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima.

Untuk masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.48
Sasaran dan Indikator Tujuan 3 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	A	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	76,000	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks SPBE	2,7	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing- masing indikator sasaran pada Tujuan 3 ini diuraikan pada Tabel 3.49

Tabel 3.49
Data Capaian Indikator Sasaran Tujuan 3 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Thn 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	A	BB	95,00	Sangat Baik	A	95,00

2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,433	76,000	71,756	94,42	Sangat Baik	79,000	90,83
3	Indeks SPBE	3,17	2,70	3,75	138,89	Sangat Baik	3,2	117,19
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,52	88,50	88,37	99,85	Sangat Baik	88,80	99,52

Sumber : Kemempnan RB, Kemendagri, Data diolah

Sasaran 7 : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan sasaran Reformasi Birokrasi berupa Birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sejalan dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menargetkan terwujudnya birokrasi kelas dunia pada tahun 2025 dengan ciri tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya guna mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh 2020-2024, perbaikan layanan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu dengan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Akuntabilitas sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Disamping itu, birokrasi bersih dan akuntabel juga nampak pada kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tolak ukur atau indikator yang

digunakan dalam sasaran ini yaitu Nilai Evaluasi AKIP Kota dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.50

Tabel 3.50
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian thn 2026 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	A	BB	95,00	Sangat Baik	A	95,00
2	IPKD	77,43	76,00	71,75	94,42	Sangat Baik	79,00	90,83
Rata-rata					94,71			

Sumber data : Kemenpan RB, Kemendagri, Data diolah 2024

Sasaran meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu :

1. Nilai evaluasi AKIP Kota

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan evaluasi AKIP adalah untuk menilai mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :

- a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e) Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Disamping itu tujuan evaluasi AKIP juga untuk mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Tabel 3.51
Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2020	72,99	BB
2	2021	73,46	BB
3	2022	74,56	BB
4	2023	75,25	BB
5	2024	76,01	BB

Sumber : Kementerian PAN & RB

Berdasarkan evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB tahun 2024 terhadap implementasi SAKIP Kota Payakumbuh, Kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Payakumbuh pada tahun 2024 memperoleh predikat Nilai “BB”, dengan nilai 76,01 dengan rincian sebagai terlihat pada Tabel 3.52:

Tabel 3.52
Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,04
2	Pengukuran Kinerja	30	19,93
3	Pelaporan Kinerja	15	12,86
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,18
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,01
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber : KemenPANRB, 2024

Hasil capaian Evaluasi AKIP dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh termasuk dalam tiga daerah yang telah memperoleh nilai BB. Berikut capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat Tahun 2024.

Tabel 3.53
Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/ Kota
di Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Total Nilai	Kategori
1	Kota Padang	78,68	BB
2	Kota Payakumbuh	76,01	BB
3	Kota Bukittinggi	71,43	BB
4	Kab. Padang Pariaman	71,05	BB
5	Kab. Pesisir selatan	68,94	B
6	Kota Solok	68,59	B
7	Kab. Solok	68,58	B
8	Kab. Tanah datar	67,60	B
9	Kab. Kepulauan Mentawai	65,80	B
10	Kab. Pasaman	63,10	B
11	Kab. Dharmasraya	67,24	B
12	Kab. Sijunjung	65,99	B
13	Kab. Agam	67,11	B
14	Kota Padang Panjang	64,22	B
15	Kota Sawahlunto	63,60	B
16	Kab. Pasaman Barat	63,01	B
17	Kab. Lima Puluh Kota	62,16	B
18	Kab. Solok Selatan	61,30	B
19	Kota Pariaman	57,43	CC
	Prov. Sumatera Barat	78,98	BB

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2024

Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah 95,00% dengan kategori sangat baik. Capaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Walikota Payakumbuh dan telah mengacu kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2024-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja evaluasi AKIP per komponen yang dinilai dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.54
Perbandingan Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh
Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024	Bobot Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,84	25,04	83.47%

2	Pengukuran Kinerja	30	19,73	19,93	66.43%
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60	12,86	85.73%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,08	18,18	72.72%
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,25	76,01	76.01%
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	

Sumber : KemenPANRB, 2024

Sesuai dengan data pada tabel 3.54 diatas, dapat dilihat bahwa secara umum nilai setiap komponen penilaian mengalami peningkatan. Untuk nilai total mengalami peningkatan dari 75,25 pada tahun 2023 menjadi 76,01 pada tahun 2024 atau naik 0,76 poin. Komponen penilaian yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu pada komponen Pelaporan Kinerja, dengan peningkatan 0,26 poin dibandingkan tahun 2023, sedangkan komponen paling rendah peningkatannya yaitu komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan kenaikan 0,10 poin. Namun jika dibandingkan dengan bobot, komponen yang memperoleh bobot tertinggi yaitu komponen Pelaporan Kinerja dengan Bobot 85,73%, selanjutnya komponen Perencanaan Kinerja memperoleh bobot tertinggi kedua yaitu 83,47%, komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 72,72% dan komponen dengan bobot terendah sehingga perlu perhatian lebih adalah komponen pengukuran kinerja dengan bobot 66,43%.

Langkah perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian PAN & RB tahun 2024 akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain :

- a. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu :
 - Akan mereviu kembali atas keselarasan sasaran strategis, program dan kegiatan serta memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja;
 - Melakukan perbaikan dokumen perencanaan mulai dari level Pemda hingga perencanaan level PD dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil, sesuai visi dan misi kepala

daerah terpilih yang menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan. Untuk perbaikan dokumen perencanaan kota, saat ini sedang disusun rancangan teknokratik RPJMD Kota Payakumbuh dan pembahasan lebih lanjut akan dilaksanakan pada saat kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah resmi dilantik.

- b. Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategis. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu :
 - Membentuk Tim SAKIP Kota yang bertugas menyusun dan menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategis.
 - Melakukan pendampingan penyusunan indikator kinerja pada level PD sebagai tindaklanjut penetapan indikator kinerja utama daerah
 - Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja individu yang lebih berorientasi pada kebutuhan organisasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi terutama pada aplikasi pengukuran kinerja.
- c. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan. Hal ini akan dilaksanakan untuk melaksanakan rekomendasi ini antara lain :
 - Melakukan sosialisasi sehingga setiap perangkat daerah diberi pemahaman terkait penjenjangan kinerja sehingga mampu menyempurnakan perencanaan kinerja secara menyeluruh.
 - Melakukan pendampingan penyusunan penjenjang kinerja mulai dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional (pelaksana).
 - Melakukan reviu dan perbaikan terkait penjenjangan kinerja yang telah disusun sebagai pedoman penyempurnaan perencanaan kinerja.

d. Mendorong seluruh PD untuk melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala sehingga tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran saja. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini antara lain :

- Melakukan evaluasi secara berkala baik dalam bentuk rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah maupun kegiatan lainnya terkait pencapaian target kinerja PD yang menjadi indikator kinerja utama Pemerintah Kota Payakumbuh serta ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat evaluasi internal oleh masing-masing PD.
- Melakukan dialog kinerja terhadap target kinerja yang akan diperjanjikan untuk meningkatkan rasa kepemilikan kinerja dan strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut serta *reward and punishment* sesuai komitmen yang dibuat



Gambar 3.8
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

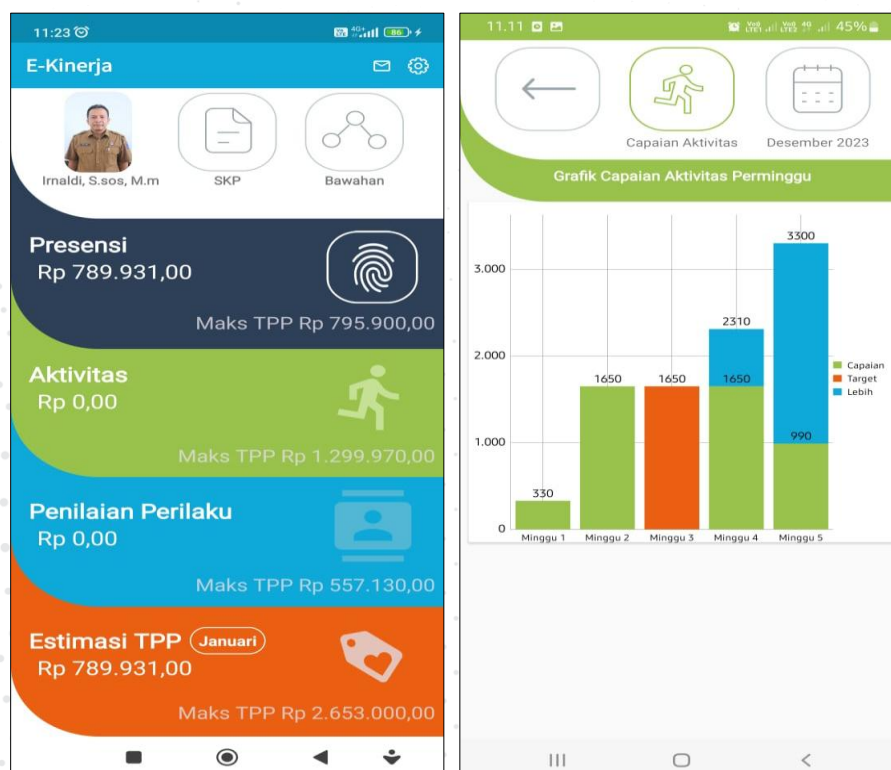


Gambar 3.9
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Penanggulangan Stunting Kota Payakumbuh

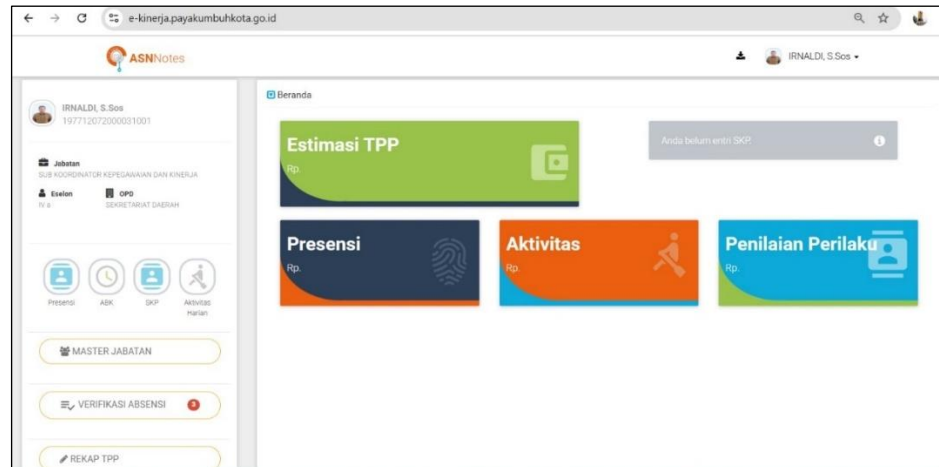
e. Mengoptimalkan aplikasi e-kinerja Kota Payakumbuh sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Kepala Daerah dan PD, sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya.

Langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini antara lain :

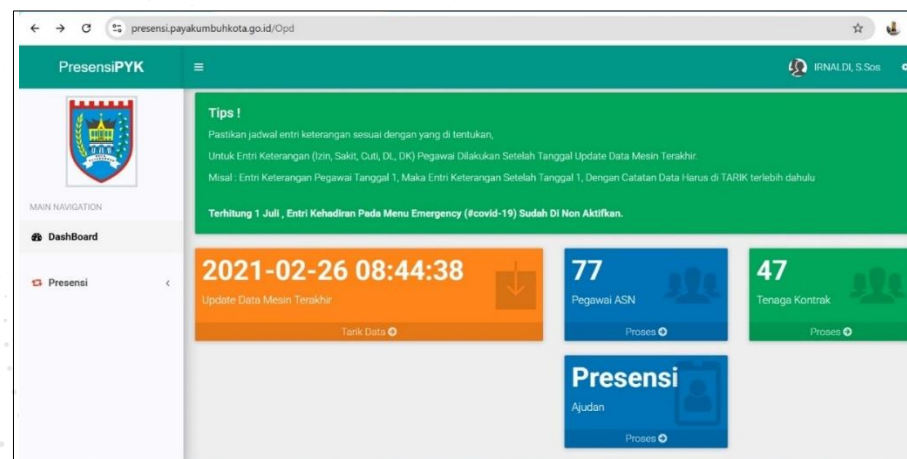
- Aplikasi e-kinerja Kota Payakumbuh telah terintegrasi dengan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) Kota Payakumbuh dan SIPREN-PYK (Sistem Presensi Pegawai Payakumbuh) dan ASN Note yang akunnya dimiliki oleh seluruh pengelola kepegawaian di Kota Payakumbuh.
- Akan melakukan penyesuaian aplikasi e-kinerja untuk menyesuaikan penilaian kinerja terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan sehingga monitoring terhadap pencapaian kinerja individu telah sesuai dengan sistem kerja yang ditetapkan.



Gambar 3.10
Aplikasi e-Kinerja Kota Payakumbuh



Gambar 3.11
Dashboard ASN Note Aplikasi e Kinerja untuk Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah



Gambar 3.12
Dashboard Aplikasi Presensi Kota Payakumbuh komplemen Aplikasi e-Kinerja Kota Payakumbuh

- f. Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu. Langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini antara lain :
- Memberikan reward kepada perangkat daerah dan individu dengan menggunakan berbagai indikator penilaian. Pada aspek penyelenggaraan pelayanan publik telah diberikan reward kepada perangkat daerah yang memperoleh nilai kepatuhan pelayanan publik terbaik. Dalam aspek inovasi daerah juga telah diberikan

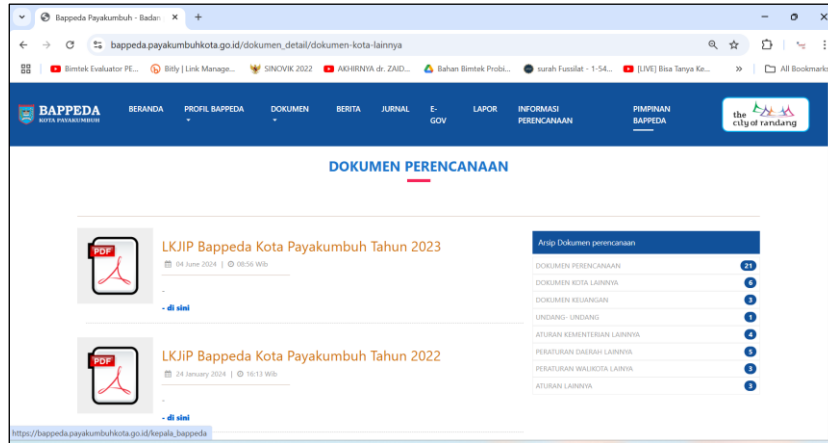
reward kepada perangkat daerah dan individu atas prestasi dan inovasi yang diciptakan. Penghargaan ini dikemas dalam bentuk Inovasi Award Kota Payakumbuh;

- Akan menyusun rancangan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu sehingga dapat memacu peningkatan kinerja individu yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Untuk pemberian *punishment* akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

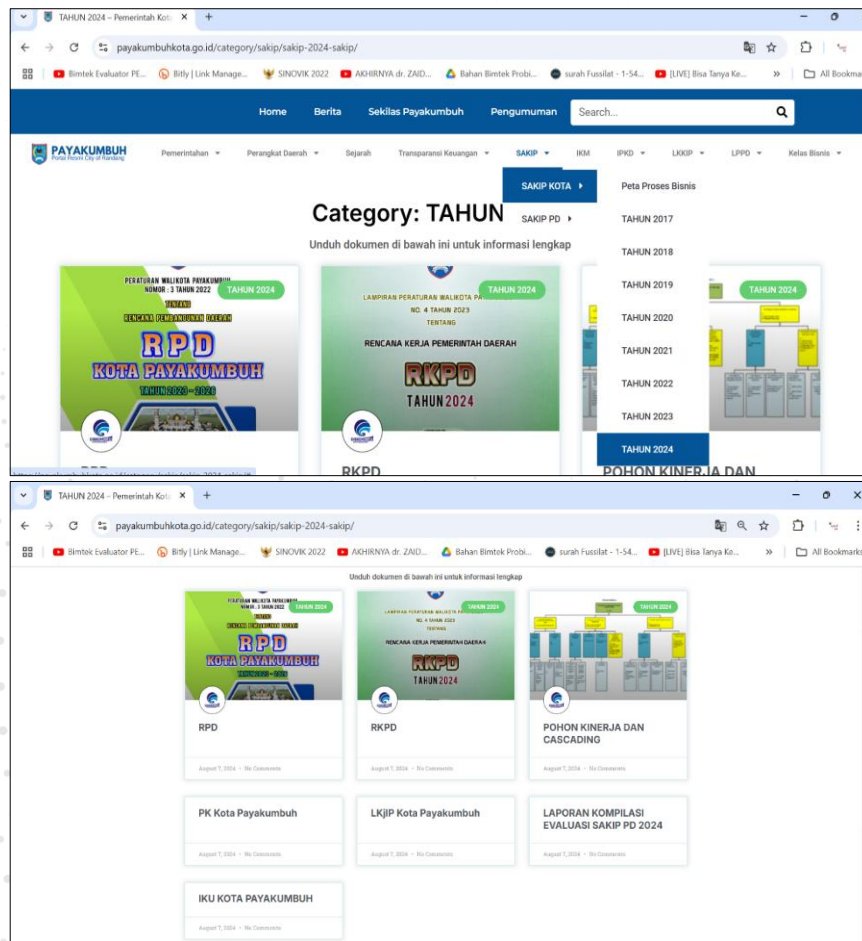


Gambar 3.13
Penyerahan penghargaan ASN Terinovatif pada Anugerah Inovasi Awards Pemerintah Kota Payakumbuh 2024

- g. Menginformasikan Laporan Kinerja baik level Pemda maupun PD dalam website Pemda sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik. Hal ini telah dilakukan dengan menginformasikan Laporan Kinerja level Pemda pada website pemda <https://payakumbuhkota.go.id>. dan Laporan Kinerja PD pada website perangkat daerah yang bersangkutan.



Gambar. 3.14
Informasi Laporan Kinerja di Website PD
[\(https://bappeda.payakumbuhkota.go.id/\)](https://bappeda.payakumbuhkota.go.id/)



Gambar 3.15
Laporan Kinerja yang dipublikasikan pada website
<https://payakumbuhkota.go.id/>

- h. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014, yang memuat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini antara lain dengan :
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja PD yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014;
 - Melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
 - Menganalisis secara mendalam terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan laporan kinerja PD.
- i. Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang. Hal yang akan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu dengan menyusun rancangan kebijakan yang memuat formulasi capaian kinerja sebagai penentuan target kinerja mendatang
- j. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi *real* penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini antara lain :
- Meningkatkan kapasitas evaluator dalam hal ini SDM Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi internal. Dapat dilaksanakan melalui pembelajaran secara mandiri yang dilaksanakan secara daring. Peningkatan kapasitas ini ditandai dengan hasil evaluasi yang lebih tajam dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip *professional judgement*. Hal ini juga terlihat dari Hasil Evaluasi AKIP Perangkat

Daerah Tahun 2024 oleh tim evaluator Inspektorat menunjukkan peningkatan dan hasil yang lebih bervariasi.

- Menyusun rekomendasi hasil evaluasi SAKIP untuk masing-masing PD berdasarkan kondisi *real* sehingga dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD.

Tabel 3.55
Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah se Kota Payakumbuh
Tahun 2023 dan 2024

NO	Perangkat Daerah	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	85,75	A	87,85	A
2	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	90,00	AA	84,25	A
3	Dinas Pertanian	83,00	A	83,50	A
4	Inspektorat	82,30	A	83,00	A
5	Bappeda	81,50	A	82,65	A
6	Dinas Perhubungan	80,50	A	81,8	A
7	Dinas P3A dan P2KB	81,40	A	81,55	A
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	80,10	A	81,20	A
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	80,40	A	81,15	A
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,90	A	81,10	A
11	Dinas Koperasi dan UKM	66,35	B	80,85	A
12	Dinas Ketahanan Pangan	69,00	B	80,75	A
13	Dinas Kesehatan	83,50	A	80,50	A
14	Kecamatan Payakumbuh Utara	79,15	BB	80,25	A
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75,35	BB	80,20	A
16	Kecamatan Payakumbuh Selatan	78,00	BB	80,00	BB
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73,55	BB	79,30	BB
18	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	70,90	BB	78,40	BB
19	Kantor Kesbangpol	71,50	BB	78,15	BB
20	Dinas Lingkungan Hidup	74,50	BB	77,90	BB
21	BPBD	76,00	BB	77,65	BB
22	Kecamatan Payakumbuh Barat	70,60	BB	77,40	BB
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	72,70	BB	77,20	BB

24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,90	BB	75,20	BB
25	Kecamatan Payakumbuh Timur	76,80	BB	73,20	BB
26	Sekretariat DPRD	70,30	BB	72,95	BB
27	Sekretariat Daerah	69,70	B	72,40	BB
28	Badan Keuangan Daerah	62,00	B	71,90	BB
29	Dinas Pendidikan	77,15	BB	70,50	BB
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	68,70	B	70,50	BB
31	Dinas Sosial	63,80	B	70,30	BB
	Rata-Rata	76,04	BB	78,50	BB

Sumber : Inspektorat Kota Payakumbuh

k. Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;

Langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini antara lain :

- Perangkat daerah menyusun tindaklanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi internal;
 - Melakukan monitoring tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah ditetapkan PD
 - Mengevaluasi hasil tindaklanjut rekomendasi apakah telah dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan
1. Membuat kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level PD. Hal-hal yang akan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi ini antara lain :
- Membentuk tim penyusunan kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal.
 - Melakukan studi komparatif atau Pelaksanaan *Sharing Knowledge/Benchmarking* dengan daerah yang telah mempunyai kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal.

- Menyusun kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal dengan indikator yang jelas dan terukur serta instrumen pendukungnya.

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator :

1. Komitmen pimpinan perangkat daerah dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing;
2. Mengupayakan internalisasi nilai-nilai SAKIP dan menjadikannya budaya kerja bagi setiap personil pada setiap unit kerja
3. Terdapat *reward and punishment* terhadap pencapaian kinerja masing-masing individu yang terintegrasi dalam aplikasi e-kinerja pemerintah Kota Payakumbuh;
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola SAKIP dan pendampingan serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur Peningkatan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Tujuan pengukuran IPKD antara lain :

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
3. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota;
4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik;
5. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Terdapat 6 dimensi dalam pengukuran IPKD yaitu :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15%, menggunakan indikator :
 - 1) Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
 - 2) Kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS
 - 3) Kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD
 - 4) Kesesuaian pagu RKPD dan KUA-PPAS
 - 5) Kesesuaian pagu KUA-PPAS dan APBD
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD dengan bobot 20%, menggunakan indikator :
 - 1) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD;
 - 2) Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan minimal 10% dari APBD;
 - 3) Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer minimal 25% dari DTU
 - 4) Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai Perundang-undangan
3. Transparansi Keuangan Daerah dengan bobot 15%, menggunakan indikator :
 - 1) Ketepatan waktu pengungkapan
 - 2) Keteraksesan
4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 20%, menggunakan indikator :
 - 1) Belanja Transfer Daerah
 - 2) Belanja Operasional
 - 3) Belanja Modal
 - 4) Belanja Tak Terduga
5. Kondisi Keuangan Daerah dengan bobot 15%, menggunakan indikator :
 - 1) Kemandirian keuangan;
 - 2) Solvabilitas jangka panjang;
 - 3) Fleksibilitas keuangan;
 - 4) Solvabilitas layanan;
 - 5) Solvabilitas Operasional;

- 6) Solvabilitas jangka menengah.
6. Opini BPK atas LKPD dengan bobot 15%, menggunakan pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK terhadap LPKD selama 3 tahun berturut-turut.

Hasil pengukuran IPKD dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi kemampuan keuangan tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan hasil pengukuran meliputi Peringkat Baik dengan nilai A, Peringkat Perlu Perbaikan dengan nilai B dan Peringkat Sangat Perlu Perbaikan dengan nilai C. Kota Payakumbuh termasuk dalam kelompok Kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah memperoleh peringkat perlu perbaikan dengan nilai B .

Berdasarkan hasil pengukuran pada setiap dimensi, tahun 2024 Kota Payakumbuh memperoleh nilai 71.756 dan telah memperoleh nilai maksimal pada 1 dimensi yaitu dimensi 6 Opini BPK atas LKPD. Sedangkan untuk 5 dimensi lainnya masih perlu ditingkatkan terutama dimensi 5 yaitu Kondisi Keuangan Daerah yang hanya memperoleh nilai 5.388 dari 15 poin maksimal. Kondisi keuangan Daerah adalah kemampuan Keuangan suatu Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif. Rincian nilai per dimensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.56
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Uraian	Bobot	Nilai
1	Dimensi 1	15	9.586
2	Dimensi 2	20	15
3	Dimensi 3	15	13.448
4	Dimensi 4	20	13.333
5	Dimensi 5	15	5.388
6	Dimensi 6	15	15
	Total IPKD	100	71.756

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2024

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan nilai IPKD Kota Payakumbuh berada di posisi 76.000 dengan realisasi 71.756 dengan

capaian kinerja 94,42% atau kategori **Sangat Baik**. IPKD Kota Payakumbuh memperoleh nilai B dengan predikat Perlu Perbaikan. Capaian tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 77.433 atau turun 5.655 poin dari tahun 2023. Nilai IPKD Kota Payakumbuh lebih rendah dari rata-rata nasional IPKD Kota dengan Kemampuan Keuangan Rendah, dimana rata-rata IPKD sebesar 71.866 dengan standar deviasi 7.288. Nilai ini merupakan nilai rata-rata IPKD dari 28 Kota dengan Kemampuan Keuangan Rendah. Secara nasional Kota Payakumbuh menempati posisi delapan belas Hasil pengukuran IPKD Kota seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Rendah”. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat menempati posisi ketigabelas dari sembilan belas kabupaten Kota Se Sumatera Barat. Hasil pengukuran IPKD untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.57
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten / Kota se Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	IPKD	Peringkat	Nilai
1	Kab. Dharmasraya	85.848	Baik	A
2	Kab. Pasaman Barat	78.643	Perlu Perbaikan	B
3	Kab. Solok	78.124	Perlu Perbaikan	B
4	Kab. Pasaman	76.423	Perlu Perbaikan	B
5	Kab. Padang Pariaman	75.862	Perlu Perbaikan	B
6	Kab. Pesisir selatan	75.331	Perlu Perbaikan	B
7	Kab. Tanah datar	75.200	Perlu Perbaikan	B
8	Kab. Solok Selatan	74.911	Perlu Perbaikan	B
9	Kota Padang	74.157	Perlu Perbaikan	B
10	Kab. Agam	74.029	Perlu Perbaikan	B
11	Kota Pariaman	73.494	Perlu Perbaikan	B
12	Kota Solok	72.047	Perlu Perbaikan	B
13	Kota Payakumbuh	71.756	Perlu Perbaikan	B
14	Kota Sawahlunto	70.785	Perlu Perbaikan	B
15	Kab. Kepulauan Mentawai	69.007	Perlu Perbaikan	B
16	Kab. Sijunjung	67.924	Perlu Perbaikan	B
17	Kab. Lima Puluh Kota	67.583	Perlu Perbaikan	B
18	Kota Bukittinggi	66.663	Perlu Perbaikan	B

19	Kota Padang Panjang	63.197	Sangat Perlu Perbaikan	C
	Provinsi Sumatera Barat	77.697	Perlu Perbaikan	B

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2024

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja IPKD pada tahun 2024 yaitu :

- Pada dimensi 1 terkait keseuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, masih rendahnya kesesuaian pagu antara RKPD dan KUAPPAS dan kesesuaian pagu KUAPPAS dengan APBD;
- Pada dimensi 2 terkait Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD pada indikator Alokasi jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 25% dari Dana Transfer Umum, pengalokasian anggaran untuk belanja infrastruktur memperoleh nilai nol karena tidak memenuhi kriteria minimal 25% dari total belanja APBD Kota Payakumbuh;
- Pada dimensi 3 Transparansi Keuangan Daerah, ada 6 dokumen yang mendapat 0 pada indikator keteraksesan;
- Pada dimensi 4 Penyerapan Anggaran memiliki skor rendah karena penyerapan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) tidak mencapai penyerapan 80%;
- Pada dimensi 5 rendah karena Pendapatan Asli Daerah menurun sedangkan total beban operasional dan belanja pegawai meningkat sehingga semua nilai pada indikator ini menurun.

Rencana aksi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator di atas antara lain :

1. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIPD RI;
2. Penetapan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah serta didukung oleh komitmen dari seluruh *stakeholder* untuk melaksanakannya;
3. Membangun komitmen antara Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya dalam meningkatkan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

4. Penerapan pemberian *reward and punishment* bagi seluruh pejabat pengelola keuangan dan aset di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh;
5. Melakukan optimalisasi pajak daerah melalui pemutakhiran basis data wajib pajak, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengotimalkan penerapan sistem pemungutan pajak melalui digitalisasi pembayaran pajak;
6. Melakukan evaluasi berjenjang terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh OPD agar terlaksana secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mempedomani seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Kota dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Program Perekonomian dan Pembangunan;
5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
6. Program Pengelolaan Arsip;
7. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
8. Program Perizinan Penggunaan Arsip;
9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Program Pengelolaan BMD;
13. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
14. Program Kepegawaian Daerah;
15. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

17. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
18. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
19. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
20. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Etika Serta Budaya Politik, Pendidikan Politik Dan Pengembangan;
21. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
22. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
23. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sasaran 8 : Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel merupakan tujuan yang dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah. Guna mendukung dan menjamin terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan langkah-langkah dan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan berkelanjutan, melakukan penilaian mandiri terhadap kepatuhan standar pelayanan publik dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit pelayanan publik di Kota Payakumbuh. Disamping itu juga meningkatkan pelayanan publik dengan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima merupakan salah satu sasaran untuk mewujudkan tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Tolak ukur atau indikator yang digunakan dalam sasaran ini yaitu Indeks SPBE dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.58

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian thn 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Indeks SPBE	3,17	2,70	3,75	138,89	Sangat Baik	3,2	117,19
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,52	88,50	88,37	99,85	Sangat Baik	88,80	99,52
Rata-rata					119,37			

Sumber data : Kementerian PANRB, Data diolah 2024

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks SPBE

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik yang prima, salah satu tolak ukur yang digunakan adalah bagaimana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur hal ini adalah Indeks SPBE. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Secara umum Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada instansi pemerintah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pemerintah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks SPBE. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen berupa 47 indikator pada 4 (empat) domain dan 8 Aspek SPBE. Dengan struktur penilaian terdiri dari :

- 1). Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot nilai untuk setiap domain sebagai berikut :

Tabel 3.59
Bobot Nilai Evaluasi SPBE untuk setiap Domain

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5
Aspek 8 – Layanan Publik	18%

Sumber : KemePANRB 2025

Dalam penilaian indeks SPBE dilakukan pada setiap indikator kegiatan/ aktifitas yang disertai data dukung sebagai bukti terlaksananya kegiatan tersebut. Nilai indeks SPBE diberikan untuk masing-masing indikator dalam domain dan aspek penilaian. Kategori dari nilai indeks SPBE dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.60
Kategori Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 ≤ 4,2	Sangat Baik
3	2,6 ≤ 3,5	Baik
4	1,8 ≤ 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpan RB No 59 Tahun 2020

Hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 mencerminkan kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan nilai Indeks SPBE Kota Payakumbuh berada di posisi 2,70 dengan realisasi 3,75 dengan capaian kinerja 138,89% atau kategori **Sangat**

Baik. Indeks SPBE 3,75 menggambarkan Predikat Sangat Baik Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penerapan SPBE. Capaian tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,17 atau naik 0,58 poin dari tahun 2023.

Tabel 3.61
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Kota Payakumbuh Tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2020	2,89	Baik
2	2021	2,42	Cukup
3	2022	3,02	Baik
4	2023	3,17	Baik
5	2024	3,75	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PANRB

Berdasarkan data sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.61 dapat dilihat bahwa Indeks SPBE Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021, dimana tahun 2020 indeks SPBE 2,89 dan turun menjadi 2,42 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian instrumen penilaian, dimana sebelumnya menggunakan 37 indikator menjadi 47 indikator. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun mulai tahun 2022 Indeks SPBE Kota Payakumbuh meningkat cukup signifikan, hingga Tahun 2024 yaitu 3,75. Rincian hasil penilaian SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.62.

Tabel 3.62
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Kota Payakumbuh Tahun 2024

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,75
Domain Kebijakan SPBE	3,30
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,30
Domain Tata Kelola SPBE	3,40
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,50

<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,88
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	4,57
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,40
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,83

Sumber : Kementerian PANRB, 2024

Selanjutnya lebih rinci, hasil penilaian SPBE Kota Payakumbuh berdasarkan tingkat kematangan untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.63 berikut ini.

Tabel 3.63
Nilai Tingkat Kematangan Indikator
Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Domain/ Aspek/ Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
I	Domain Kebijakan SPBE	
A	Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
II	Domain Tata Kelola SPBE	
B	Aspek Perencanaan Strategis SPBE	
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3

No	Domain/ Aspek/ Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
C	Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
D	Aspek Penyelenggaraan SPBE	
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
III	Domain Manajemen SPBE	
E	Aspek Penerapan Manajemen SPBE	
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5
F	Aspek Pelaksanaan Audit TIK	
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
IV	Domain Layanan SPBE	
G	Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
H	Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5

No	Domain/ Aspek/ Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber : Kementerian PANRB, 2024

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diuraikan kekuatan dan kelemahan hasil evaluasi SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2024 untuk setiap aspek pada domain, antara lain :

a. Aspek Kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE

Pada aspek ini Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan reviu dan evaluasi secara periodik terhadap Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Layanan Pusat Data.

b. Aspek Perencanaan Strategis SPBE

Pada aspek ini Pemerintah Kota Payakumbuh sudah melakukan reviu terhadap Inovasi Proses Bisnis SPBE, telah melakukan pemutakhiran dan terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Proses Bisnis SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan evaluasi

c. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan reviu terhadap Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra tetapi belum terdapat upaya perbaikan berkelanjutan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

d. Aspek Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan adanya Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

e. Aspek Penerapan Manajemen SPBE

Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap indikator 28 - Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melakukan perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan/evaluasi secara berkesinambungan, namun dalam pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko belum mengacu pedoman yang berlaku, pelaksanaan Penerapan Manajemen Aset TIK belum

mengacu pada pedoman yang berlaku (belum menggambarkan output seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK), pelaksanaan Penerapan Manajemen Pengetahuan belum mengacu pada pedoman yang berlaku, pelaksanaan Manajemen Perubahan belum mengacu pada pedoman yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah.

f. Aspek Audit TIK

Pemerintah Kota Payakumbuh belum melaksanakan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan.

g. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik sudah dipenuhi dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

h. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, dan beberapa Layanan Publik Sektoral.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh secara prinsip telah menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPBE Tahun 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh akan berupaya untuk meningkatkan tingkat kematangan penerapan SPBE berupa :

- 1) Melakukan audit infrastruktur SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan BRIN.
- 2) Melakukan audit aplikasi untuk aplikasi umum dan aplikasi khusus. Audit Aplikasi Umum dilakukan 1 kali dalam 1 tahun oleh BRIN, sedangkan audit Aplikasi Khusus dilakukan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, dengan melakukan koordinasi dengan BRIN.

- 3) Melakukan audit keamanan untuk keamanan infrastruktur dan keamanan aplikasi. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN). Audit Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan Kemenkominfo). Audit Keamanan Aplikasi umum (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN). Audit Keamanan Aplikasi khusus (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan Kemenkominfo).
- 4) Melakukan penerapan Manajemen Risiko yang tertuang di dalam Peta Rencana SPBE. Penerapan Kompetensi SDM SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE. Penerapan Manajemen Risiko SPBE berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE.
- 5) Merencanakan program kerja dan kegiatan Manajemen Aset TIK yang dituangkan pada Peta Rencana SPBE IPPD. Pelaksanaan Manajemen Aset TIK berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- 6) Melengkapi penerapan Manajemen Perubahan yang tertuang di dalam Peta Rencana SPBE. Penerapan Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Perubahan (KemenPANRB).

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja secara nasional, Indeks SPBE Kota Payakumbuh berada diatas rata-rata nasional, dimana Indeks SPBE nasional hanya 3,12 dan rata-rata indeks SPBE tingkat Kota secara nasional hanya 3,39. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 secara nasional dapat dilihat pada Tabel 3.64

Tabel 3.64
Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Tahun 2024

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10

Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Sumber : Kementerian PANRB, 2024

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Sumatera Barat, menempati posisi ketiga. Berikut hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat Tahun 2024.

Tabel 3.65
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat
Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Indeks SPBE	Predikat
1	Kab. Pesisir selatan	4.23	Memuaskan
2	Kota Padang	3.96	Sangat Baik
3	Kota Payakumbuh	3.75	Sangat Baik
4	Kota Solok	3.75	Sangat Baik
5	Kab. Pasaman Barat	3.66	Sangat Baik
6	Kab. Dharmasraya	3.61	Sangat Baik
7	Kab. Padang Pariaman	3.51	Sangat Baik
8	Kab. Solok	3.49	Baik
9	Kota Pariaman	3.44	Baik
10	Kota Sawahlunto	3.41	Baik
11	Kab. Solok Selatan	3.28	Baik
12	Kota Padang Panjang	3.16	Baik
13	Kab. Sijunjung	3.00	Baik
14	Kab. Tanah datar	2.81	Baik
15	Kab. Lima Puluh Kota	2.70	Baik
16	Kab. Pasaman	2.67	Baik
17	Kab. Agam	2.56	Cukup
18	Kota Bukittinggi	2.49	Cukup
19	Kab. Kepulauan Mentawai	2.46	Cukup
	Provinsi Sumatera Barat	3.85	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PANRB, 2024

Program capaian untuk mendukung indikator sasaran Indeks SPBE tahun 2024 :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
5. Program Pengelolaan Arsip;
6. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dapat dilihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks ini digunakan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pelaksanaan SKM dapat dilaksanakan secara mandiri oleh instansi penyelenggara pelayanan maupun oleh pihak lain, sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa “penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala”. Dalam penjelasan Undang-Undang Pelayanan Publik disampaikan juga bahwa penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan/ atau pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan SKM secara mandiri oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan dan juga SKM dengan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas. Pelaksanaan SKM berpedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, kinerja unit pelayanan dapat diukur dengan standar sebagaimana terlihat pada Tabel 3.66

Tabel 3.66
Kategori Penilaian Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Permen PANRB No. 14 Tahun 2017

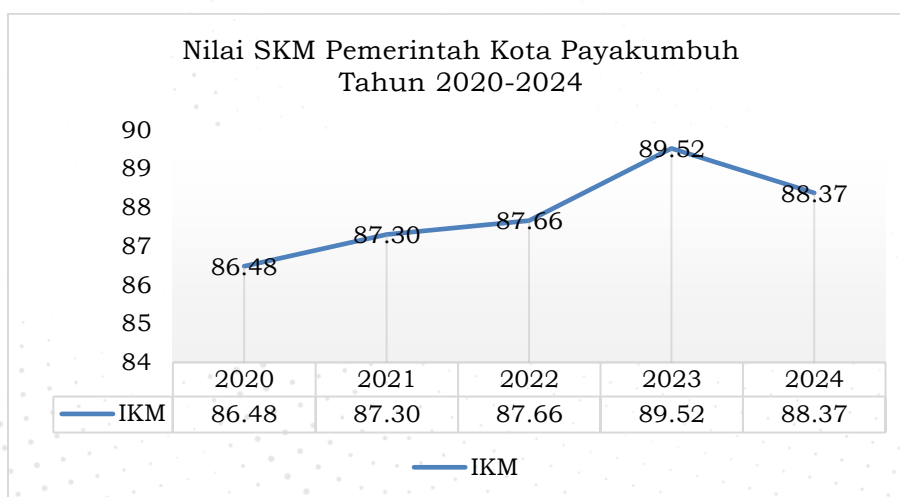
Pelaksanaan SKM secara mandiri dilaksanakan secara berkala per semester oleh seluruh perangkat daerah dan unit kerja pelayanan publik yang terdiri dari 31 perangkat daerah, 8 kecamatan, 1 RSUD, dan 1 Perumda Air Minum Tirta Sago. Hasil SKM mandiri ini akan dikompilasikan oleh Bagian Organisasi dan menghasilkan nilai IKM Kota Payakumbuh. Target Nilai IKM Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 -2026.

Pelaksanaan SKM Semester I dilakukan secara manual sedangkan untuk SKM Semester II Tahun 2024 dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi SKM milik Kementerian PANRB, dimana Kota Payakumbuh merupakan salah satu lokus yang ditunjuk sebagai Instansi Implementasi Aplikasi SKM tersebut. Hasil kompilasi SKM Kota Payakumbuh Semester I yaitu 89,84 dan Semester II menunjukkan nilai IKM Kota Payakumbuh sebesar 86,90 dengan rata-rata nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2024 yaitu sebesar 88,37 dengan predikat A.

Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun 2024 sebesar 88,37 dengan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**. Capaian Nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2024 lebih rendah dari yang ditargetkan 88,50 sehingga capaian nilai IKM Kota Payakumbuh sebesar 99,85%. Hasil ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 1,15 poin dimana pada tahun 2023 rata-rata nilai IKM Kota Payakumbuh 89,52. Penurunan nilai IKM pada tahun 2024 disebabkan oleh metode pelaksanaan SKM yang berubah dari manual menjadi online pada SKM Semester II 2024. Disamping itu, pada

pelaksanaan SKM Semester II 2024 hanya dilaksanakan pada 1 jenis layanan pada masing-masing UPP dan periode pelaksanaan hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Meskipun demikian, hasil pelaksanaan SKM online pada semester II 2024 dinilai lebih berintegritas dan akurat karena pengisian kuesioner oleh responden langsung terhubung ke aplikasi, tidak ada pengolahan data manual oleh unit kerja sehingga lebih meminimalisir kesalahan atau manipulasi data hasil SKM.

Nilai IKM Kota Payakumbuh menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024, namun secara umum masih dalam kategori Sangat Baik. Nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2019 hingga tahun 2024 yang dilakukan melalui suvei mandiri dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Grafik 3.9
Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 s/d 2024

Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.67

Tabel 3.67
Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2024		Rata- Rata Nilai IKM 2024	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	89.59	89.00	89.29	A
2	Sekretariat DPRD	85.45	98.44	91.94	A

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2024		Rata- Rata Nilai IKM 2024	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
3	Inspektorat	92.14	85.73	88.93	A
4	Dinas Pendidikan	92.24	83.78	88.01	B
5	Dinas Kesehatan	90.77	78.89	84.83	B
6	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	92.66	83.15	87.90	B
7	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	86.84	96.93	91.89	A
8	Satuan Pol PP & Pemadam Kebakaran	90.55	93.12	91.83	A
9	Dinas Sosial	90.13	99.50	94.82	A
10	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian	98.72	77.78	88.25	B
11	DP3AP2KB	91.48	78.69	85.08	B
12	Dinas Ketahanan Pangan	86.45	84.71	85.58	B
13	Dinas Lingkungan Hidup	91.71	95.83	93.77	A
14	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	96.21	94.02	95.11	A
15	Dinas Perhubungan	90.52	90.66	90.59	A
16	Dinas Komunikasi & Informatika	92.02	86.30	89.16	A
17	Dinas Koperasi & UKM	86.49	84.44	85.47	B
18	DPMPTSP	97.77	93.57	95.67	A
19	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	87.16	81.53	84.35	B
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	87.45	86.17	86.81	B
21	Dinas Pertanian	89.05	87.44	88.24	B
22	Bappeda	89.96	89.70	89.83	A
23	Badan Keuangan Daerah	88.15	84.14	86.14	B
24	BKPSDM	88.31	91.11	89.71	A
25	Kecamatan Payakumbuh Barat	92.54	85.92	89.23	A
26	Kecamatan Payakumbuh Utara	91.21	88.22	89.72	A
27	Kecamatan Payakumbuh Timur	91.93	89.17	90.55	A
28	Kecamatan Payakumbuh Selatan	91.62	82.22	86.92	B
29	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	91.68	90.69	91.19	A
30	BPBD	92.13	80.06	86.10	B
31	Kesbangpol	90.08	92.69	91.39	A
32	RSUD dr. Adnaan WD	92.74	81.11	86.93	B

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM 2024		Rata- Rata Nilai IKM 2024	
		Semester I	Semester II	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
33	Puskesmas Ibh	94.73	84.42	89.57	A
34	Puskesmas Tarok	79.99	82.00	80.99	B
35	Puskesmas Parit Rantang	80.57	88.06	84.31	B
36	Puskesmas Lampasi	85.96	82.67	84.31	B
37	Puskesmas Tiakar	88.94	80.92	84.93	B
38	Puskesmas Air Tabit	92.85	85.97	89.41	A
39	Puskesmas Payolansek	83.24	78.56	80.90	B
40	Puskesmas Padang Karambia	88.33	89.39	88.86	A
41	PDAM Tirta Sago	82.96	86.12	84.54	B
Rata-rata Nilai SKM Kota Payakumbuh		89.84	86.90	88.37	A

Sumber : Bagian Organisasi

Disamping melaksanakan pengukuran nilai IKM secara mandiri, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melaksanakan SKM bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kredibilitas dan reputasi di bidang penelitian dan survei yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas. Pelaksanaan SKM oleh LPPM Universitas Andalas pada tahun 2024 dilakukan pada 19 (sembilan belas) unit kerja di Kota Payakumbuh yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 4) Dinas Penanaman Modal & PTSP
- 5) Dinas Sosial
- 6) RSUD dr. Adnaan WD
- 7) Puskesmas Padang Karambia
- 8) Puskesmas Ibh
- 9) Puskesmas Parit Rantang
- 10) Puskesmas Payolansek
- 11) Puskesmas Tarok
- 12) Puskesmas Lampasi
- 13) Puskesmas Air Tabit
- 14) Puskesmas Tiakar

- 15) Kecamatan Payakumbuh Timur & Kelurahan
- 16) Kecamatan Payakumbuh Utara & Kelurahan
- 17) Kecamatan Payakumbuh Selatan & Kelurahan
- 18) Kecamatan Payakumbuh Barat & Kelurahan
- 19) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori & Kelurahan

Hasil pelaksanaan SKM oleh LPPM Universitas Andalas menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kota Payakumbuh merasakan pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sudah berkategori **Sangat Baik**, hal ini tercermin pada nilai SKM yang diberikan oleh masyarakat pada 19 UKPP diberikan grade A, dengan nilai rata-rata IKM 93,88. Nilai IKM hasil SKM LPPM Unand untuk 19 UKPP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.68
Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh
Tahun 2024 oleh LPPM Universitas Andalas

No	Unit Kerja	Nilai 2024	Predikat
1	Kec. Payakumbuh Timur	97.86	A
2	Kec. Payakumbuh Barat	97.82	A
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97.17	A
4	Kec. Payakumbuh Selatan	96.58	A
5	Puskesmas Lampasi	95.42	A
6	Kec. Lamposi Tigo Nagori	95.06	A
7	Dinas Sosial	94.67	A
8	RSUD dr. ADNAN WD	94.41	A
9	Kec. Payakumbuh Utara	93.92	A
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93.38	A
11	Puskesmas Tarok	93.19	A
12	Puskesmas Payolansek	92.89	A
13	Puskesmas Padang Karambia	92.83	A
14	Puskesmas Air Tabit	92.74	A
15	Puskesmas Tiakar	92.59	A
16	Puskesmas Ijuh	92.01	A
17	Puskesmas Parit Rantang	91.98	A
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	89.91	A
19	Dinas Pendidikan	89.21	A

No	Unit Kerja	Nilai 2024	Predikat
	Rata-Rata Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2024	93.88	A

Sumber : LPPM Unand Tahun 2024

Berdasarkan hasil data kualitatif yang diperoleh dari pelaksanaan SKM oleh LPPM Unand, budaya masyarakat dalam mengakses layanan publik masih lebih mengedepankan kedekatan individu/personal daripada sistem yang telah terbangun. Dari perspektif masyarakat, faktor inilah yang mendominasi dan membuat masyarakat sangat puas dalam mengakses layanan. Akan tetapi dari perspektif administratif pemerintahan, hal ini sangat tidak dibenarkan karena selain akan memunculkan diskriminasi, perilaku ini justru tidak mendidik masyarakat untuk taat terhadap aturan. Perilaku layanan tersebut bukanlah perilaku layanan yang responsif terhadap upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi.

Secara umum pencapaian nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2024 menggunakan hasil SKM yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Andalas telah melebihi target kinerja yang ditetapkan, dimana target IKM Tahun 2024 88,50 dan hasil SKM LPPM Universitas Andalas sebesar 93,88 dengan capaian kinerja 106,08%. Sedangkan jika berdasarkan rata-rata nilai IKM Kota Payakumbuh dari hasil SKM Mandiri dan SKM oleh LPPM Unand, nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar 91,13 dengan capaian 102,97%. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit Perbandingan hasil pelaksanaan SKM Mandiri dengan hasil SKM oleh LPPM Unand dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.69
Perbandingan Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2024
Berdasarkan SKM Mandiri dan LPPM Universitas Andalas

No	Indikator Kinerja	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian thn 2024 thdp RPD (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	IKM Mandiri	88,50	88,37	99,85	Sangat Baik	88,80	99,52
2	IKM oleh LPPM Unand	88,50	93,88	106,08	Sangat Baik	88,80	105,72
Rata-rata IKM			91,13	102,97	Sangat Baik		102,62

Sumber : Bagian Organisasi (data diolah)

Dalam mengukur kualitas pelaksanaan pelayanan publik yang prima, disamping menggunakan survei kepuasan masyarakat, juga dinilai dari hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian PANRB. Hasil dari evaluasi ini adalah Indeks Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota berdasarkan Aspek :

1. Kebijakan pelayanan yang terdiri dari Standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat.
2. Profesionalisme SDM.
3. Sarana Prasarana yang terdiri dari ketersediaan sarpras, kelayakan sarpras, sarpras berkebutuhan khusus.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang terdiri dari ketersediaan SIPP elektronik dan non elektronik, kepemilikan situs dan pemutakhiran data.
5. Konsultasi dan pengaduan yang terdiri dari media dan dokumentasi konsultasi dan pengaduan.
6. Inovasi pelayanan.

Penentuan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 dilaksanakan dengan melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri terhadap 3 (tiga) lokus baru terkait layanan barang, layanan jasa dan layanan administrasi. Unit kerja yang dijadikan lokus PEKPPP Mandiri adalah Dinas Sosial untuk layanan barang, RSUD untuk lokus layanan jasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lokus administrasi. Lokus evaluasi layanan barang ditujukan untuk mengukur kualitas pelayanan yang berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap bantuan sosial, layanan jasa untuk mengukur kualitas pada penyelenggaraan layanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu dan layanan administrasi untuk mengukur penyelenggaraan layanan publik yang dekat dengan masyarakat. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 merupakan nilai hasil PEKPPP yang telah dilakukan validasi oleh Kementerian PANRB.

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2024 yaitu sebesar 4,50 dengan predikat A-, kategori Sangat Baik dengan 2 lokus telah memperoleh predikat Pelayanan Prima yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 4,51 (Predikat A), untuk RSUD dr. Adnaan WD memperoleh nilai 4,48 dengan Predikat A- Sangat Baik. Nilai IPP Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana rata-rata nilai Kota Payakumbuh tahun 2023 sebesar 4,41 (Predikat A-/sangat baik). Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dari tahun 2019 s.d 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 3.70

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun	Nilai IPP	Predikat	Kategori	Lokus Penilaian
1	2020	4,24	A-	Sangat Baik	DPMPTSP, Disdukcapil
2	2021	4,39	A-	Sangat Baik	DPMPTSP, Disdukcapil
3	2022	4,56	A	Pelayanan Prima	DPMPTSP, Disdukcapil
4	2023	4,41	A-	Sangat Baik	Dinas Sosial , RSUD, Kec. Payakumbuh Timur
5	2024	4,50	A-	Sangat Baik	Dinas Sosial , RSUD, Disdukcapil

Sumber : Kementerian PANRB

Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh tahun 2024 berada pada urutan ke-26 dari seluruh Kota di Indonesia dan menempati posisi pertama untuk wilayah Sumatera Barat. Rincian nilai IPP untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.71

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2024

No	Kabupaten/ Kota	Dinas Sosial		RSUD		Disdukcapil		Rata-Rata	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai IPP	Predikat
1	Kota Payakumbuh	4.51	A	4.48	A-	4.51	A	4.50	A-
2	Kab. Pesisir selatan	4.53	A	4.39	A-	4.47	A-	4.46	A-
3	Kab. Solok	4.51	A	4.32	A-	4.55	A	4.46	A-
4	Kab. Sijunjung	4.41	A-	4.42	A-	4.25	A-	4.36	A-
5	Kota Pariaman	4.22	A-	4.21	A-	4.21	A-	4.32	A-

No	Kabupaten/ Kota	Dinas Sosial		RSUD		Disdukcapil		Rata-Rata	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai IPP	Predikat
6	Kab. Padang Pariaman	4.23	A-	4.47	A-	4.17	A-	4.29	A-
7	Kab. Lima Puluh Kota	4.52	A	4.32	A-	3.96	B	4.27	A-
8	Kab. Tanah datar	3.86	B	4.40	A-	4.53	A	4.26	A-
9	Kota Padang Panjang	3.51	B	4.45	A-	4.45	A-	4.17	A-
10	Kab. Pasaman	3.68	B	4.16	A-	4.54	A	4.13	A-
11	Kota Bukittinggi	3.62	B	4.44	A-	4.44	A-	4.13	A-
12	Kota Solok	3.90	B	N/A	N/A	4.26	A-	4.08	A-
13	Kab. Solok Selatan	3.52	B	4.22	A-	3.77	B	3.84	B
14	Kab. Pasaman Barat	3.57	B	3.16	B-	3.77	B	3.50	B-
15	Kota Padang	2.98	C	3.52	B	3.68	B	3.44	B-
16	Kab. Kepulauan Mentawai	3.41	B-	3.49	B-	2.9	C	3.27	B-
17	Kab. Agam	3.26	B-	3.82	B	2.66	C	3.25	B-
18	Kab. Dharmasraya	4.20	A-	2.41	C-	3.03	B-	3.21	B-
19	Kota Sawahlunto	2.67	C	3.09	B-	3.77	B	3.18	B-

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2024

Disamping mengikuti PEKPPP Nasional yang diikuti oleh 3 unit lokus evaluasi, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2024 juga melaksanakan PEKPPP Instansional/ PEKPPP Mandiri. Pelaksanaan PEKPPP mandiri ditargetkan pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Namun sehubungan dengan keterbatasan sumber daya baik dari segi SDM selaku tim evaluator maupun waktu pelaksanaan PEKPPP Mandiri, maka hanya difokuskan ke beberapa unit kerja saja. Hasil PEKPPP Mandiri yang telah disampaikan ke Kementerian PANRB pada tahun 2024 terdiri dari 10 Unit Lokus Evaluasi. Hasil PEKPPP Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 000.8.3.4/8.76.261/Setda-Pyk/2024 tentang Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 26 November 2024. Nilai

IPP untuk masing-masing unit kerja hasil PEKPPP Mandiri tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.72
Indeks Pelayanan Publik Unit Kerja Kota Payakumbuh
Hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah / Unit Kerja	F-02	F-03	IPP Final	Predikat
1	DPMPTSP	3.50	1.17	4.67	A (Pelayanan Prima)
2	Puskesmas Ibh	3.23	1.07	4.30	A- (Sangat Baik)
3	BKD	3.10	1.15	4.25	A- (Sangat Baik)
4	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian	3.07	1.17	4.24	A- (Sangat Baik)
5	Puskesmas Padang Karambia	3.07	1.17	4.24	A- (Sangat Baik)
6	Dinas Perhubungan	2.92	1.17	4.09	A- (Sangat Baik)
7	Setdako	2.93	1.11	4.04	A- (Sangat Baik)
8	KESBANGPOL	2.74	1.17	3.91	B (Baik)
9	BAPPEDA	2.77	1.10	3.87	B (Baik)
10	SATPOL PP & DAMKAR	2.76	1.10	3.86	B (Baik)
	IPP Kota Payakumbuh	3.01	1.14	4.15	A- (Sangat Baik)

Sumber : Bagian Organisasi Kota Payakumbuh Tahun 2024

Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik. Terdapat tiga isu yakni menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan, dan penyelenggaraan pelayanan secara *online*. Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain, penyempurnaan regulasi pelayanan publik, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan. Penghargaan kategori pelayanan prima bagi Kota Payakumbuh adalah suatu bentuk apresiasi tertinggi dari Pemerintah Pusat untuk daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan juga berkaitan

langsung dengan pelayanan yang dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh.



Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghadirkan pelayanan prima sesuai kebijakan pusat untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan publik. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur guna percepatan pelayanan publik dilaksanakan melalui digitalisasi operasional Mal Pelayanan Publik.

Disamping itu, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh juga memperoleh penghargaan dari Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana pada tahun 2024 penilaian diperluas tidak hanya pada pemenuhan Standar Pelayanan Publik namun juga pada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Penilaian Tahun 2024 lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik mulai dari input, proses hingga output dan dampak pelayanan publik. Berdasarkan penilaian tersebut, Kota Payakumbuh memperoleh nilai kepatuhan 91,41 pada zona hijau, kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi. Hasil penilaian ini menempatkan Kota Payakumbuh pada urutan pertama tingkat kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2024 untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada pada Tabel 3.73

Tabel 3.73

Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Kategori	Zona/ Opini
1	Kab. Solok	97.73	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
2	Kota Payakumbuh	97.60	A	Zona Hijau

No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Kategori	Zona/ Opini
				Kualitas Tertinggi
3	Kab. Agam	95.48	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
4	Kota Padang Panjang	94.46	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
5	Kota Padang	93.67	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
6	Kab. Tanah datar	93.51	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
7	Kab. Pesisir selatan	92.70	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
8	Kab. Pasaman	91.23	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
9	Kab. Dharmasraya	91.14	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
10	Kota Pariaman	90.98	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
11	Kota Solok	90.49	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
12	Kab. Padang Pariaman	89.86	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
13	Kota Bukittinggi	89.55	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
14	Kota Sawahlunto	89.46	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
15	Kab. Lima Puluh Kota	89.44	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
16	Kab. Sijunjung	89.33	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
17	Kab. Pasaman Barat	88.85	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
18	Kab. Kepulauan Mentawai	88.42	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
19	Kab. Solok Selatan	87.06	B	Zona Kuning Kualitas Sedang
	Provinsi Sumatera Barat	91.65	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi

Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator di atas antara lain :

1. Komitmen pemerintah Kota Payakumbuh mulai dari pimpinan hingga unit kerja untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan pelayanan prima;
2. Tersedianya Mal Pelayanan Publik yang representatif sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh;

3. Kesadaran unit kerja pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi pelayanan publik.;
4. Kerjasama semua *stakeholder* terkait baik dari segi kebijakan maupun dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik;

Program yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
5. Program Penanggulangan Bencana;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik;
7. Program Pendaftaran Penduduk;
8. Program Pencatatan Sipil;
9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
12. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
13. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Tujuan 4 : Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- c. Meningkatnya kualitas penataan kota

Tujuan Pembangunan ini diarahkan pada pembangunan dan penataan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sistem pemerintahan yang mengembangkan penataan kota melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat karena dalam penciptaan inklusivitas perekonomian daerah tak lepas juga dari konektivitas adanya infrastruktur yang tersedia baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dikarenakan infrastruktur ini sebagai jembatan dalam aksesibilitas pergerakan alur distribusi dari perekonomian yang ada.

Di samping itu juga untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan memelihara cadangan air melalui penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, dan mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Apapun bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan haruslah memperhatikan dampak terhadap lingkungan, seoptimal mungkin diupayakan pembangunan tidak menimbulkan kerusakan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup dan sebaliknya dengan pembangunan justru kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial Kota Payakumbuh akan semakin baik dan meningkat kualitasnya. Oleh karena itu segala upaya yang dilakukan dalam penataan kota, penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum adalah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup bukan sebaliknya. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup digunakan indikator kinerja yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environment Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, (2) Kualitas Udara dan (3) Kualitas Tutupan Lahan. Kriteria dan parameter untuk masing-masing indikator perhitungan IKLH sebagai berikut ini.

Tabel 3.74
Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH

No	Komponen Indeks	Parameter	Rumus
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Derajat keasaman (pH) Kebutuhan oksigen biologi (BOD) Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) Oksigen terlarut (DO)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_K}{2}}$ <p>Dimana</p> <ul style="list-style-type: none"> L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_j : $(C_i/L_{ij}, C_2/L_{2j}, \dots)$ $(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_i/L_{ij} $(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}$: nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}

No	Komponen Indeks	Parameter	Rumus
		Padatan tersuspensi total (TSS) Nitrat (NO ₃ -N) Total Fosfat (T-Phospat) Fecal Coliform (Fecal Coli)	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Sulfur Dioksida (SO ₂) Nitrogen Dioksida (NO ₂)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi • Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tutupan Hutan (TH) Tutupan Vegetasi Non Hutan (TnH)	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>di mana</p> <p>LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK= dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p> $W \text{ Kanal di lindung} = 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH \text{ FLG Kanal} + (BH \text{ FLG Kanal} + BL \text{ FLG Kanal}) \times 0,6}{\text{Luas FLEG}}$ $W \text{ Kanal di budi daya} = 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH \text{ FBG Kanal} + (BH \text{ FBG Kanal} + BL \text{ FBG Kanal}) \times 0,6}{\text{Luas FBEG}}$ $W \text{ terbakar di lindung} = 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH \text{ FLG Bakar} + (BH \text{ FLG Bakar} + BL \text{ FLG Bakar}) \times 0,6}{\text{Luas FLEG}}$ $W \text{ terbakar di budi daya} = 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH \text{ FBG Bakar} + (BH \text{ FBG Bakar} + BL \text{ FBG Bakar}) \times 0,6}{\text{Luas FBEG}}$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Perhitungan Capaian Indikator

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan menggunakan rumusan di bawah ini :

$$IKLH \text{ Kota} = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Cara Perolehan Data

1. **Data IKA** diperoleh dari hasil uji kualitas pada badan air yaitu di Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua.
2. **Data IKU** diperoleh dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler.

3. **Data IKL** diperoleh dari citra satelit yakni tentang luas wilayah Kota Payakumbuh yang tertutup vegetasi.

I. Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2024 Kota Payakumbuh dengan Perhitungan Indeks Kualitas vegetasi air dilakukan dengan mengambil 32 sampel uji kualitas air pada 7 (tujuh) sungai yang melintas di Kota Payakumbuh yaitu Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua. Dengan hasil uji sebagaimana Tabel 3.75 dan Tabel 3.76.

Tabel 3.75
Hasil Perhitungan Pencemaran Bagi Peruntukan Sungai di Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Nama Sungai	IPJ	Status
1	Sungai Batang Agam	3,35	Cemar Ringan
2	Sungai Batang Lampasi	3,74	Cemar Ringan
3	Sungai Batang Sikali	5,08	Cemar Ringan
4	Sungai Batang Pulau	4,58	Cemar Ringan
5	Sungai Tembok Jua	3,72	Cemar Ringan
6	Sungai Talang	4,55	Cemar Ringan
7	Sungai Baih	4,53	Cemar Ringan

Tabel 3.76
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang memenuhi mutu air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	0	0%	70	0
Ringan	32	100%	50	45,261
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	32	100%	-	45,261
Indeks Kualitas Air				45,26

Sumber : Hasil Analisis IKA Kota Payakumbuh, 2024

Berdasarkan hasil uji Kualitas Air yang telah dilakukan di Kota Payakumbuh dengan titik sampling sebanyak 32 di mana didapatkan hasil Kualitas air di

Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni yakni 45,26 di kategorikan Indeks Kualitas Air = **Kurang**, hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak juga daerah hulu karena Kota Payakumbuh merupakan daerah perlintasan sungai.

Tabel 3.77
Indeks Kualitas Air Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IKA	Keterangan
1	Kota Pariaman	37.78	
2	Kota Bukittinggi	37.00	
3	Kota Payakumbuh	45.26	Kurang
4	Kabupaten Solok Selatan	62.86	
5	Kabupaten Dharmas Raya	51.11	
6	Kabupaten Solok	51.18	
7	Kabupaten Sijunjung	44.85	
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	61.92	
9	Kabupaten Pasaman	50.00	
10	Kabupaten Pesisir Selatan	69.64	
11	Kabupaten Padang Pariaman	53.53	
12	Kabupaten Tanah Datar	40.71	
13	Kota Sawah Lunto	38.57	
14	Kota Solok	38.57	
15	Kabupaten Pasaman Barat	43.75	
16	Kota Padang	69.09	
17	Kabupaten Agam	65.00	
18	Kota Padang Panjang	47.21	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan Indeks Kualitas Udara diambil dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler. Nilai IKU Kota Payakumbuh ini merupakan kontribusi dari data kualitas udara ambien yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.78 berikut;

Tabel 3.78
Indeks Kualitas Udara Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IKU	KETERANGAN
1	Kota Pariaman	94.38	
2	Kabupaten Pesisir Selatan	94.26	
3	Kabupaten Solok	94.49	
4	Kabupaten Solok Selatan	93.44	
5	Kabupaten Sijunjung	93.72	
6	Kabupaten Tanah Datar	91.82	
7	Kabupaten Padang Pariaman	93.06	
8	Kabupaten Agam	94.80	
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	93.65	
10	Kabupaten Pasaman	92.40	
11	Kabupaten Kepulauan Mentawai	93.24	
12	Kabupaten Dharmas Raya	91.97	
13	Kabupaten Pasaman Barat	93.44	
14	Kota Solok	91.09	
15	Kota Sawah Lunto	93.06	
16	Kota Padang Panjang	89.08	
17	Kota Bukittinggi	89.85	
18	Kota Payakumbuh	87.59	
19	Kota Padang	87.80	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh pada tahun 2024 berada di angka 87,59 = **Baik** merupakan angka yang berada di urutan ke tujuh dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kota dan di peringkat ke 17 (dua belas) di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya tapi masih dalam kategori dapat dikendalikan, namun ini perlu menjadi perhatian bagaimana mengendalikan polusi udara di Kota Payakumbuh kedepannya.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan diperoleh dari analisis foto citra satelit terhadap tutupan vegetasi. Data ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang setiap tahun melakukan penghitungan

IKL Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada tabel 3.73:

Tabel 3.79
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IKL	Ket
1	Kabupaten Agam	50.18	
2	Kabupaten Dharmas Raya	42.55	
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	94.45	
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	62.42	
5	Kabupaten Padang Pariaman	42.02	
6	Kabupaten Pasaman	75.41	
7	Kabupaten Pasaman Barat	41.82	
8	Kabupaten Pesisir Selatan	70.00	
9	Kabupaten Sijunjung	64.00	
10	Kabupaten Solok	77.41	
11	Kabupaten Solok Selatan	71.05	
12	Kabupaten Tanah Datar	58.59	
13	Kota Bukittinggi	36.88	
14	Kota Padang	71.78	
15	Kota Padang Panjang	61.70	
16	Kota Pariaman	32.00	
17	Kota Payakumbuh	27.50	
18	Kota Sawah Lunto	38.85	
19	Kota Solok	44.43	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota pada tahun 2027 diangka 27,50 = **Kurang** , mengalami penurunan sebesar 0,13 dari tahun sebelumnya ini diakibatkan banyaknya permintaan pemangkasan pohon dan tanaman di sepanjang jalan di Kota Payakumbuh yang membahayakan bangunan dan pengguna jalan, namun Kota Payakumbuh selalu komit dalam pelaksanaan gerakan penanaman pohon serta peningkatan Ruang Terbuka (RTH) setiap tahunnya untuk mengimbangi perkembangan permukiman.

Analisis Capaian Indikator

Dengan telah diperolehnya angka untuk Indeks Kualitas Air (IKA) adalah **45,26** Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah **87,59** dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) adalah **27,50** maka perhitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ \text{IKLH} &= (0,376 \times 45,26) + (0,405 \times 87,59) + (0,219 \times 27,50) \\ \text{IKLH} &= 17,02 + 35,47 + 6,03 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel diatas, maka **nilai IKLH** adalah **58,52**

Tabel 3.80
Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian 2023	2024				Target Akhir RPD	Capaian tahun 2024 terhadap Akhir RPD (%)
		Target	Realisasi	Capaian%	Kategori		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,50	58,26	58,52	100,45	Sangat Tinggi	58,28	100,41

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 58,52, bila dibandingkan dengan target tahun 2024 dengan target pada RPD sebesar 58,26 capaiannya IKLH pada tahun 2024 adalah 100,45% dan capaian bila dibandingkan dengan target Akhir masa RPD capaiannya sebesar 100,41% dengan kategori **sangat tinggi**.

Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengklasifikasian peringkat IKLH disusun secara Nasional berdasarkan Nilai IKA, IKU dan IKL . Predikat IKLH dikategorikan beberapa kategori sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 3.81 berikut :

Tabel 3.81
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 90

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
2	Baik	70 < IKLH < 90
3	Sedang	50 < IKLH < 70
4	Buruk	25 < IKLH < 50
5	Sangat Buruk	30 < IKLH < 25

Sumber : Permen LHK nomor 27 Tahun 2021

Dengan melihat perbandingan angka IKLH Payakumbuh Tahun 2024 dengan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan, maka Nilai IKLH sebesar **58,52** berada pada Predikat **SEDANG**.

II. Capaian Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan

Dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap
2. Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan

Kenyamanan suatu kota membutuhkan kelengkapan infrastruktur yang memadai sebagai pendukung aktivitas masyarakatnya termasuk konektivitas antar wilayah. Konektivitas yang baik adalah terciptanya integrasi antara jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota sampai ke jalan lingkung sehingga mampu meningkatkan pembangunan cakupan wilayah administratif perkotaan yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat secara merata di seluruh pelosok Kota Payakumbuh. Infrastruktur jalan yang memadai memudahkan distribusi barang dan jasa. Akses jalan yang lancar membantu pelaku usaha, petani, pedagang dan pelaku industri kreatif dalam kelancaran distribusi produk ke pangsa pasar yang berdampak meningkatnya pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Rencana dan pembangunan jalan tidak terlepas dari usulan kebutuhan masyarakat yang disampaikan salah satunya melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan jalan kota mempedomani aturan pelaksanaannya, antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Infrastruktur Perkotaan juga merupakan salah satu ketersediaan fasilitas umum yang memberikan layanan dan penunjang kegiatan masyarakat. Untuk itu perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan beroperasi dalam kondisi baik. Infrastruktur Perkotaan yang terbangun di Kota Payakumbuh antara lain: jalan, drainase kota dan lingkungan, trotoar jalan, penataan kawasan Batang Agam, beserta pengadaan tanah secara bertahap, termasuk persiapan dan perencanaan teknisnya.

Kemudian untuk meningkatkan giat olah raga masyarakat telah dibangun GOR Nan Ompek di kawasan Batang Agam dan Payakumbuh Bugar di Kawasan Padang Kaduduak. Fasilitas olahraga yang dibangun sudah mendukung beberapa cabang olah raga, seperti: sepakbola, tenis, badminton, basket, sepatu roda, tenis meja, beladiri, dan atletik. Sarana olahraga yang dilengkapi secara bertahap diharapkan mampu meningkatkan prestasi atlet Kota Payakumbuh.

Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha meningkatkan kenyamanan masyarakat beraktivitas pada pusat perbelanjaan (pasar) melalui penataan pusat perdagangan, antara lain; kawasan Pasar Pusat dan kawasan Pasar Ibu, serta kawasan Pasar Pusat di Padang Kaduduak, sehingga dengan meningkatnya kenyamanan pusat perdagangan diharapkan mendorong perekonomian masyarakat. Kebutuhan akan tersedianya sarana ibadah berupa Masjid Agung Kota Payakumbuh, telah dilaksanakan pembebasan lahan dan secara bertahap dilengkapi dengan dokumen persiapan dan perencanaannya sehingga Masjid Agung Kota Payakumbuh dapat tersedia.

Peningkatan taraf ekonomi petani juga ditunjang dengan operasional irigasi yang terpelihara dengan baik dan mencukupi kebutuhan air pada kawasan daerah irigasi. Sejalan hal diatas pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat Payakumbuh terus dilengkapi, pada pemenuhan layanan air minum, layanan limbah rumah tangga, dan layanan persampahan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.82
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	85,01	85,76	85,82	100,07	Sangat tinggi	87,52	98,06
2	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	71,98	74,20	71,98	97,01	Sangat tinggi	77,78	92,54

Sumber : Hasil Analisis 2024

III. Capaian Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penataan Kota

Indikator Sasaran : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kota Payakumbuh sebagai pusat dari perekonomian wilayah kota dan *hinterland* Kabupaten 50 Kota sudah seharusnya untuk ditata dan dilakukan pembenahan. Karena semakin baik penataan dari sebuah kota maka berbagai sistem yang terdapat di dalamnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Manfaat dari adanya tata kelola perkotaan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social. Ketika sarana dan prasarana yang sudah terpenuhi dapat memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakatnya. Maka, tata kota yang telah direncanakan, dikelola dan diatur dapat dikatakan berhasil. Bukan hanya masyarakat yang menjadi sejahtera akan tetapi tampilan kota akan lebih terlihat rapi dan memberikan suasana nyaman.

Dasar hukum dalam pelaksanaan pencapaian kinerja indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mempedomani aturan :

1. Undang-Undang Republik Indonesai No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

Tata kota memiliki beberapa tujuan agar dapat membuat berbagai pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan maksimal. Tujuan dari tata kota bisa disimak berikut ini diantaranya:

1. Menjadikan ruang wilayah nasional aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
2. Menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia.
3. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
4. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota.
5. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara seimbang dan tepat. Demi mendukung peningkatan dari kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tujuan ini maka, perencanaan tata kota akan lebih jelas dan terarah. Sehingga perkembangan dan kemajuan dari sebuah kota yang diharapkan dan ditargetkan dapat tercapai. Bukanlah sebuah hal yang mudah namun, proses penataan harus bisa terus untuk dilakukan.

Tabel 3.83
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Penataan Kota

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2024 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,24	80,36	80,36	100	Sangat tinggi	80,62	99,68

Sumber : Hasil Analisis 2024

Pencapaian target kinerja Tujuan **Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan** dengan indikator Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari 3 sasaran, tahun 2024 didukung oleh :

- a. Dukungan **Dinas Lingkungan Hidup** melalui **9 (sembilan) Program**
 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 8. Program Pengelolaan Persampahan
 9. Program Penangana Pengaduan Lingkungan Hidup
- b. Dukungan **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** melalui **4 (empat) Program**
 1. Program Pengembangan Perumahan
 2. Program Kawasan Permukiman
 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- c. Dukungan **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** melalui **11 (sebelas) Program**
 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 10
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1
 3. Program Pengembangan Permukiman 6
 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 2
 5. Program Penataan Bangunan Gedung 8
 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 5
 7. Program Penyelenggaraan Jalan 4
 8. Program Penatagunaan Tanah 11

9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 10. Program Pengembangan Jasa Kostruksi
 11. Program Penyelesaian Tanah Garapan
- d. Dukungan **Dinas Perhubungan** melalui **1 (satu) Program**
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permasalahan

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh tahun 2024 jika dibandingkan pada target yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 telah melebihi, namun cenderung menurun dari tahun sebelumnya dan jika dilihat dari IKLH Propinsi Sumatera Barat masih jauh. Beberapa permasalahan yang mungkin jadi penyebab IKLH mengalami penurunan adalah :

1. Dari tiga indikator yang menjadi agregat pembentuk IKLH, Indikator Kualitas Udara, Indikator Kualitas Tutupan Lahan dan Indikator Kualitas Air pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2022. Untuk sampel yang diambil sama dengan taun 2024 yakni 7 sungai sampel yang diambil sebanyak 32 titik dimana yang merupakan tercemar sedang, secara indeks mengalami kenaikan namun masih ada status tercemar ringan dan sedang. Dari pengamatan dilapangan masih ditemukan di beberapa titik yang berdekatan dengan sempadan sungai terdapat beberapa industri-indutri kecil pengolahan makanan dan perbengkelan yang masih belum melakukan pengolahan terhadap limbahnya.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat pelaku industri kecil menengah maupun industri rumah tangga dan pelaku usaha perbengkelan dan cucian mobil dan motor tentang pentingnya penanganan limbah yang mereka hasilkan dari aktivitas usaha mereka.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan pengolahan sampah rumah tangga, sehingga belum mampu mengurangi timbunan sampah serta pemilahan sampah dari sumber rumah tangga secara simultan.
4. Masih banyaknya terdapat *septictank* yang belum kedap, sehingga

masih berpotensi mencemaran air tanah dan air sungai.

5. Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah hulu diluar wilayah Kota Payakumbuh, sehingga mempengaruhi mutu air di Payakumbuh karena Kota Payakumbuh merupakan daerah perlintasan sungai.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Terkait dengan capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2024 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, diperlukan beberapa rekomendasi perbaikan yang bisa dijadikan sebagai pedoman kinerja ditahun mendatang, antara lain :

1. Peningkatan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran.
2. Meningkatkan peran Masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran air serta pelaksanaan pengelolaan air limbah.
3. Penyiapan fasilitas pengukuran kualitas air dan kualitas udara yang terstandarisasi dan terakreditasi sehingga dapat menghasilkan data ukuran yang absah. Hal ini menjadi dasar berpijak dalam pengembangan lualitas air dan udara di beberapa titik di wilayah kota Payakumbuh.
4. Peningkatan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.
5. Penguatan sumber daya manusia yang mengelola kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pendidikan serta latihan.
7. Perlunya peningkatan pemahaman pelaku industri pengolahan makanan skala IKM dan pelaku usaha perbengkelan dan cuci motor tentang penanganan limbah yang mereka hasilkan agar tidak sampai mencemari air permukaan.
8. Peningkatan pemahaman masyarakat untuk tetap menjaga kualitas udara dan kualitas air, menyiapkan resapan-resapan yang baik, membudayakan penanaman kembali pepohonan di lahan-lahan masyarakat untuk mendapatkan tutupan lahan yang semakin baik.
9. Menyiapkan program-program konservasi di Dinas Terkait secara berkesinambungan.

10. Peningkatan pembangunan *Septictank* aman dan kedap sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
11. Koordinasi dan Kerjasama dengan Pusat serta daerah hulu Sungai untuk pengelolaan Sungai dan berkaitan dengan pencemaran Sungai.

Gambar 3.16
Beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup selama tahun 2024



Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas LH melakukan Gerakan penanaman pohon seribu pohon bersama Forkopimda



Pemerintah Kota Payakumbuh Melalui Dinas Perkim melakukan pembangunan Tank Septic Aman



Pengelolaan Lumpur Tinja di IPLT Kota Payakumbuh yang dikelola Dinas Perkim



Operasional TPS3R Bantuan BPPW Sumatera Barat Kementerian PUPR



Penyediaan bibit pohon



Pengadaan Mesin Pencacah Sampah di TPS3R Koto Tangah



Pengadaan Septic tank Individu



Pelatihan pengelolaan sampah menjadi organik dan pupuk di TPS3R Koto Tengah



Momentum hari Peduli Sampah Nasional Bersama Pj. Walikota



Kegiatan Pengawasan terhadap Usaha



Sosialisasi Pengelolaan Persampahan



Komitmen bersama pengelolaan sampah



Sosialisasi Pengelolaan Persampahan untuk masyarakat dan aparatur



Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Unand dan Semen Padang berkaitan dengan Pengelolaan sampah



Kegiatan Pengambilan sampel uji kualitas air



Kegiatan Pengujian Kualitas Udara



Bangunan Alat pemantau kualitas air di Sungai Batang Agam



Alat Onlimo pemantau kualitas air



Gotong royong pengumpulan sampah disepanjang Sungai Batang Agam



Apel Bersama dan Gotong Royong bersama praja IPDN



Kegiatan Drainase dilengkapi trotoar yang nyaman



Jalan Protokol Sudirman



Kegiatan Rehabilitasi Irigasi Permukaan



Pembangunan landscape Kantor Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan Dinas Sosial



GOR Nan Ompek di Kawasan Sungai Batang Agam



Sarana Olahraga Payakumbuh Bugar



Pasar Pusat Kota Payakumbuh



Pasar Tradisional Ibh



Kegiatan Rencana Mesjid Agung



Kegiatan Penataan RTH Kawasan Batang Agam



Geliat Senam Sehat di RTH Batang Agam



Monumen Patung Kudo



Pusat Kota tertata rapi terlihat malam hari

Tujuan V : Meningkatnya tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

Pembangunan tata kehidupan masyarakat yang agamis, berkarakter dan berbudaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan. Kehidupan masyarakat yang agamis, berkarakter dan berbudaya berasal dari pengamalan ajaran agama dan adat istiadat yang mendorong manusia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, mendidik manusia agar berbuat baik dan mencegah berbuat buruk.

Dengan Pengamalan ajaran agama dan adat istiadat yang baik, seseorang mampu memahami keberadaan Tuhan dan mengabdikan kepada-Nya serta bersikap empati kepada sesama. Agama dan adat istiadat sebagai sistem nilai berfungsi sebagai penyelamat, pendidikan, bimbingan, pemersatu, pengubah dan pemecahan masalah yang diarahkan pada upaya peningkatan tata kehidupan masyarakat yang agamis, berkarakter dan berbudaya sebagaimana yang tertuang dalam tujuan V ini.

Tujuan V ini akan dicapai dengan sasaran strategis meningkatnya ketahanan sosial budaya yang berlandaskan ABS SBK, dengan 2 indikator kinerja utama.

Sasaran 12 : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

Sasaran ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan kelima dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatnya tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya. Sasaran ini didukung oleh indikator Persentase Lembaga adat yang aktif dan indikator Persentase sekolah yang menerapkan Pendidikan karakter berkategori baik.

Pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.84
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir	Capaian tahun 2024 terhadap RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian %			
1	Persentase lembaga Adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	100%	100	100	100%	Sangat Tinggi	100	100
2	Persentase sekolah yang menerapkan Pendidikan karakter berkategori baik	110,54	52	92,31	177.51	Sangat Tinggi	53	174.17

Sumber : Dinas Parpora dan Dinas Pendidikan Tahun 2024, data diolah

Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya

a. Perhitungan Capaian Indikator

Capaian Indikator Persentase lembaga Adat yang aktif dihitung dengan menggunakan rumusan dibawah ini :

$$= \frac{\Sigma \text{ lembaga adat yg aktif menjalankan fungsinya (KAN)}}{\Sigma \text{ KAN keseluruhan}} \times 100\%$$

b. Cara Perolehan Capaian Indikator

Perolehan capaian indikator Persentase lembaga adat yang aktif didapat dari laporan yang disampaikan KAN se Kota Payakumbuh kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh kondisi Desember 2024. Lembaga adat yang aktif menjalankan fungsinya dapat diukur dengan menggunakan 3 kriteria yakni :

1. Melaksanakan Rapat Internal KAN,
2. Menyelesaikan sengketa adat, dan
3. Menyelenggarakan kegiatan pelestarian adat & budaya.

Data yang disampaikan oleh KAN se kota Payakumbuh kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.85
Kriteria lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya

No	Nama KAN	Kriteria			
		Melaksanakan Rapat Internal	Penyelesaian Sengketa Adat		Menyelenggarakan kegiatan pelestarian adat & budaya
			Kasus	Selesai	
1.	Koto Nan Ampek	Ada	1	-	7 kegiatan
2.	Limbukan	Ada	1	1	2 kegiatan
3.	Aua Kuniang	Ada	1	1	1 kegiatan
4.	Koto Nan Gadang	Ada	1	1	2 kegiatan
5.	Aia Tabik	Ada	-	-	2 kegiatan
6.	Tiaka	Ada	1	1	2 kegiatan
7.	Payobasuang	Ada	1	1	3 kegiatan
8.	Sungai Durian Lamposi	Ada	1	1	2 kegiatan
9.	Koto Panjang Lamposi	Ada	1	1	2 kegiatan
10	Parambahan Lamposi	Ada	1	1	2 kegiatan

Sumber data : Dinas Parpora Kota Payakumbuh Tahun 2024

c. Analisis Capaian Indikator

Dari tabel di atas, diperoleh hasil bahwa semua KAN yang ada di Kota Payakumbuh memenuhi kriteria aktif, meskipun pada KAN Koto Nan Ampek belum menyelesaikan sengketa adatnya, namun pada kriteria lainnya telah terpenuhi, sehingga hasil perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase Lembaga Adat yang aktif pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\Sigma = \frac{10}{10} \times 100$$

$$\Sigma = 100$$

d. Evaluasi Capaian Indikator

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Kota Payakumbuh aktif dalam menjalankan fungsinya melestarikan adat dalam tata kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari kemampuan KAN dalam menangani sengketa dan konflik adat serta melaksanakan program kerja dan kegiatan pelestarian adat.

Dari data dan analisa capaian kinerja indikator yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh hasil capaian kinerja Indikator Persentase lembaga adat yang aktif (KAN) dapat dicapai 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja 100 % dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Indikator

1. Meningkatnya kesadaran lembaga adat lokal tentang pentingnya peran KAN ditengah masyarakat adat di Kota Payakumbuh.
2. Makin meningkatnya perhatian pemerintah Kota Payakumbuh terhadap penguatan kelembagaan adat.

Program Pendukung Pencapaian Indikator Sasaran :

1. Pengelolaan kekayaan budaya daerah
2. Pengelolaan keragaman budaya
3. Pengembangan nilai budaya

Rencana Aksi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan nagari-nagari yang ada di Kota Payakumbuh.

Indikator Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik

Pelaksanaan Pendidikan karakter ini telah dilaksanakan disekolah-sekolah yang ada di Kota Payakumbuh dengan capaian indikator sebesar 92,31 % dari target sebesar 52% pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 177,51 % dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena melebihi dari target yang telah dijanjikan.

Analisis dan Capaian Kinerja Indikator :

a. Perhitungan Capaian Indikator

Capaian Indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik dihitung dengan menggunakan rumusan dibawah ini :

$$= \frac{\Sigma \text{sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik}}{\Sigma \text{sekolah keseluruhan}} \times 100\%$$

b. Cara Perolehan Capaian Indikator

Perolehan capaian indikator didapat dari laporan bulanan yang masuk melalui bidang Pendidikan Dasar kondisi Desember 2024. Data sekolah

yang menerapkan Pendidikan karakter di Kota Payakumbuh terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.86
Sekolah yang menerapkan Pendidikan karakter

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Menerapkan Pendidikan Karakter berkategori Baik
1	SD	84	77
2	SMP	20	19
	Jumlah	104	96

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2024

c. Analisis Capaian Indikator

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa jumlah sekolah di Kota Payakumbuh kondisi akhir Tahun 2024 adalah sebanyak 104 Sekolah dan jumlah sekolah yang sudah menerapkan pendidikan karakter beraktegori baik adalah sebanyak 96 sekolah sehingga Persentase sekolah yang menerapkan Pendidikan karakter berkategori baik adalah sebagai berikut :

$$= \frac{96}{104} \times 100\%$$

$$= (92.31)\%$$

d. Evaluasi Capaian Indikator

Evaluasi capaian indikator diperoleh dengan membandingkan antara capaian dan target indicator dan faktor penyebab berhasil atau tidaknya capaian target yang dimaksud. Analisis evaluasi capaian indikator berdasarkan target RPD terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.87
Target dan capaian kinerja indikator persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik

No	Indikator	Capaian tahun 2023	2024			Kategori	Target Akhir	Capaian tahun 2024 terhadap RPD (%)
			Target	Realisasi	%			
2	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik	110,54%	52	92,31	177,51	Sangat Tinggi	53	174,17

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2024

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan hasil **Sangat Tinggi**.

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Komitmen Kepala Daerah, unsur perangkat daerah dan Sekolah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan karakter.
2. Tersedianya jumlah sarana dan prasarana Pendidikan yang cukup memadai di SD/MI dan SMP/MTs
3. Adanya peran orang tua siswa dalam peningkatan Pendidikan karakter pada anak

Hambatan / masalah yang menghambat

1. Pemerataan dan kualitas guru pada tingkat SD/MI dan SMP/ MTs berdasarkan wilayah belum maksimal.
2. Paradigma masyarakat tentang “sekolah favorit” pada setiap jenjang Pendidikan, tidak bisa dihilangkan sehingga terjadi penumpukan jumlah siswa pada sekolah tertentu.

Rencana Aksi

1. Pemerataan jumlah guru disetiap tingkat Pendidikan harus secara profesional berdasarkan kebutuhan dan jumlah rombel/ mata pelajaran.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Guru melalui Pendidikan dan latihan.
3. Membuat sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.88
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian
Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	64,866,791,099.00	62,535,537,028.00	96.41
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	38,856,486,016.00	35,610,798,567.00	91.65
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	1,231,397,450.00	1,112,184,359.00	90.32
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	6,408,076,450.00	5,959,023,587.00	92.99
5	Meningkatnya sektor strategis	13,790,139,862.00	12,996,924,390.00	94.25
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	663,971,950.00	470,632,450.00	70.88
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	581,187,355,277.00	536,491,109,038.00	92.31
8	Meningkatnya Pelayanan pulik yang prima	25,642,799,602.00	22,511,614,641.00	87.79
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	36,714,281,228.00	35,566,283,945.00	96.87
10	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	23,281,016,591.00	20,518,278,177.00	88.13
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	6,520,612,178.00	6,474,090,362.00	99.29
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	2,591,444,450.00	2,478,580,735.00	95.64
JUMLAH		801.754.372.153,00	742.725.057.279,00	92.64

Sumber Data : BKD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Dari tabel 3.85 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar Rp. 801.754.372.153,- untuk menunjang 12 (dua belas) sasaran strategis daerah.
2. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 untuk menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebesar Rp. 801.754.372.153,- dan terealisasi sebesar Rp. 742.725.057.279,- atau sebesar 92,64%. Artinya dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 59.029.314.874,- atau 7.36%. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap pencapaian Misi Pemerintah Kota Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa, anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja organisasi.

3.3 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2024



Kota Payakumbuh berhasil mendapatkan penghargaan di kategori **SAKIP dengan Prediket BB** tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Drs. Rida Ananda, M.Si di Hotel Bidakara Jakarta.

2. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Pj. Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman, M.M, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Drs. Syafwal, MM dan Kepala Inspektorat Andri Narwan, S.Sos, MM, CGCAE menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Perwakilan Sumatera Barat yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangan (LKPD) Tahun 2023 yang diserahkan pada 05 April 2024 oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Bapak Arif Agus di Padang, penghargaan WTP tersebut diterima Pemerintah Kota Payakumbuh yang ke 10 kali secara berturut-turut.

3. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya pada Tahun 2024 dan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Nindiya



Pemerintah Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Pj. Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman, MM, terus diganjar berbagai prestasi bergengsi di kancah nasional

dengan penghargaan Anugerah Parahita Ekpraya (APE) 2024 kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga kepada Pj. Wali Kota Drs. Jasman, MM di Gedung Metro TV Lantai 3, Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (19/12/2024).

4. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2024



Kota Payakumbuh berhasil meraih **predikat terbaik dalam Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024** dari Ombudsman Republik Indonesia, dengan nilai 97,6 yang termasuk dalam Zona Hijau. Dengan pencapaian ini, Payakumbuh menjadi kota nomor satu di Sumatera Barat dan menduduki peringkat ke-12 secara nasional untuk kategori kota.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan oleh Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Meilisa Fitri Harahap, kepada Plt. Asisten II Kota Payakumbuh, Ir. Walasri, MM yang mewakili Pj. Wali Kota Ir. Suprayitno, MA, di Hotel Mercure Kota Padang pada Rabu (11/12/2024).

5. Penghargaan Pelaksanaan Program Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Tahun 2024.

Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman Dt. Bandaro Bendang menerima dua penghargaan sekaligus dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatra Barat. Kedua penghargaan yang di terima Pemerintah Kota Payakumbuh yakni, atas keberhasilan **Pelaksanaan Program Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Tahun 2024** dengan predikat “Sangat Tanggap” dengan indeks 3,44 (tertinggi di Sumatra Barat), dan atas partisipasi dan dukungan dalam **Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**.

Kepala BNNP Sumbar Tri Julianto Djatiutomo yang hadir langsung untuk menyerahkan penghargaan Pemerintah Kota Payakumbuh ini mengucapkan selamat dan sampaikan apresiasinya atas prestasi yang telah dicapai Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

6. Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Sangat Baik dengan Nilai -A untuk Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD Dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh (dari Kemenpan-RB)



Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2024 yaitu sebesar 4,50 dengan predikat A-, kategori Sangat Baik dengan rincian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 4,48 (Predikat A-), Dinas

Sosial dengan nilai 4,51 (Predikat A) dan RSUD dr. Adnaan WD dengan nilai 4,48 (Predikat A-). Kota Payakumbuh berada pada urutan ke-26 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia dan menempati posisi pertama untuk di wilayah Sumatera.

7. Kepala Daerah yang mendukung Gerakan Peduli Budaya Lingkungan Hidup Sekolah (GPBLHS) Tahun 2024



Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno menerima **penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)** sebagai Kepala Daerah yang mendukung Gerakan Peduli Budaya Lingkungan Hidup Sekolah (GPBLHS) Tahun 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri LHK Siti

Nurbaya pada malam puncak Festival LIKE 2 Tahun 2024 di JCC Jakarta, Sabtu (10/08/24).

8. **Indek RB Tertinggi di Sumatera Barat**

Pemerintah Kota Payakumbuh meraih nilai Reformasi Birokrasi (RB) tertinggi di Sumatera Barat dengan nilai 77,27 dengan predikat BB. Penilaian RB ini menunjukkan kemampuan seluruh aparatur Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

9. **Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)**



Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman Dt. Bandaro Bendang menerima Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Ini merupakan penghargaan yang sangat bergengsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan penghargaan idaman

dari seluruh Kabupaten/Kota serta provinsi se-Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung saat Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (02/05/2024).

10. **Penghargaan Inovasi Teknologi Tepat Guna**



Win streak, sejak 2019–2023 Kota Payakumbuh selalu menjadi peringkat pertama pada lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan di tingkat Sumatera Barat.

Dengan Inovasi Komba Milea (Kompur berbahan bakar minyak jelantah berbasis Solar Cell) yang

digagas oleh Afriandi (IKM Andira), Kota Payakumbuh kembali memberikan kejutan menarik setelah memenangkan Juara 1 lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna kategori unggulan tingkat Provinsi yang diikuti seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Juara harapan 1 di tingkat nasional mewakili Provinsi Sumatera Barat dengan Kategori yang sama. Kota Payakumbuh bersaing dengan seluruh Kabupaten/ Kota se-Indonesia pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) ke XXV yang diadakan di Mataram, Senin(15/07/2024).



Dalam kegiatan tersebut, Pj. Wali Kota Payakumbuh Suprayitno, mendapatkan lencana inisiator inovasi dan penghargaan atas kontribusi dan kerja keras dalam membina pengembangan TTG di Kota Payakumbuh yang disematkan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Prof. (H.C). Dr

(H.C) Abdul Halim Iskandar, M.Pd. Hal yang berkesan bagi tim penilai adalah bentuk dukungan Pj. Wali Kota Payakumbuh salah satunya adalah melalui video pendek yang mengungkapkan dukungan penuh terhadap pengembangan inovasi “Komba Milea” Kompor Berbahan Bakar Minyak Jelantah Berbasis Solar Cell yang ditayangkan dalam sesi penilaian di Rumah Dinas Wali Kota Payakumbuh melalui daring. Namun hal yang paling sangat mengejutkan adalah pertama kalinya Provinsi Sumatera Barat mendapatkan juara dalam event dimaksud setelah 25 tahun digelar, dan itu adalah inovasi teknologi karya Putra Daerah Kota Payakumbuh.

11. Penghargaan predikat istimewa dari KPK RI dalam penilaian Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2024



Kota Payakumbuh mendapat predikat istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam penilaian Program Percontohan

Kabupaten/ Kota Antikorupsi 2024, Selasa (12/11/2024). Nilai istimewa tersebut sukses membawa Payakumbuh menjadi Kota Percontohan Antikorupsi yang diresmikan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Aula Ngalau Indah Lantai 3 Balaikota Payakumbuh, pada tanggal 9 Desember 2024 .

12. Kota Percontohan Anti Korupsi



Kota Payakumbuh mengukir prestasi sebagai Kabupaten/ Kota Percontohan Antikorupsi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 di Gedung Juang Merah Putih Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (09/12/2024).

Predikat bergengsi ini diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Payakumbuh Suprayitno dari Pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango, didampingi Kepala BPKP RI, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Kementerian Keuangan. Kota Payakumbuh terpilih menjadi percontohan Kota Antikorupsi berkat keberhasilannya memenuhi enam komponen utama dan 19 indikator penilaian yang ditetapkan oleh KPK.

13. Kinerja terbaik dalam pelayanan publik Dinas PUPR



Pj Wali Kota Payakumbuh mengucapkan puji syukur nya kepada Allah SWT atas anugerah yg dikaruniakan kepada kita, khususnya kepada kawan kawan Dinas PUPR yang telah menorehkan prestasi gemilang atas **kinerja**

terbaik dalam pelayanan publik khususnya dalam memastikan bahwa pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Payakumbuh telah berlangsung sesuai ketentuan norma yg dipersyaratkan untuk mewujudkan Konstruksi yang Agile, Adaptif dan Berkelanjutan bagi pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh. Prestasi membanggakan ini dapat kita jadikan sebagai penambah motivasi dalam melaksanakan kinerja lebih baik lagi. Menjadi Peringkat III Tingkat Nasional tentulah sebuah capaian yg hebat dan luar biasa, 6-8 November 2024.

14. Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS)



Plt Asisten II Pemerintah Kota Payakumbuh Wal Asri yang mewakili Pj Wali Kota menerima **Penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS)** dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Sumatera Barat setelah mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2,69. Penghargaan yang diserahkan Plh Sekretaris Daerah Sumatera Barat Erinaldi dan Kepala BPS Sumatera Barat Sugeng usai Pelaksanaan Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-96 di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Senin (28/10/2024).

15. Penghargaan Adiwiyata Nasional



Tiga sekolah di Kota Payakumbuh mencetak prestasi membanggakan dengan meraih **Penghargaan Adiwiyata Nasional 2024**, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan program pelestarian lingkungan.

Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian acara yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (02/10/2024). SMP Negeri 1, SD Negeri 03, dan SD Negeri 58 Payakumbuh menjadi sekolah-sekolah yang berhasil memenuhi kriteria program Adiwiyata.

16. Penghargaan Nasional Berkat Komitmen Lingkungan



Kota Payakumbuh raih Penghargaan Nasional Berkat Komitmen Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mewakili Wali Kota Payakumbuh

sebagai narasumber dalam *talkshow* bertema “Peran Kepala Daerah dalam Mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah” di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (01/10/2024).

Acara ini merupakan rangkaian dari penghargaan Adiwiyata Nasional 2024 yang diselenggarakan untuk memperkuat komitmen daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis sekolah.

17. Juara umum Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Hebat tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar)



Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh berhasil meraih capaian terbaik dengan menjadi juara umum dalam Ajang lomba Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Hebat tingkat

Provinsi Sumatra Barat yang bertempat di Convention Center PGRI Sumatera Barat dari tanggal 7 sampai 10 November 2024.

Penghargaan yang telah diraih oleh guru terbaik di kota Payakumbuh ini diserahkan langsung Pj. Wali Kota Payakumbuh di aula lantai II kantor bersama Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

18. Penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024



Pj. Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024 pada ajang Gebyar Pelayanan Prima

2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara yang digelar di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Selasa (08/10/2024).

19. Penghargaan bergengsi dalam bidang pendidikan vokasi pada ajang Industrial Education and Training Expo (IDUTEX) 2024.



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Yunida Fatwa menerima penghargaan bergengsi dalam bidang pendidikan vokasi pada ajang Industrial Education and Training Expo (IDUTEX) 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian atas inovasi dan kontribusi Payakumbuh dalam mengembangkan program pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri modern yang digelar Senin (07/10/2024) di Jakarta.

20. Terbaik 1 Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.



Kelurahan Koto Panjang sukses menyabet predikat terbaik 1 pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Dari 3 kelurahan yang masuk nominasi,

Kelurahan Koto Panjang Kota Payakumbuh yang ditetapkan sebagai pemenang, dan dilanjutkan mengikuti Seleksi perlombaan tingkat regional mewakili Provinsi Sumatera Barat dengan melalui beberapa tahapan, yakni seleksi administrasi sesuai bidang penilaian berdasarkan

Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi desa dan kelurahan, peninjauan lapangan, serta ekspose.

21. Penghargaan Kelurahan terbaik Regional I Sumatera dalam Lomba Kelurahan Tingkat Nasional 2024.



Kelurahan Koto Panjang masuk 3 besar Regional I Sumatera dalam Lomba Kelurahan Tingkat Nasional 2024.

Lurah Titi Fanny Gusti berhasil memaparkan inovasi unggulan seperti Siap KOPAN (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Koto Panjang), yang mempermudah layanan administrasi untuk warga

secara cepat dan transparan. Dengan motto BATUAH (Bersih, Agamis, Tertib, Unggul, Aman, dan Hormanis), Koto Panjang terus berinovasi untuk menjadi yang terbaik..

22. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 pada kategori Kota Sedang.



Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 pada kategori Kota Sedang yang diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Hub

Space 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).

Penghargaan WTN tahun 2024 diterima atas keberhasilan dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem

transportasi perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.

23. Penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal tahun berjalan tahun 2024 kategori Percepatan Penurunan Stunting senilai Rp. 5.587.195.000



Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno menerima penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal tahun berjalan tahun 2024 kategori Percepatan Penurunan Stunting senilai Rp. 5.587.195.000.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (4/9/2024).

“Alhamdulillah, Kota Payakumbuh kembali mendapat penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan TA 2024 kategori Penurunan Stunting,”

24. Penghargaan ASN berprestasi tingkat Nasinal



Novit Ardy, Kepala UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, berhasil meraih penghargaan

sebagai ASN Berprestasi kategori Jabatan Pengawas Terbaik kedua dalam ajang Anugerah ASN 2023 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB RI.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB, Azwar Anas, bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pada acara ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah



ASN 2023 di Gedung Dhanapala Jakarta Pusat, Selasa (27/08/2024). Hadir juga dalam kesempatan tersebut Asisten III Ifon Satria Chan.

25. Juara pertama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Award 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat



Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil menjadi juara pertama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Award 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dilaksanakan BKKBN provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan itu membuat Pemerintah Kota Payakumbuh mewakili Provinsi Sumatera Barat mengikuti penilaian iBangga Award tahun 2024 bersaing dengan kota lainnya di Indonesia dan memasang target meraih terbaik nasional. IBangga Payakumbuh paling tinggi di antara kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan nilai 1465,5 dengan tren angka iBangga: tahun 2021 53,83 persen, tahun 2022 57,71 persen dan tahun 2023 65,52 persen.

26. Penghargaan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).



Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno menerima penghargaan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo pada peringatan puncak Hari

Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2024).

27. Penghargaan Tiga kategori yakni: TOP Pembina BUMD untuk Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Jasman Dt. Bandaro Bendang, TOP BUMD Award Bintang 4 untuk Pamtigo Kota Payakumbuh, dan TOP CEO BUMD 2024 untuk Direktur Utama Pamtigo Khairul Ikhwan.).



Perumda Air Minum Tirta Sago (Pamtigo) Kota Payakumbuh berhasil mendapatkan tiga penghargaan **TOP BUMD Awards** yang diselenggarakan majalah Top Business di Hotel Raffles

Jakarta, Rabu (20/03/2024). Tiga penghargaan tersebut yakni TOP Pembina BUMD untuk Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Jasman Dt. Bandaro Bendang, TOP BUMD Award Bintang 4 untuk Pamtigo Kota Payakumbuh, dan TOP CEO BUMD 2024 untuk Direktur Utama Pamtigo Khairul Ikhwan. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Operasional Agus Rianto dan Kasubag Perencana Keuangan Yesi Lisrita.

Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman mengatakan bahwa tiga penghargaan yang diterima tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh karyawan Pamtigo Kota Payakumbuh.

28. Empat Penghargaan dari Pemerintah Prov. Sumatera Barat



Empat penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh yakni Kota Terbaik III pada Penghargaan Pembangunan Daerah, Penghargaan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dengan capaian 0 persen, terbaik II Penghargaan terbaik dalam

capaian akses sanitasi layak dengan capaian 99,13 persen dan Penghargaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman Dt. Bandaro Bendang didampingi Staf Khusus Mendagri Muchlis Hamdy dalam kegiatan Musrenbang terintegrasi Provinsi Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang Kamis (18/04/2024).

29. Penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Award 2024 sebagai Terbaik II untuk kategori kota di wilayah Sumatera.



Kota Payakumbuh kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Award 2024 sebagai Terbaik II untuk kategori kota di wilayah

Sumatera. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD, kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno, dalam acara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Senin (23/09/2024). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, di antaranya Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, serta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

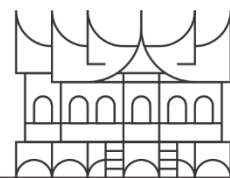
30. Peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Sumatera Barat 2024 dari Komisi Informasi Sumbar.



Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh berhasil meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Sumatera Barat 2024 dari Komisi Informasi Sumbar. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pamtigo dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan informatif

kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam RPD 2023-2026 dan telah memenuhi 12 (dua belas) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran.

Kategori penilaian keberhasilan capaian kinerja dari 20 (dua puluh) indikator kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh adalah dengan kategori sangat tinggi (>91.00%).

Anggaran program yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 801.754.372.153,- dan terealisasi sebesar Rp. 742.725.057.279,- atau 92,64%. Artinya dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 59.029.314.874,- atau 7.36%. yang mencerminkan cukup baiknya perencanaan dan penganggaran terhadap program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024. Di masa mendatang, Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan langkah-langkah perbaikan yang terus menerus (continuous improvement) seperti peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Payakumbuh yang selaras dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel seperti yang diharapkan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Payakumbuh, 25 Maret 2025


WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 060.2/177/Wk-Pyk/2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 sesuai dokumen RPD yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Republik Indonesia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17) ;
11. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
- KEDUA** : Menetapkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : IKU sebagaimana dimaksud pada diktum kedua wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
 - c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan;
 - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Maret 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat c/q. Kepala Biro Organisasi di Padang.
2. Sdr. Kepala OPD se Kota Payakumbuh
3. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
: 060.2/177/Wk-Pyk/2023
: 10 Maret 2023
: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	1 Angka harapan lama sekolah	Tahun	Sebagai dasar untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	HLS t a = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t adalah Faktor koreksi pesantren (FK) dikali (sygma anak umur a sd tahun n dikali denngan hasil pembagian antara jumlah penduduk umur a pada tahun t dibagi jumlah anak umur a di tahun t) $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, n) FK = Faktor koreksi pesantren</p>	Dinas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.
		2 Rata-rata lama sekolah	Tahun	Sebagai dasar untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	RLS = 1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dikali jumlah total penduduk dengan lama sekolah penduduk ke I yang berusia 25 tahun. $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.</p>	Dinas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3 Angka Harapan Hidup	Tahun	Sebagai dasar untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur-x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku	BPS/Bappeda/ Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan
		4 Prevalensi stunting	%	Target Nasional penurunan prevalensi stunting setiap tahun harus berkisar 2,7%	Jumlah anak balita stunting di bawah 5 tahun dibagi jumlah anak balita dikali 100 persen $PAB(5)SPstunting = \frac{JAB(5)SPstunting}{JAB(5)} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAB(5)SPstunting = Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5)SPstunting = Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada suatu tertentu JAB(5) = Jumlah anak balita sera waktu yang sama</p>	Dinas Kesehatan	stunting adalah kondisi anak memiliki tinggi di bawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan asupan gizi kronis pada periode 1.000 hari pertama kehidupannya
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai/ indeks	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Persentase sumbangan perempuan dalam PDRB percapita ditambah persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen dan jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan	DP3AP2KB	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknis.

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	6 Tingkat Kemiskinan	Persentase	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi total jumlah penduduk dikali 100 persen $P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	BPS/Bappeda	Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan
		7 Tingkat Pengangguran	Persentase	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	(Jumlah angkatan kerja yang menganggur : jumlah angkatan kerja keseluruhan) x 100 %	BPS/Naker	Penganggur terbuka, terdiri dari Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
5	Meningkatnya Sektor Strategis	8 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 9 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase Persentase	Sektor strategis adalah sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh perlu dilakukan peningkatan produktivitas sektor strategis	$\frac{(\text{Nilai PDRB Sektor strategis tahun } n \text{ dikurangi Nilai PDRB Sektor Strategis tahun } n-1)}{\text{Nilai PDRB Sektor strategis tahun } n-1} \times 100\%$	BPS, Dinas Koperasi dan UKM BPS, Dinas TK & Perindustrian,	kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10 Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	Milyar	Untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh	Nilai realisasi investasi tahun n	BPS, DPM-PTSP	penanaman modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan (return) di masa mendatang, tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	11 Nilai Evaluasi AKIP Kota 12 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Prediket/ Nilai Indeks/ Nilai	Sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemendagri mengharapkan IPKD dapat memacu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui pengukuran 6 dimensi pelaporan	Nilai Evaluasi SAKIP Kota Payakumbuh Hasil Evaluasi/Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kemendagri	Setdako BKD	Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh Kemenpan RB RI satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu, mempedomani permendagri no 19 tahun 2020
8	Meningkatnya Pelayanan publik yang prima	13 Indeks SPBE 14 IKM	Nilai/ indeks Kategori	Sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menuju e-government Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg pelayanan publik	Nilai Evaluasi SPBE Kota Payakumbuh Tahun-n Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun-n	KemenPANRB/ Kominfo Semua Perangkat Daerah	SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kualitas pelayanan publik yang prima

Tujuan IV : Meningkatnya Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15 Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	Persentase	Untuk peningkatan Konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan perekonomian dan pusat - pusat pertumbuhan lainnya	(Panjang jalan dalam kondisi baik : Panjang jalan keseluruhan) x 100%	DPUPR	Dalam menghitung panjang jalan dalam kondisi mantap digunakan status jalan baik dan sedang yang dibandingkan panjang jalan keseluruhan
		16 Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	Persentase	1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010 -2030. 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2038	(Jumlah fasilitas umum perkotaan yang tersedia : Jumlah fasilitas umum sesuai Standar Pelayanan Perkotaan) x 100%	DPUPR	Kriteria yang digunakan dalam menghitung ketersediaan fasilitas umum perkotaan dengan menghitung jumlah fasilitas umum yang terdiri dari (1) Tempat ibadah (2) Fasilitas Transportasi (3) Fasilitas kesehatan (4) Taman dan fasilitas kebersihan (5) Fasilitas pendidikan (6) fasilitas komersil (7) fasilitas hiburan , yang dibandingkan dengan fasilitas sesuai standar.
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai/ indeks	Rekomendasi KLHS dan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30 % IKA + 30% IKU + 40 % ITL	DLH, DPKP, Dinas Perhubungan	Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	(Luas penggunaan lahan sesuai RTRW : luas wilayah Kota) x 100%	DPUPR	

Tujuan V : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Agamis, Berkarakter dan Berbudaya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19 Persentase lembaga adat yang aktif	Persentase	Optimalisasi fungsi lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang aktif menjalankan fungsinya (KAN) dibagi jumlah KAN keseluruhan	Dinas Parpora	KAN (kerapatan Adat Nagari) sesuai fungsinya sebagai mitra dari pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan nagari. KAN sebagai lembaga adat tertinggi akan dapat menengahi permasalahan dan menelaraskan kepentingan yang mungkin terjadi dalam tahap perencanaan serta yang telah terjadi pada tahap koordinasi dalam membangun masyarakat
		20 Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik	Persentase	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia/ berkarakter sejak dini	(Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik : Jumlah sekolah keseluruhan) x 100%	Dinas Pendidikan	Pendidikan karakter diutamakan dalam membangun kebiasaan dan berakhlak serta berbudi pekerti luhur bagi siswa



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. SUPRAYITNO, MA**
Jabatan : **Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Payakumbuh, 1 Oktober 2024



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Ir. SUPRAYITNO, M.A

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024**

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	1 Angka harapan lama sekolah	14.30	Dinas Pendidikan
		2 Rata-rata lama sekolah	11.26	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3 Angka usia harapan hidup	74.32	Dinas Kesehatan
		4 Prevalensi stunting	14.00	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72.51	DP3AP2KB

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	6 Tingkat Kemiskinan	5.41	Bappeda/BPS
		7 Tingkat Pengangguran	5.81	Dinas Naker Perind/BPS
5	Meningkatnya sektor strategis	8 Pertumbuhan PDRB Sektor industri	2.94	Dinas Naker Perind/BPS
		9 Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	4.28	Dinas Koperasi & UKM/BPS
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10 Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	225	DPM-PTSP

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	11 Nilai Evaluasi AKIP Kota	A	Setdako
		12 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	76	BKD
8	meningkatkan Pelayanan pulik yang prima	13 Indeks SPBE	2.70	Dinas Kominfo
		14 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.50	Setdako

Tujuan IV : Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15 Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	85.76	Dinas PUPR
		16 Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	74.20	Dinas PUPR
10	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58.26	Dinas LH
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80.36	Dinas PUPR

Tujuan V : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19 Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	100	Dinas Parpورا
		20 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	52.00	Dinas Pendidikan



Payakumbuh, 1 Oktober 2024
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Ir. SUPRAYITNO, MA

NO	PROGRAM PERUBAHAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	530,050,396,564.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	56,366,828,935.00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	240,000,000.00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	130,026,900.00
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33,225,884,964.00
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	788,345,952.00
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	378,944,000.00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,037,796,900.00
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9,402,910,054.00
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	221,599,800.00
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8,473,617,352.00
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1,178,556,474.00
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4,986,794,450.00
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14,788,057,934.00
15	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	296,367,806.00
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,407,012,528.00
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,049,442,520.00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	521,875,780.00
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,449,776,050.00
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	137,674,374.00
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,577,915,634.00
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1,479,968,632.00
23	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	768,934,050.00
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	204,604,900.00
25	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	799,097,800.00
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,959,195,550.00
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	30,693,600.00
28	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	86,351,600.00
29	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,240,592,100.00
30	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	139,284,458.00
31	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	27,738,750.00
32	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	138,104,450.00
33	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	57,097,200.00
34	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	901,893,050.00

NO	PROGRAM PERUBAHAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN
35	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	9,389,500.00
36	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	86,689,800.00
37	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	38,223,450.00
38	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	8,012,400.00
39	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	614,449,292.00
40	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	247,066,000.00
41	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	77,501,950.00
42	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	126,805,200.00
43	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	463,175,018.00
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	86,162,292.00
45	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,428,037,241.00
46	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8,266,550.00
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	14,822,600.00
48	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	518,187,524.00
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13,188,097,052.00
50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	415,499,590.00
51	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	321,470,734.00
52	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	412,309,882.00
53	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	325,153,550.00
54	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	37,266,750.00
55	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	186,770,800.00
56	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,873,846,850.00
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,287,394,600.00
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,353,171,808.00
59	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,291,684,136.00
60	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,083,658,100.00
61	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19,999,400.00
62	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	14,999,550.00
63	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	728,708,550.00
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	113,336,950.00
65	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	155,946,550.00
66	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	50,199,950.00
67	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	230,099,850.00

NO	PROGRAM PERUBAHAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN
68	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	573,772,000.00
69	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	40,000,000.00
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	194,750,450.00
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3,719,745,830.00
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	562,225,750.00
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	56,697,650.00
74	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	598,009,376.00
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,934,460,000.00
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	196,448,300.00
77	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	30,340,150.00
78	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	190,196,000.00
79	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3,887,556,234.00
80	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5,657,000.00
81	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	50,990,000.00
82	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	864,017,336.00
83	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	101,323,650.00
84	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	40,000,000.00
85	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	799,896,200.00
86	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	159,999,950.00
87	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	400,000,000.00
88	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	528,560,138.00
89	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,041,092,822.00
90	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,715,874,500.00
91	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,033,607,262.00
92	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	89,991,800.00
93	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	549,774,100.00
94	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	19,679,650.00
95	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,280,551,158.00
96	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	645,877,700.00
97	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	62,316,950.00
98	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	618,316,040.00
99	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,665,673,356.00
100	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	61,899,300.00

NO	PROGRAM PERUBAHAN TAHUN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN
101	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	78,696,950.00
102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,707,719,250.00
103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	395,018,550.00
104	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18,993,688,000.00
105	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	920,642,350.00
106	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	581,264,150.00
107	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,666,558,900.00
108	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	970,618,150.00
109	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	870,475,400.00
110	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,093,003,250.00
111	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	751,861,750.00
112	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	304,482,450.00
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	754,893,600.00
114	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	737,092,000.00
115	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	159,091,700.00
116	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11,532,541,408.00
117	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71,135,000.00
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	696,863,150.00
119	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,341,453,500.00
120	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	15,235,511,263.00
121	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	60,934,150.00
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	118,798,850.00
123	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	632,943,150.00
	JUMLAH	801,754,372,153.00

Payakumbuh, 01 Oktober 2024

PJ. WALIKOTA PAYAKUMBUH



SUPRAYITNO, MA



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

INSPEKTORAT

Jl. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
Email: inspektoratpyk@gmail.com

Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Kota Payakumbuh.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Payakumbuh, 17 Maret 2025

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH




ANDRI NARWAN, S.Sos, M.M., CGCAE.
NIP. 19730319 199308 1 001

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List	
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme	1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKj	√
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10	IKU dan IK telah SMART	√

Payakumbuh, 17 Maret 2025

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH



ANDRI NARWAN, S.Sos, M.M., CGCAE.

NIP. 19730319 199308 1 001



PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	= (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	733,573,159,828.00	753,320,524,913.00	102.69	741,409,901,903.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130,174,080,614.00	138,649,853,624.00	106.51	123,216,492,558.00
4.1.01	Pajak Daerah	23,077,762,541.00	23,691,080,250.00	102.66	23,089,810,971.00
4.1.02	Retribusi Daerah	87,502,495,973.00	93,272,708,497.30	106.59	6,247,762,192.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,381,453,735.00	12,381,453,735.00	100.00	11,226,634,662.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7,212,368,365.00	9,304,611,142.00	129.01	82,652,284,733.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	130,174,080,614.00	138,649,853,624.00	106.51	123,216,492,558.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	601,863,079,214.00	613,134,671,289.00	101.87	616,393,409,345.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	571,341,676,793.00	575,781,818,001.00	100.78	585,451,254,645.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30,521,402,421.00	37,352,853,288.00	122.38	30,942,154,700.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,536,000,000.00	1,536,000,000.00	100.00	1,800,000,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,536,000,000.00	1,536,000,000.00	100.00	1,800,000,000.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,536,000,000.00	1,536,000,000.00	100.00	1,800,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	733,573,159,828.00	753,320,524,913.00	102.69	741,409,901,903.00
5	BELANJA DAERAH	801,754,372,153.00	742,725,057,279.00	92.64	733,314,390,719.00
5.1	BELANJA OPERASI	720,831,493,412.00	668,220,386,847.00	92.70	649,290,098,516.00
5.1.01	Belanja Pegawai	411,101,158,831.00	376,394,619,531.00	91.56	341,982,146,872.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278,576,642,568.00	261,363,190,982.00	93.82	274,100,551,170.00
5.1.05	Belanja Hibah	27,872,884,813.00	27,373,461,334.00	98.21	28,555,400,474.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,280,807,200.00	3,089,115,000.00	94.16	4,652,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	720,831,493,412.00	668,220,386,847.00	92.70	649,290,098,516.00
5.2	BELANJA MODAL	79,695,229,741.00	73,985,819,648.00	92.84	83,816,101,803.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,031,232,950.00	834,832,535.00	80.95	3,281,712,722.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,278,135,102.00	21,973,427,518.00	86.93	25,428,835,045.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19,368,489,189.00	17,929,842,688.00	92.57	19,738,743,460.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31,537,223,750.00	30,784,644,322.00	97.61	33,067,838,045.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,476,148,750.00	2,459,672,585.00	99.33	2,298,972,531.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4,000,000.00	3,400,000.00	85.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	79,695,229,741.00	73,985,819,648.00	92.84	83,816,101,803.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,227,649,000.00	518,850,784.00	42.26	208,190,400.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,227,649,000.00	518,850,784.00	42.26	208,190,400.00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1,227,649,000.00	518,850,784.00	42.26	208,190,400.00
	JUMLAH BELANJA	801,754,372,153.00	742,725,057,279.00	92.64	733,314,390,719.00
	SURPLUS/DEFISIT	(68,181,212,325.00)	10,595,467,634.00	(15.54)	8,095,511,184.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	68,181,212,325.00	77,618,589,941.00	113.84	77,023,078,757.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75,681,212,325.00	85,118,589,941.00	112.47	77,023,078,757.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75,681,212,325.00	85,118,589,941.00	112.47	77,023,078,757.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75,681,212,325.00	85,118,589,941.00	112.47	77,023,078,757.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	68,181,212,325.00	77,618,589,941.00	113.84	77,023,078,757.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	88,214,057,575.00	0.00	85,118,589,941.00



Kota Payakumbuh, Januari 2025
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Ir. SUPRAYITNO, MA

